



LAPORAN KINERJA 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



LAPORAN KINERJA

2 0 2 2

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI



DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI

Blok VII Lt.7, Jl. Jenderal Gatot Subroto- JAKARTA

No.Telp. 021 5720 229. E-mail :ditkk@menlhk.go.id

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT, Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi ini dapat disusun tepat waktu. Laporan kinerja ini sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab akuntabilitas pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sebagai institusi yang memiliki komitmen untuk memenuhi asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas tertib penyelenggaraan negara dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Di masa transisi dari situasi pandemi COVID-19 ke situasi normal di tahun 2022, capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik dengan rerata capaian sebesar 109,47%. Dalam rangka mencapai kinerja tersebut, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi pada tahun 2022 didukung dengan anggaran DIPA sebesar Rp 20.065.991.000,- dengan realisasi sebesar Rp 19.887.910.797,- atau 99,11%. Dengan membandingkan capaian kinerja yang menunjukkan angka di atas capaian kinerja anggaran, diperoleh efisiensi senilai **0,91** sehingga dapat dikategorikan **efisien**.

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi juga didukung oleh kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT Ditjen KSDAE dengan dukungan anggaran sebesar Rp 210.477.626.000,- dengan realisasi Rp 199.493.164.927,- atau 94,78%. Dengan demikian total anggaran Kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi di pusat dan UPT Ditjen KSDAE sebesar Rp.230.543.617.000,- dengan realisasi sebesar Rp 219.381.075.724,- atau 95,16%.

Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, serta bermanfaat bagi pihak lain yang berkepentingan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pencapaian target tahun 2022 serta seluruh pihak yang mendukung tersusunnya dokumen ini. Semoga kinerja Direktorat Pengelolaan kawasan konservasi semakin meningkat setiap tahunnya. Amiin.

Jakarta, 16 Januari 2023

Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi

Ir. Jefry Susyafrianto, MM
NIP. 19680404 199603 1004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 15 Tahun 2021, maka secara langsung berpengaruh pada perubahan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi serta target kinerja yang harus dicapai. Pada Renstra Tahun 2020-2024 yang telah direvisi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi yang sebelumnya bertanggungjawab pada 2 (dua) program, berubah menjadi penanggungjawab 1 di program yaitu: “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, dengan sasaran program berupa “Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi.

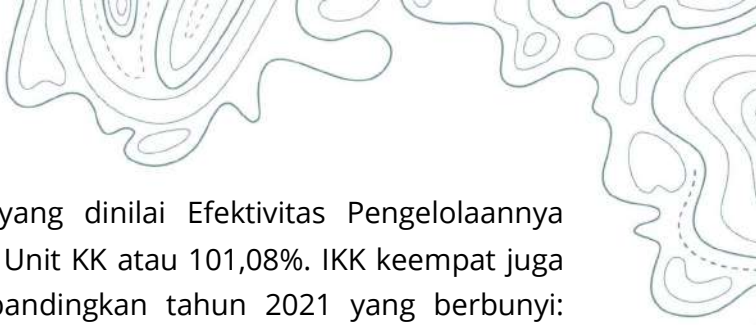
Untuk mewujudkan program tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengelolaan Kawasan Konservasi, namun khusus untuk tahun 2022 sesuai yang tercantum pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, hanya terdapat 5 (lima) IKK yang menjadi target capaian, yaitu: 1). Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (500 desa), 2). Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (90.000 Ha), 3). Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani (180.000 Ha), dan 4) Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya (277 unit KK). Adapun 3 (tiga) IKK lainnya yaitu: 1) Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam, 2) Unit Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya, dan 3) Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, baru akan ditargetkan pencapaiannya mulai tahun 2023.

Sampai dengan akhir tahun 2022, capaian keempat IKK Pengelolaan Kawasan Konservasi tersebut adalah sebagai berikut:

IKK 1. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapat pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan target 500 desa terealisasi 541 desa (108,20%) atau meningkat 14,6% dibandingkan capaian tahun 2021.

IKK 2. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi ditargetkan 90.000 hektar terealisasi 70.750,36 hektar (78,61%) atau naik 22,36% dibandingkan capaian tahun 2021.

IKK 3. Luas Penanganan Konflik Tenurial di kawasan konservasi yang ditangani ditargetkan 180.000 hektar terealisasi 283.963,79 Hektar atau 150%. Narasi IKK ketiga ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yaitu: “Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani” pada tahun 2021 ditargetkan 541.000 hektar terealisasi 550.992 Hektar atau 101,85%.



IKK 4. Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya ditargetkan 277 Unit KK terealisasi 280 Unit KK atau 101,08%. IKK keempat juga mengalami perubahan narasi jika dibandingkan tahun 2021 yang berbunyi: Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya” yang ditargetkan 277 Unit KK terealisasi 285 Unit KK atau 102,89 %.

Secara umum agregat capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2022 mencapai **109,47%** atau mengalami peningkatan 20,82% dibandingkan capaian kinerja di tahun 2021 sebesar 88.65 %. Dari seluruh target yang ditetapkan hanya satu IKK yang capaiannya di bawah 100% yaitu pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat melalui kemitraan konservasi.

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi pada tahun 2022 didukung dengan anggaran DIPA sebesar Rp 20.065.991.000,- dengan realisasi sebesar Rp 19.887.910.797,- atau 99,11%. Dengan membandingkan capaian kinerja yang menunjukkan angka di atas capaian kinerja anggaran, diperoleh efisiensi senilai **0,91** sehingga dapat dikategorikan **efisien**. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi juga didukung oleh kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT Ditjen KSDAE dengan dukungan anggaran sebesar Rp 210.477.626.000,- dengan realisasi Rp 199.493.164.927,- atau 94,78%. Dengan demikian total anggaran Kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi di pusat dan UPT Ditjen KSDAE sebesar Rp 230.543.617.000,- dengan realisasi sebesar Rp 219.381.075.724,- atau 95,16%

Keberhasilan ini sangat didukung oleh banyak pihak, baik di Pusat maupun di UPT. Sebagai penanggungjawab kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi juga mengawal pelaksanaan kegiatan tersebut di UPT. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi diperlukan berbagai upaya antara lain:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi;
2. Mencari alternatif pendanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi;
3. Meningkatkan kapasitas pengelola dalam mengelola nilai penting kawasan yang menjadi mandat kawasan.
4. Koordinasi para pihak dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR LAMPIRAN	9
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. LATAR BELAKANG	10
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI	11
C. ISU STRATEGIS TAHUN 2022.....	13
D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2022	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	21
B. RENCANA KERJA TAHUN 2022	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. CAPAIAN KINERJA.....	28
B. CAPAIAN ANGGARAN	73
BAB IV PENUTUP	75
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024	22
Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024	23
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024.....	23
Tabel 4. Perubahan Perjanjian Kinerja Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022	25
Tabel 5. Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi 2022.....	26
Tabel 6. Rencana Kerja tahun 2022 berdasarkan Rincian output dan Komponen.....	26
Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan kawasan Konservasi tahun 2022	28
Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun sampai dengan tahun 2022 berdasarkan target kinerja tahunan.....	29
Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 berdasarkan target Renstra 2020-2024.....	30
Tabel 10. Capaian Kinerja Tahunan IKK 1	32
Tabel 11. Capaian Kinerja Kumulatif Berdasarkan Renstra 2020-2024	32
Tabel 12. Peserta ToT Fasilitasi Tingkat Lanjut.....	38
Tabel 13. Capaian Kinerja Tahunan IKK 2.....	40
Tabel 14. Capaian Kinerja Kumulatif berdasarkan Renstra 2020-2024	40
Tabel 15. Capaian Kinerja Tahunan IKK 3.....	47
Tabel 16. Capaian target IKK 3 berdasarkan Renstra 2020 - 2024	47
Tabel 17. Capaian Kinerja Tahunan IKK 4.....	55
Tabel 18. Alokasi kegiatan BCCPGLE berdasarkan PIU	68
Tabel 19. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan proyek BCCPGLE pada tahun 2022 pada masing – masing PIU.....	69
Tabel 20. Capaian untuk indikator teknis pada project BCCPGLE.....	69
Tabel 21. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Pusat dan UPT.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	11
Gambar 2. Sebaran Pegawai Dit. Pengelolaan Kawasan Konservasi	12
Gambar 3. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022...	29
Gambar 4. Sebaran Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan...	33
Gambar 5. Kunjungan lapangan di desa binaan BTN Gunung Rinjani (dok: Amelia)	35
Gambar 6. Pemberdayaan masyarakat Perempuan SAD (dok: BTNBD)	35
Gambar 7. Pemberian Apresiasi Desa Binaan Konservasi dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2022	36
Gambar 8. Penyerahan Apresiasi Desa Binaan Konservasi pada Puncak Peringatan HKAN 2022 di Taman Nasional Bali Barat (Dok. Amelia).....	36
Gambar 9. Daftar penerima apresiasi Desa Binaan Konservasi tahun 2022	37
Gambar 10. ToT Fasilitasi Tingkat Lanjut untuk Pendamping Desa Sekitar KK (Dok. Amelia)	38
Gambar 11. Kerjasama multipihak yang menyelenggarakan ToT Fasilitasi Tingkat Lanjut	38
Gambar 12. Budidaya keramba jala apung di TN Bali Barat	44
Gambar 13. Pengambilan Getah Aren di TN Kep. Togean	44
Gambar 14. Tahapan Penanganan Kegiatan Terbangun	49
Gambar 15. Grafik Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022	57
Gambar 16. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	57
Gambar 17. Grafik Capaian Nilai Efektivitas Pengelolaan Yang Dilakukan pada 189 Unit KK.....	58
Gambar 18. Sosialisasi Program dan Rencana KBPE bersama 28 KTHK di 18 Desa dengan 8 Unit KBPE	71
Gambar 19. Kegiatan Sekolah Lapang KBPE dan Ecosistem serta Keterlibatan Ibu-Ibu..	72
Gambar 20. Kegiatan PRA / PLUP	72
Gambar 21. 41 QANUN DESA dan 1 KKD di Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Subulussalam, 5 KKD Aceh Tenggara dan 4 KKD di Gayo Lues.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	77
Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	79
Lampiran 3. Capaian Kesepakatan Konservasi Sampai Dengan Tahun 2022	82
Lampiran 4. Daftar Kelompok Kemitraan Konservasi akses HHBK s/d 2022.....	110
Lampiran 5. Luas Penanganan Konflik Tenurial dan Kegiatan Terbangun Tahun 2022 berdasarkan tahapan.....	118
Lampiran 6. Daftar Subyek dan Obyek yang telah terdaftar dalam SK Menteri LHK tentang Penetapan Data dan Informasi	119
Lampiran 7. Peta Kebakaran Hutan di Kawasan Konservasi	120
Lampiran 8. Distribusi Sarpras Dalkarhut Pada 13 UPT Super Prioritas	123
Lampiran 9. Hasil Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Tahun 2022	124
Lampiran 10. Daftar Kawasan Konservasi Berstatus Warisan Dunia	135
Lampiran 11. Daftar Kawasan Konservasi Berstatus Cagar Biosfer.....	136

BAB I PENDAHULUAN

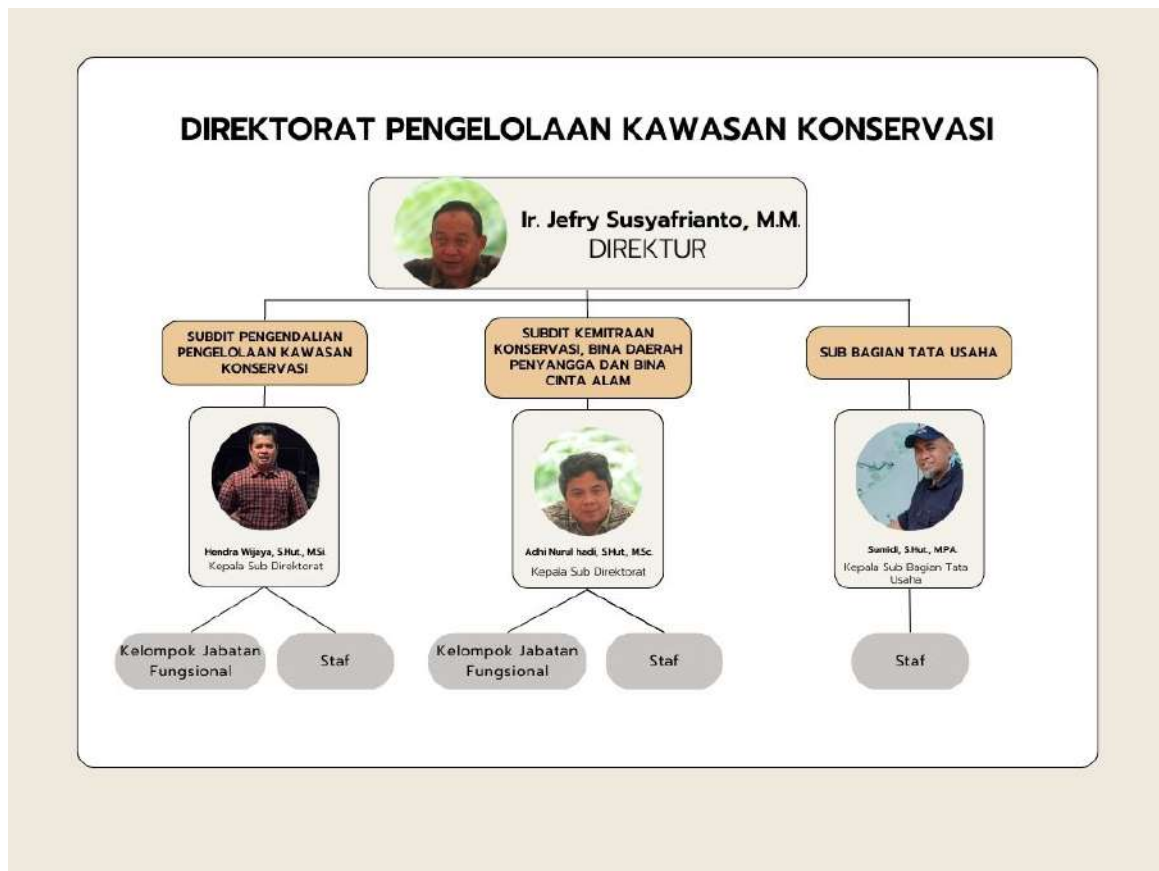
A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam mengukur akuntabilitas satuan kerja maka perlu disusun rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja tersebut.

Perjanjian kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran kegiatan untuk mencapai target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan analisis terhadap hasil capaian kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dengan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran kegiatan termasuk juga efisiensi anggaran.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI

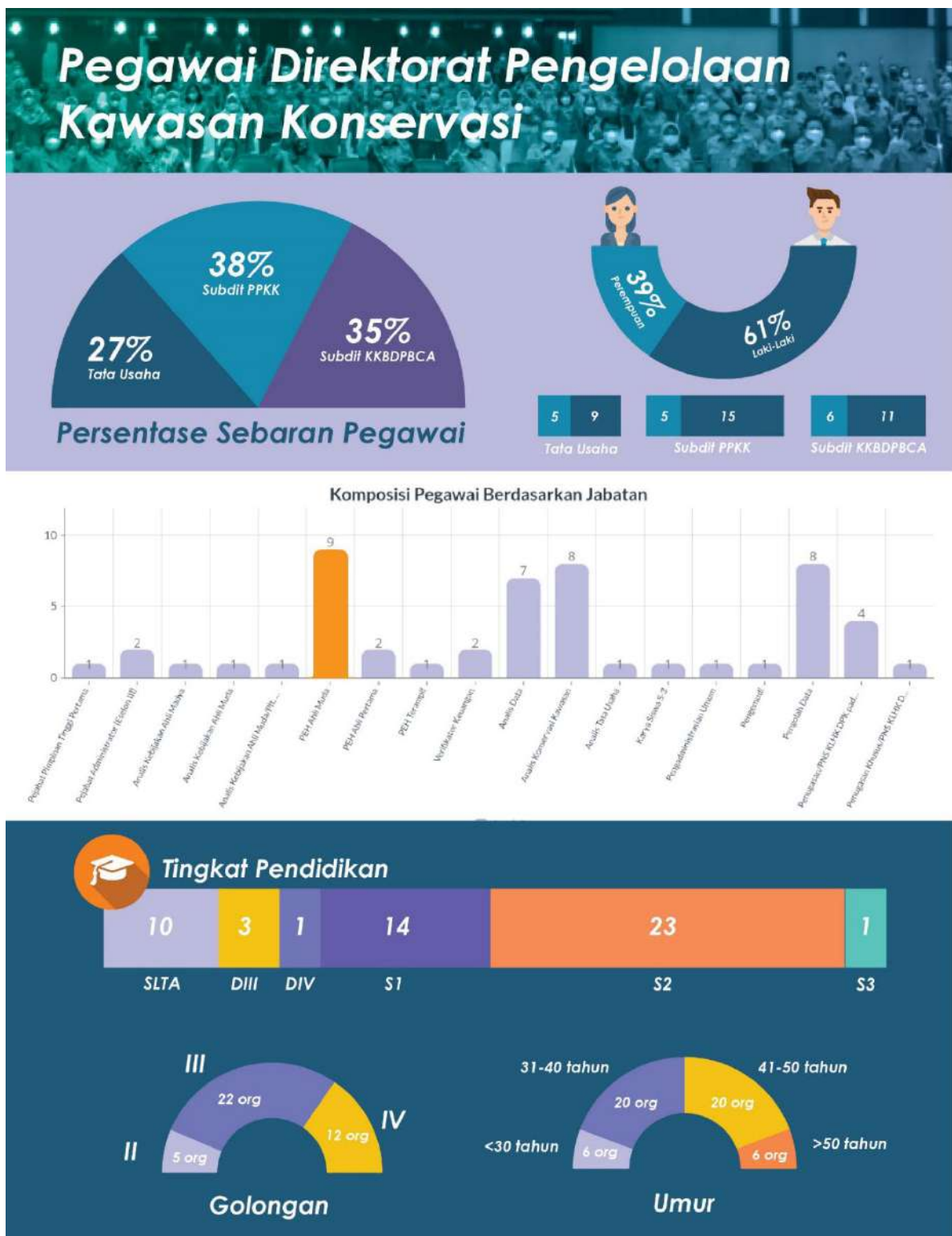


Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi didukung oleh 53 pegawai terdiri dari 39 orang ASN dan 14 orang PPNPN yang tersebar di setiap Sub Direktorat dan Subbagian tata usaha, serta 5 orang dalam penugasan ke BRGM dan BCCPGLE.

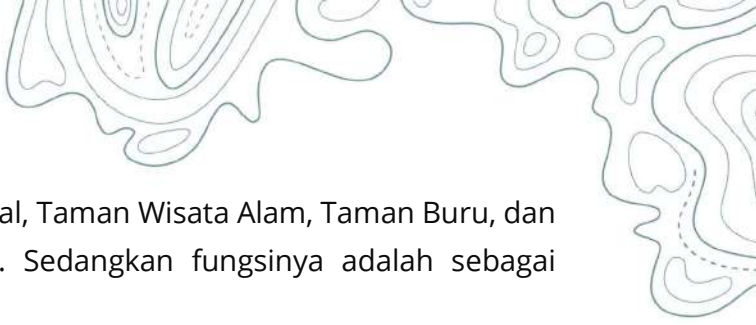
Komposisi pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha, Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sub Direktorat Kemitraan Konservasi, Bina Desa Penyangga, & Bina Cinta Alam mengakomodir peran *gender* secara seimbang dengan total perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan dalam skala 100 adalah 61:39.

Berdasarkan jenis jabatan, paling banyak yaitu Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda sebanyak 9 orang, diikuti oleh Analis Konservasi Kawasan dan pengolah data masing-masing sebanyak 8 orang. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai paling banyak adalah Strata 2 dengan jumlah 23 orang, sedangkan paling sedikit adalah Strata 3 dan Diploma-IV masing-masing 1 orang. Sebaran pegawai berdasarkan kategorinya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Sebaran Pegawai Dit. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tugas dan fungsi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Kawasan

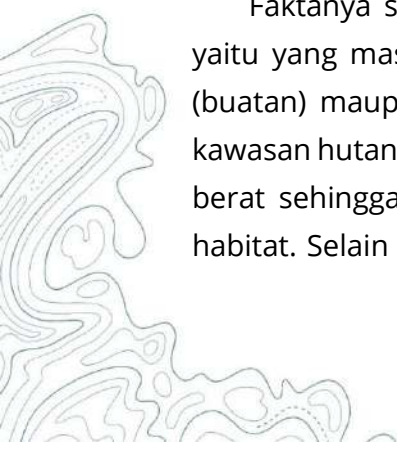


Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Buru, dan pembinaan pengelolaan Taman Hutan Raya. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

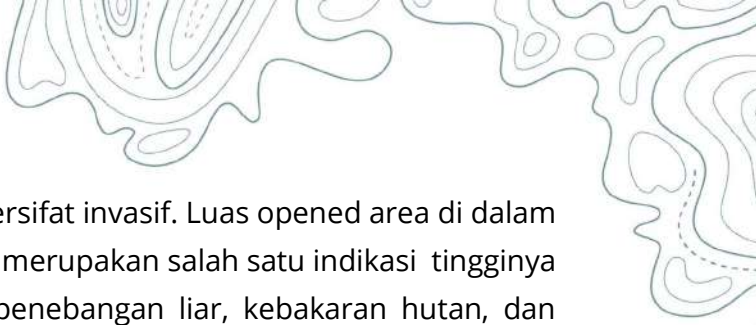
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Dan Taman Buru;
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, bina daerah penyangga, bina cinta alam, dan evaluasi pengelolaan pada kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

C. ISU STRATEGIS TAHUN 2022

1. Tingginya tekanan terhadap kawasan konservasi



Faktanya saat ini kawasan konservasi dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kondisi yaitu yang masih bervegetasi dan yang telah terbuka, baik karena aktivitas manusia (buatan) maupun alami (contoh padang rumput/savanna di Baluran). Seperti halnya kawasan hutan lainnya, saat ini kawasan konservasi juga mengalami tekanan yang cukup berat sehingga menyebabkan terjadinya degradasi terhadap fungsi dan fragmentasi habitat. Selain itu, terdapat pula kerusakan yang terjadi karena perubahan vegetasi di



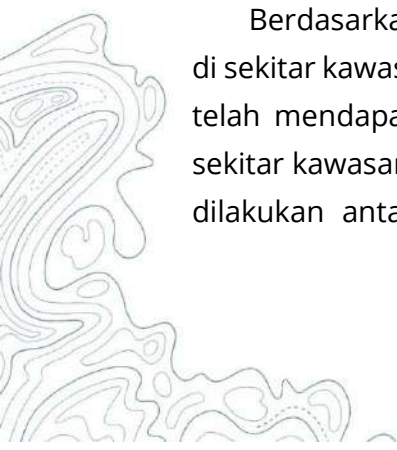
akibat pertumbuhan jenis-jenis eksotik yang bersifat invasif. Luas opened area di dalam kawasan konservasi (mencapai 1,8 juta hektar) merupakan salah satu indikasi tingginya tekanan tersebut baik karena perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan penambangan tanpa izin (PETI). Kedepan salah satu target yang akan dipenuhi adalah melakukan penanganan terhadap opened area tersebut berdasarkan kondisi dan kriteria yang ditetapkan, misalnya melalui kegiatan penanaman kembali dalam rangka pemulihan ekosistem, membangun kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan lain-lain.

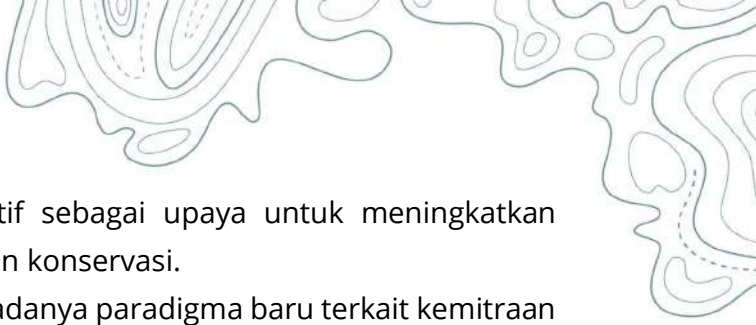
2. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

Kawasan konservasi yang ada di Indonesia, belum semuanya dikelola dengan efektif, karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Jumlah atau luas kawasan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM khususnya petugas di lapangan, dan aksesibilitas kawasan yang sulit dijangkau, menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Hal lain yang penting dan berpengaruh terhadap pengelolaan adalah status Kawasan. Beberapa kawasan konservasi belum memiliki unit pengelola yang jelas sesuai dengan arahan fungsinya, misalnya taman nasional baru yang seharusnya dikelola oleh Balai Taman Nasional, namun masih dikelola oleh UPT Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Persoalan lain dalam pengelolaan kawasan adalah status kawasan konservasi belum seluruhnya ditetapkan/dikukuhkan, hanya sebatas penunjukan, belum seluruh kawasan memiliki dokumen penataan blok/zona dan dokumen perencanaan sebagai dasar/acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan di lapangan, batas di lapangan yang tidak jelas, dan/atau belum ditata batas sama sekali, bahkan beberapa diantaranya belum jelas statusnya, karena hanya disebutkan sebagai KSA/KPA sehingga belum jelas arahan pengelolaannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kawasan konservasi kurang memiliki legalitas, rawan konflik, dan sulit dilakukan pengelolaan yang efektif. Faktor lain yang berkontribusi pada efektivitas pengelolaan adalah ketersediaan anggaran, anggaran tidak spesifik digunakan untuk pengelolaan kawasan pada balai yang mengelola banyak kawasan konservasi, bahkan terdapat kawasan yang dikelola dengan anggaran Rp. 0,-. Kondisi ini menyebabkan kawasan konservasi tidak dapat dikelola secara optimal, dan menurunkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

3. Keberadaan Desa di dalam dan sekitar Kawasan konservasi

Berdasarkan data terakhir tercatat sebanyak 7.043 desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Dari jumlah tersebut terdapat setidaknya 1.525 desa yang telah mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan konservasi. Berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan antara lain pemberian akses pemanfaatan di zona/blok tradisional dan





pemberian bantuan usaha ekonomi produktif sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar kawasan konservasi.

Isu strategis yang dihadapi saat ini adalah adanya paradigma baru terkait kemitraan konservasi pasca terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang UUCK, yang mengamanatkan penyelesaian keterlanjuran di dalam kawasan konservasi melalui skema kerja sama kemitraan konservasi. Sebelum terbitnya UUCK, kerja sama kemitraan konservasi mencakup kerja sama pemberian akses pemanfaatan potensi kawasan pada zona/blok tradisional dan kerja sama dalam rangka pemulihan ekosistem. Perubahan paradigma kemitraan konservasi mengakibatkan pemanfaatan kawasan oleh masyarakat setempat dalam bentuk kebun/lahan garapan harus melalui *clearence* dari tim Satlakwasdal untuk mendapatkan persetujuan kerja sama dengan pengelola kawasan.

Isu strategis lainnya adalah perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum terintegrasi dengan pemerintah daerah setempat. Perencanaan yang terintegrasi memudahkan dalam mengisi gap-gap yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk untuk mendapatkan jejaring kerja dengan mitra lainnya.

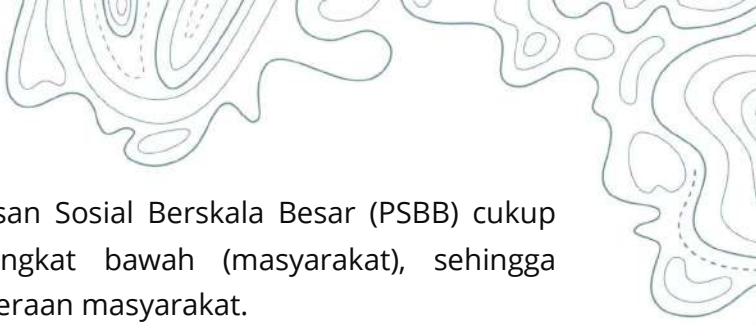
Selain hal tersebut di atas, masih banyak desa yang belum mendapatkan pendampingan dengan berbagai kondisi di lapangan antara lain dari aspek geografis belum terjangkau, akses yang sulit dan mahal untuk menjangkau desa yang menjadi desa penyangga kawasan konservasi. Kondisi lainnya adalah belum adanya kesepakatan dan kesepahaman baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat berkaitan dengan konflik yang ada di desa tersebut. Kondisi konflik tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan. Meskipun demikian, kegiatan pendampingan untuk menjalin komunikasi tetap diupayakan dilakukan.

4. Perlindungan hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan.

Gangguan terhadap kawasan konservasi masih sering terjadi, sehingga membutuhkan penanganan yang baik. Kegiatan perlindungan terhadap kawasan masih sangat perlu ditingkatkan, apalagi luas kawasan yang harus dikelola cukup besar, dengan berbagai tingkat kerawanan, termasuk terhadap upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

D. KAITAN PASCA PANDEMI COVID-19

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global masih cukup dirasakan sejak dimulai pada awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2022. Walaupun Indonesia cukup mampu bertahan dan memiliki pertumbuhan positif yang lebih baik dengan mayoritas negara-negara di Dunia, namun dampak penurunan laju perekonomian pada level masyarakat cukup besar dirasakan, dengan kenaikan harga pangan, bahan bakar dan barang konsumsi lainnya, sedangkan tingkat pendapat mengalami penurunan akibat pelambatan laju perekonomian karena pandemi COVID-



19. Kebijakan *social distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cukup mempengaruhi aktivitas ekonomi pada tingkat bawah (masyarakat), sehingga menurunkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Prediksi ekonomi global menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kemampuan ekonomi yang cukup kuat untuk menahan tekanan akibat pandemi COVID-19, sehingga kita optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerja sama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat telah mengambil sejumlah kebijakan pemulihan ekonomi yang bersifat holistik. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan, yaitu: peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter.

Dunia sudah memasuki tahun ketiga kehidupan di bawah era normal baru. Era di mana masyarakat global harus menghadapi dampak multidimensi dari pandemi COVID-19. Tidak hanya mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian orang-orang di mana saja, tetapi pandemi juga telah menghambat upaya dan membatalkan banyak hal yang telah dicapai dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Dengan memprioritaskan kegiatan dan mengikuti langkah-langkah korektif, Indonesia telah berhasil mempertahankan upaya untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan, sambil memitigasi pandemi COVID-19 dan pulih dari dampak sosial ekonominya.

KLHK sebagai kementerian dengan peran yang sangat besar dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai tanggung jawab sesuai kewenangannya dalam mendukung program Pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dengan mendayagunakan kawasan hutan serta fungsi yang disandangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sejumlah agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilaksanakan oleh KLHK sejak tahun 2020, antara lain: padat karya penanaman mangrove, padat karya pangan dan hutan sosial, *food estate*, padat karya produktif sampah dan penyangga wisata konservasi.

Direktorat PKK juga memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berkontribusi terhadap implementasi Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024, yaitu: Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan target 4.500 desa di sekitar kawasan konservasi. Kedua IKK



dimaksud adalah: (1) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dengan target 2.500 desa; serta (2) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi, dengan target 400.000 ha. Target tahun 2022 adalah 500 desa untuk pendampingan serta 90.000 ha untuk luas akses. Pihak yang sangat berperan penting dalam pencapaian IKK ini adalah Unit Pelaksana Tugas (UPT) Ditjen KSDAE baik UPT Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan UPT Taman Nasional (TN) maupun UPT Daerah selaku pengelola kawasan konservasi Taman Hutan Raya.

Kegiatan-kegiatan ini diharapkan memberikan dukungan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sebagai salah satu upaya mitigasi dampak pandemi COVID-19 melalui pendampingan masyarakat, utamanya dalam pengembangan usaha produktif masyarakat dengan dukungan bantuan usaha serta peningkatan kapasitas usaha. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pemberian akses sumber daya hutan pada kawasan konservasi, khususnya terkait hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau dijual sebagai komoditas ekonomi.

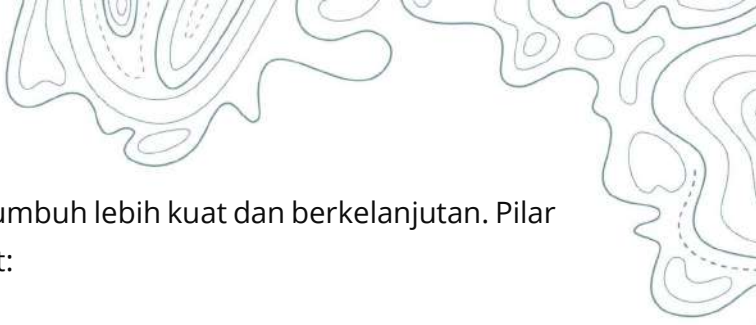
PRESIDENSI G-20

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF, serta berbagai *development banks* utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial.

Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, Injeksi penanganan Covid-19 sebanyak >5 triliun USD (*Riyadh Declaration*), penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, *hand sanitizer*, desinfektan, alat medis dan obat-obatan. Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada *Paris Agreement on Climate Change* di 2015, dan *The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Tema Presidensi G20 Indonesia 2022 adalah "*Recover Together, Recover Stronger*". Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu,



saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Pilar Presidensi G20 Indonesia 2022 sebagai berikut:

- a. Memperkuat lingkungan kemitraan.
- b. Mendorong produktivitas.
- c. Meningkatkan ketahanan dan stabilitas.
- d. Memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.
- e. Kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.

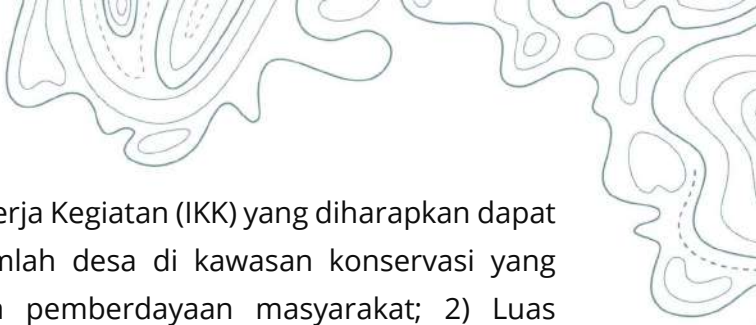
Presidensi G20 yang dipangku Indonesia di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Hal ini juga merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi (+ 20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.

Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Presidensi ini menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20.

Pelaksanaan target-target kerja KLHK sebagai bagian dari Pemerintah merupakan kontribusi KLHK dalam mendukung presidensi G-20, baik melalui program-program teknis sesuai tugas dan fungsi KLHK maupun program-program peningkatan resiliensi ekonomi khususnya pada tingkat masyarakat, seperti perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi serta pemulihan ekosistem untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan.

D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2022

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai penanggung jawab kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi bertanggungjawab terhadap Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dengan sasaran program dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. Dari sasaran program tersebut di atas, diperinci menjadi dua sasaran kegiatan yaitu: 1) Terjaminnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi; 2) Terjaminnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.



Kemudian diperinci dengan tujuh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024, yaitu: 1) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat; 2) Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi; 3) Jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya bina cinta alam; 4) Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya; 5) Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi; 6) Jumlah kawasan Konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya; 7) Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran.

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut di atas menjadi materi perjanjian kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Adapun pada tahun 2022, terdapat 4 IKK yang memiliki target capaian, sedangkan 3 IKK baru ada target capaiannya mulai tahun 2023. Keempat IKK yang menjadi materi perjanjian kinerja tersebut beserta targetnya adalah sebagai berikut:

IKK 1. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (target 500 desa);

IKK 2. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (target 90.000 ha);

IKK 3. Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (target 180.000 ha);

IKK 4. Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya (target 277 Unit kawasan konservasi).



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 15 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Di dalam Peraturan Dirjen KSDAE No. P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2022, Direktorat Jenderal KSDAE diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumber daya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung tujuan pembangunan KLHK yaitu:

“Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim, Aktualisasi Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup, Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan dan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima”

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi
3. Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan
4. Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari
5. Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
6. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; dan
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber.

Untuk mendukung tujuan pembangunan KLHK tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan Visi sebagai berikut:

“Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk Kesejahteraan Masyarakat yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat dalam mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Misi Direktorat Jenderal KSDAE:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas untuk perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan dari tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan Kawasan konservasi.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola Kawasan Konservasi baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola Kawasan konservasi yang baik dan efektif.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara dari Kawasan Konservasi;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
4. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
5. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Ekosistem Esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi; dan
7. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Terdapat Tiga (3) Program di dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Program dan Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

Program	Kegiatan
1. Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen KSDAE
2. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Perencanaan Kawasan Konservasi 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 5. Pemulihan Ekosistem
3. Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai 7 (tujuh) sasaran program dengan penanggungjawab masing-masing sasaran berada di bawah Eselon II Lingkup Ditjen KSDAE. Ketujuh sasaran program dan indikatornya serta target selama periode Renstra disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator	Target s/d 2024
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi	Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	70 juta hektar
2	Meningkatnya sumbangan PDB sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi	Nilai Ekspor TSL dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Konservasi	12 Triliun Rupiah
3	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	10,5 Triliun Rupiah
4	Meningkatnya PNBPN dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari,	Jumlah Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	1.100 Milyar Rupiah
5	Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Desa yang Mendapatkan Akses Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4.500 Desa
6	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial;	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	43 juta hektar
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin

Sebagai salah satu Eselon II pada Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi mendukung program “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”, dengan sasaran program “Meningkatnya Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi” dengan target kumulatif sampai akhir tahun 2024 sebanyak 4.500 Desa melalui pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Tahunan				
2020 - 2024			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Jumlah desa di kawasan	Target (2.500 Desa)	500	500	500	500	500

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Tahunan				
2020 - 2024			2020	2021	2022	2023	2024
	konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat						
IKK 2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Target (400.000 Ha)	50.000	90.000	90.000	90.000	80.000
IKK 3	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	Target (400 orang)	-	-	-	200	200
IKK 4	Unit Kemitraan Konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	Target (1.000 kelompok masyarakat)	-	-	-	500	500
IKK 5	Luas penanganan Konflik Tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	Target (800.000 Ha)	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
IKK 6	Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya	Target (554 Unit KK)	132	277	277	277	277
IKK 7	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan perlindungan pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan		-	-	-	560	560

B. RENCANA KERJA TAHUN 2022

Pada awal tahun 2022 Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi telah menetapkan target kegiatan yang hendak di capai sebagai bentuk perjanjian kinerja. Namun seiring dengan adanya Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024, maka secara

langsung juga berimplikasi pada Revisi Renstra Eselon I dan II di bawahnya, termasuk pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Perubahan yang dimaksud juga terkait IKK dan target capaian setiap tahun. Oleh karena itu pada bulan Desember tahun 2022 telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja menyesuaikan perubahan Renstra 2020-2024 baik dalam hal nomenklatur IKK, target maupun alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 4. Perubahan Perjanjian Kinerja Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022

NO	PENETAPAN KINERJA (AWAL)			PENETAPAN KINERJA 2022 (REVISI)		
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	500 Desa	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	500 Desa
		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	90.000 Hektar		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	90.000 Hektar
2	Meningkatnya penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	440.000 Hektar	Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	180.000 Hektar
3	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	277 Unit KK		Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	277 Unit KK
4	Anggaran	Rp. 16.152.983.000,-		Anggaran	Rp. 20.065.991.000,-	

Target kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah sebagai berikut:

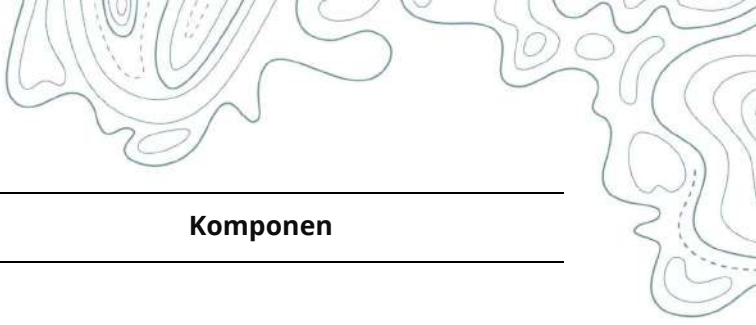
Tabel 5. Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi 2022

Kegiatan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	
Sasaran Kegiatan 1	Terjaminnya Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi	
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah desa di Kawasan Konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	500 desa
	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di Kawasan Konservasi melalui kemitraan konservasi	90.000 hektar
Output	1. Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi 2. Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	
Sasaran Kegiatan 2	Terjaminnya peningkatan efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	
Indikator Kinerja Kegiatan	Luas penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	180.000 hektar
	Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya	277 unit KK
Output	1. Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di kawasan konservasi yang ditangani 2. Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. HLN Biodiversity Leuser	
Anggaran	Pusat : Rp. 20.065.991.000,-	

Sedangkan output dan Komponen dalam Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rencana Kerja tahun 2022 berdasarkan Rincian output dan Komponen

Rincian Output		Komponen
Kebijakan penanganan Konflik Tenurial di Kawasan konservasi (Rekomendasi Kebijakan)	1	Penyusunan Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial
Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi (Rekomendasi Kebijakan)	1	Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK
	2	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK



Rincian Output	Komponen
Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi (Rekomendasi Kebijakan)	1 Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi 2 Pemberian akses kelola kepada masyarakat
Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Rekomendasi Kebijakan)	1 Pemantauan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi 2 Penilaian efektivitas kawasan konservasi 3 Perlindungan dan pengamanan Kawasan konservasi 4 Pengendalian kebakaran hutan
HLN Biodiversity Leuser (Kegiatan)	1 HLN Biodiversity Leuser

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi selain oleh Pusat dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan alokasi anggaran Rp.20.065.991.000,- juga dilaksanakan oleh UPT Ditjen KSDAE dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.477.626.000,- sehingga total anggaran untuk pencapaian IKK pengelolaan kawasan konservasi adalah sebesar Rp. 230.543.617.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja tahun 2022 berdasarkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah 109,47%. IKK 1. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapat pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan target 500 desa terealisasi 541 desa atau 108,20%. IKK 2. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi ditargetkan 90.000 hektar terealisasi 70.750,36 hektar atau 78,61%. IKK 3. Luas Penanganan Konflik Tenurial di kawasan konservasi yang ditangani ditargetkan 180.000 hektar terealisasi 283.963,79 Hektar atau 150%. Sedangkan IKK 4. Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya ditargetkan 277 Unit KK terealisasi 280 Unit KK atau 101,08%. Secara umum target yang ditetapkan dapat dicapai, hanya satu IKK yang capaiannya di bawah 100% yaitu pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat melalui kemitraan konservasi. Secara lengkap capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawan konservasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan kawasan Konservasi tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
IKK 1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Target	500 desa	109,47%
		Capaian	541 desa	
IKK 2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Target	90.000 hektar	
		Capaian	70.750,36 hektar	
IKK 3	Luas penanganan Konflik Tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	Target	180.000 hektar	101,08%
		Capaian	283.963,79 hektar	
IKK 4	Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya	Target	277 Unit KK	
		Capaian	280 Unit KK	



Gambar 3. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022

Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun sampai dengan tahun 2022 berdasarkan target kinerja tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Tahunan				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Target	500	500	500	500	500
		Capaian	515 (103,00%)	469 (93,80%)	541 (108,20%)	-	-
IKK 2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Target	50.000	90.000	90.000	90.000	80.000
		Capaian	63.396,62 (126,79%)	47.826,21 (53,14)	70.750,36 (78,61%)	-	-
IKK 3	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	Target	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		Capaian	3.670,17 (4,59%)	50.140,81 (27,86%)	283.963,79 (150%)		
IKK4	Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya	Target	132	277	277	277	277
		Capaian	129 (97,73%)	285 (102,89)	280 (101,08%)	-	-
Rata-Rata Capaian			83,03%	69,42%	109,47%		

Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022 berdasarkan target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Target	500	1.000	1.500	2.000	2.500
		Capaian	515 (20,60%)	984 (39,36%)	1.525 (61,00%)	-	-
IKK 2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Target	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000
		Capaian	63.396,62 (15,85%)	111.222,83 (27,81)	181.973,19 (45,49%)	-	-
IKK 3	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani	Target	80.000	260.000	440.000	620.000	800.000
		Capaian	3.670,17 (0,46%)	53.810,98 (6,73%)	337.774,77 (42,22%)		
IKK4	Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya	Target	132	277	277	277	277
		Capaian	129 (97,72%)	285 (102,89)	280 (101,08%)	-	-

IKK 1

JUMLAH DESA DI KAWASAN KONSERVASI
YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN



Penyusunan NSPK



Bimbingan Teknis



MonEv



Apresiasi

Target dan Capaian Kinerja Tahunan

	Target	Capaian		Capaian Kinerja
2020	500	515 (103,00%)	Pendanaan	108,20%
2021	500	469 (93,80%)	Rp 743.232.000	Realisasi Anggaran
2022	500	541 (108,20%)	Realisasi	99,05%
2023	500	-	Rp 736.197.332	
2024	500	-		

Capaian Kumulatif

1.525 desa

dari 2.500 desa

(61,00%)

Manfaat Kesepakatan Konservasi



Membangun tanggungjawab moral dalam pelestarian kawasan



Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terkait konservasi alam



Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pendampingan

Faktor Pendukung

Koordinasi yang baik

Pemberian akses bagi masyarakat oleh UPT

Pendampingan intensif yang dilakukan UPT

Peran mitra pengelola kawasan

Kendala

Refocusing anggaran

Perubahan pada personil pemerintahan desa

konflik agraria/ konflik tenurial pada lokasi target

Kondisi yang tidak kondusif pada lokasi target

Upaya Perbaikan

Pendampingan intensif oleh UPT terhadap target pemberdayaan masyarakat

Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan pendampingan

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa serta instansi terkait

IKK 1. JUMLAH DESA DI KAWASAN KONSERVASI YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat” dicapai dengan kegiatan pada Direktorat Pengelolaan KK dan UPT KSDAE. Direktorat Pengelolaan KK melakukan kegiatan Penyusunan NSPK, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, dan apresiasi terhadap kepedulian masyarakat kepada kawasan konservasi dengan dukungan pendanaan sebesar Rp 743.232.000,- dan terealisasi Rp 736.197.332,- atau sebesar 99,05%. UPT Ditjen KSDAE melakukan kegiatan: pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi, pendampingan masyarakat sekitar kawasan konservasi, dan pengembangan ekonomi kelompok masyarakat mulai dari pemberian bantuan sebagai modal usaha kelompok sampai dengan fasilitasi pemasaran terhadap hasil usaha kelompok binaan dengan dukungan pendanaan sebesar Rp 49.104.226.000,- dan terealisasi Rp 48.225.467.731,- atau sebesar 98,21%.

Tabel 10. Capaian Kinerja Tahunan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Tahunan				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Target	500	500	500	500	500
		Capaian	515 (103,00%)	469 (93,80%)	541 (108,20%)	-	-

Apabila kita bandingkan antara capaian 2022 dengan capaian tahun 2021 terdapat peningkatan capaian sebesar 72 desa atau 15,35% dari capaian sebelumnya.

Tabel 11. Capaian Kinerja Kumulatif Berdasarkan Renstra 2020-2024

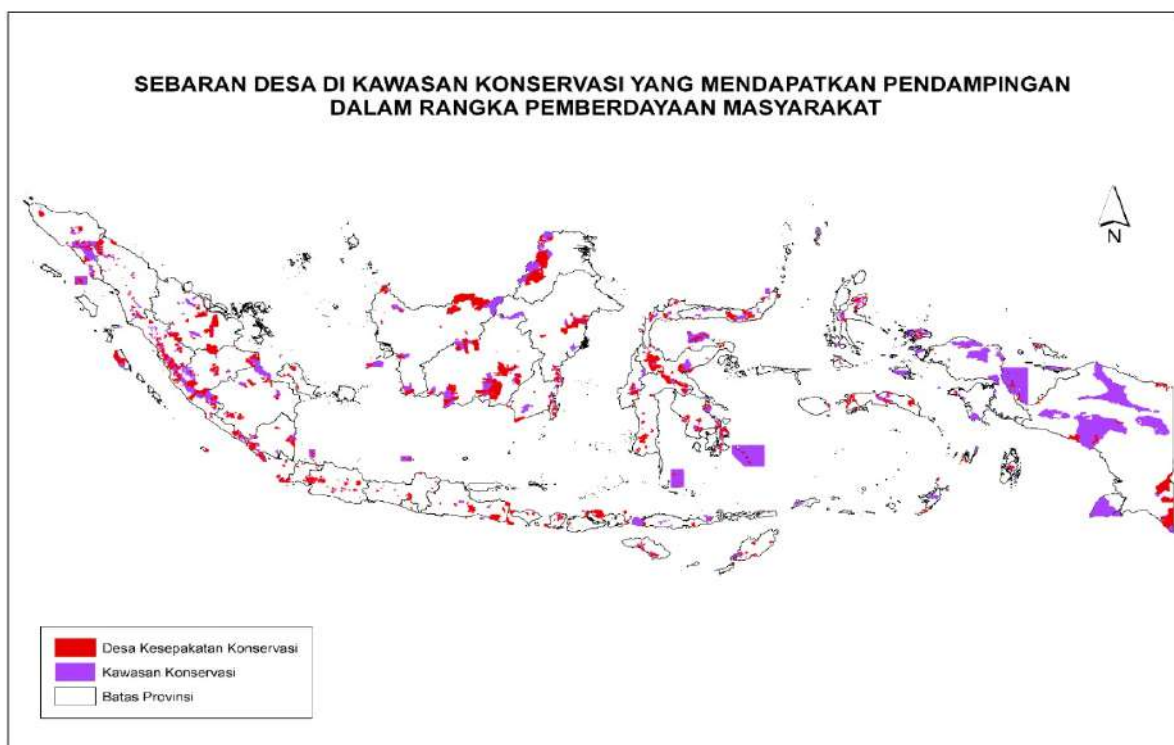
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang	Target	500	1.000	1.500	2.000	2.500

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Capaian 515 (20,60%)	984 (39,36%)	1.525 (61,00%)	-	-

Capaian kumulatif IKK 1 sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target renstra 2020-2024 adalah sebesar 61,00% (1.525 dari 2.500 desa).

ANALISIS CAPAIAN

Capaian IKK Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat diukur dari ketercapaian kesepakatan konservasi antara Kepala UPT dengan Kepala Desa sekitar Kawasan Konservasi. Pada tahun 2022 terdapat realisasi sebanyak 541 desa yang telah melakukan kesepakatan konservasi atau mencapai 108,20% dari target tahunan. Secara kumulatif capaian dari tahun 2020-2022 adalah 1.525 desa atau mencapai 61,00% dari target renstra tahun 2020-2024. Kesepakatan konservasi yang dicapai sampai dengan tahun 2022 berada pada 1.525 desa, 758 kecamatan, 274 kabupaten, 34 provinsi, dan sekitar 341 kawasan konservasi pada 74 UPT.



Gambar 4. Sebaran Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan



Dalam mencapai target jumlah desa di Kawasan Konservasi yang mendapatkan Pendampingan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat, terdapat faktor-faktor pendukung dan kendala antara lain:

Faktor pendukung pencapaian target:

1. koordinasi yang baik serta dukungan pemerintah desa;
2. adanya pemberian akses bagi masyarakat oleh UPT;
3. upaya pendampingan intensif yang dilakukan UPT; serta
4. peran mitra pengelola kawasan (LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, swasta, dan proyek-proyek kerja sama).

Kendala pencapaian target :

1. *refocusing* anggaran yang berpengaruh terhadap alokasi anggaran dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. perubahan pada personil pemerintahan desa (terutama pergantian kepala desa) di tengah proses kesepakatan konservasi;
3. Masih adanya konflik agraria/ konflik tenurial pada lokasi target sehingga kepala desa belum bersedia menandatangani kesepakatan konservasi;
4. Kondisi yang tidak kondusif pada lokasi target, sehingga belum dapat dilakukan penandatanganan kesepakatan konservasi.

Berdasarkan kendala-kendala dalam pencapaian target tersebut dilakukan upaya perbaikan/ peningkatan ke depan sebagai berikut:

1. Pendampingan intensif oleh UPT terhadap target pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi.
2. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa serta instansi terkait.

Beberapa kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang termuat dalam kesepakatan konservasi antara lain: fasilitasi pembentukan, pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif, fasilitasi pemberian akses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas, pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk melakukan pengamanan dan perlindungan kawasan.

Manfaat adanya kesepakatan konservasi:

1. Membangun tanggung jawab moral para pihak dalam rangka mendorong kelestarian kawasan konservasi dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya koordinasi yang baik antara pengelola kawasan, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat.

2. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terkait konservasi alam.
3. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui pendampingan yang dilakukan oleh pengelola kawasan bersama mitra.



Gambar 5. Kunjungan lapangan di desa binaan BTN Gunung Rinjani (dok: Amelia)



Gambar 6. Pemberdayaan masyarakat Perempuan SAD (dok: BTNBD)



Gambar 7. Pemberian Apresiasi Desa Binaan Konservasi dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2022

Penilaian kelompok calon penerima apresiasi dilakukan terhadap 36 (tiga puluh enam) kelompok masyarakat binaan UPT lingkup KSDAE. Berikut merupakan 10 kelompok masyarakat beserta pendampingnya yang terpilih sebagai penerima apresiasi desa binaan konservasi tahun 2022. Daftar ini disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.163/KSDAE/SET.3/KOTL/PEG.7/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022.



Gambar 8. Penyerahan Apresiasi Desa Binaan Konservasi pada Puncak Peringatan HKAN 2022 di Taman Nasional Bali Barat (dok. Amelia)

- 
- 1** **Kelompok SPKP Wana Jaya Lestari (binaan Balai TN Meru Betiri)**
Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi
Pendamping : Akhmad Agus Hidayat
 - 2** **Kelompok Tunak Besopoq (binaan Balai KSDA Nusa Tenggara Barat)**
Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
Pendamping : Lalu Gede Gangga Widarma
 - 3** **Gapoktan Patanyamang (binaan Balai TN Bantimurung Bulusaraung)**
Kecamatan Camba, Kabupaten Maros
Pendamping : Fahmiady Arsyad
 - 4** **KMPH Sadar Lestari (binaan Balai TN Gunung Rinjani)**
Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur
Pendamping : Maria Imaculata Wonga dan Supriyanto
 - 5** **Smiling Coral Indonesia (binaan Balai TN Kepulauan Seribu)**
Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kep. Seribu, Kabupaten Adm Kep. Seribu
Pendamping : Devi Alamsyah, S.Hut
 - 6** **Kelompok Tani Hutan Sodong Makmur (binaan Balai KSDA Yogyakarta)**
Desa Karangasem, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul
Pendamping : Siti Rohimah, SP
 - 7** **Kelompok Tani Hutan Hulun Hyang (binaan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru)**
Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan
Pendamping : Birama Terang Raditya, S.Hut
 - 8** **Kelompok Rumah Belajar Anak Cerdas (binaan Balai TN Bali Barat)**
Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
Pendamping : Nana Rukmana
 - 9** **Kelompok Tani Hutan Karya Jaya (binaan Balai Besar TN Kerinci Seblat)**
Desa Giri Mulyo, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci
Pendamping : Abriadi
 - 10** **Kelompok Samben Jaya Landak (binaan Balai KSDA Kalimantan Barat)**
Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak
Pendamping : Ardiansyah

Gambar 9. Daftar penerima apresiasi Desa Binaan Konservasi tahun 2022



Gambar 10. ToT Fasilitasi Tingkat Lanjut untuk Pendamping Desa Sekitar KK (dok. Amelia)

Tabel 12. Peserta ToT Fasilitasi Tingkat Lanjut

Berdasarkan UPT	Berdasarkan Gender	Berdasarkan Jabatan
KSDA = 21 UPT	Perempuan = 30 orang	Penyuluh kehutanan = 52
TN = 41 UPT	Laki-laki = 34 orang	PEH = 8
Tahura = 2 UPT		Polisi kehutanan = 2
		Lainnya = 2



Gambar 11. Kerja sama multipihak yang menyelenggarakan ToT Fasilitasi Tingkat Lanjut

IKK 2

LUAS PEMBERIAN AKSES PEMANFAATAN TRADISIONAL KEPADA MASYARAKAT DI KAWASAN KONSERVASI MELALUI KEMITRAAN KONSERVASI

KEGIATAN



Penyusunan NSPK



Bimbingan Teknis



Supervisi dan Verifikasi



MonEv

Target dan Capaian Kinerja Tahunan

Target (Ha)

Capaian (Ha)

2020	50.000	63.396,62 (103,00%)
2021	90.000	47.826,21 (53,14%)
2022	90.000	70.750,36 (78,61%)
2023	90.000	-
2024	80.000	-

Pendanaan

Rp 683.070.000

Realisasi

Rp 676.262.450

Capaian Kinerja

78,61%

Realisasi Anggaran

99,00%

Capaian Kumulatif

181.972,19 ha

dari 400.000 desa

(45,49%)

Jenis Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional



Budidaya Tradisional
93,64 Ha



Hasil Hutan Bukan Kayu
8.173,64 Ha



Budidaya Tradisional, Hasil Hutan Bukan Kayu
187,71 Ha



Perairan
62.295,37 Ha

Tantangan

Kemitraan Konservasi pasca UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan sesuai mandat pada PP 24 Tahun 2021

Pemanfaatan potensi kawasan konservasi yang masih menyesuaikan dengan Perdirjen P.6 Tahun 2018.

Perlunya mendapatkan persetujuan/-clearance sesuai ketentuan yang baru

Upaya Perbaikan

Proses verifikasi lebih ketat

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis, Ditjen Lingkup KLHK, dan K/L lain.

pendataan/inventarisasi potensi yang dimanfaatkan

Sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan monitoring terhadap proses-proses pengusulan kerja sama pemberian akses

Penyempurnaan NSPK

IKK 2. LUAS PEMBERIAN AKSES PEMANFAATAN TRADISIONAL KEPADA MASYARAKAT DI KAWASAN KONSERVASI MELALUI KEMITRAAN KONSERVASI

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional kepada Masyarakat di Kawasan Konservasi melalui Kemitraan Konservasi” dicapai dengan kegiatan Direktorat Pengelolaan KK dan UPT KSDAE. Direktorat Pengelolaan KK melakukan kegiatan Penyusunan NSPK, Bimbingan Teknis, Supervisi dan Verifikasi Kemitraan Konservasi, Monitoring dan Evaluasi dengan dukungan pendanaan sebesar Rp 683.070.000,- dan realisasi Rp 676.263.450,- atau sebesar 99,00%. UPT Ditjen KSDAE melakukan kegiatan: identifikasi potensi HHBK dan masyarakat, verifikasi subjek dan obyek permohonan kemitraan konservasi, permohonan persetujuan kemitraan konservasi, dan pendampingan kelompok masyarakat dengan dukungan pendanaan sebesar Rp 20.154.690.000,- realisasi Rp 19.083.806.211,- atau sebesar 94,69%.

Tabel 13. Capaian Kinerja Tahunan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Tahunan				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	Target	50.000	90.000	90.000	90.000	80.000
		Capaian	63.396,62 (126,79%)	47.826,21 (53,14%)	70.750,36 (78,61%)	-	-

Apabila dibandingkan antara capaian 2022 dengan capaian tahun 2021 terdapat peningkatan capaian sebesar 22.924,15 hektar atau 47,93% dari capaian sebelumnya.

Tabel 14. Capaian Kinerja Kumulatif berdasarkan Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target dan Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024					
		2020	2021		2022	2023	2024
IKK 2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui	Target	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000
		Capaian	63.396,62 (15,85%)	111.222,83 (27,81)	181.973,19 (45,49%)	-	-

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target dan Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
kemitraan konservasi					

Capaian kumulatif IKK 2 sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target renstra 2020-2024 sebesar 45,49% (181.972,19 ha dari 400.000 ha).

ANALISIS CAPAIAN

Capaian IKK Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di Kawasan Konservasi melalui kemitraan konservasi diukur dari ketercapaian kemitraan konservasi antara Kepala UPT dengan Kelompok masyarakat sekitar Kawasan Konservasi. Pada tahun 2022 terdapat realisasi seluas 70.750,36 Ha atau mencapai 78,61% dari target tahunan. Secara kumulatif capaian dari tahun 2020-2022 adalah 181.973,19 hektar atau mencapai 45,49% dari target renstra tahun 2020-2024. Pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di Kawasan Konservasi melalui kemitraan konservasi yang dicapai sampai dengan tahun 2022 berada pada 237 desa, 138 kecamatan, 70 kabupaten, 26 provinsi, dan sekitar 51 Kawasan Konservasi pada 41 UPT dengan melibatkan 297 kelompok masyarakat dan 8.655 kepala keluarga.

Pada tahun 2022 terdapat akses pemanfaatan tradisional seluas 70.750,36 Ha dengan 4 jenis akses pemanfaatan yang diberikan kepada kelompok masyarakat berupa: pemungutan HHBK, budidaya tradisional, pemanfaatan sumber daya perairan dan perburuan tradisional. Pada tahun 2022 terdapat akses pemanfaatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Akses pemanfaatan tradisional pada tahun 2022 berdasarkan jenis aksesnya

Jenis Akses	UPT	Desa	Kec	Kab	Prov	Mitra	Anggota	Luas (Ha)
Budidaya Tradisional	3	3	3	3	3	3	64	93,64
HHBK	10	28	18	13	44	44	1171	8.173,64
HHBK, Budidaya Tradisional	3	6	5	3	6	6	156	187,71
Perairan	10	35	21	14	41	41	819	62.295,37
Grand Total	22	72	47	30	94	94	2210	70.750,36

Tabel 12. Akses pemanfaatan tradisional pada tahun 2022 berdasarkan fungsi kawasannya

Fungsi KK	UPT	Desa	Kec	Kab	Prov	Mitra	Anggota	Luas (Ha)
Taman Hutan Raya	1	3	2	1	17	17	506	658,84
Taman Nasional	18	59	40	25	66	66	1509	32.555,30
Taman Wisata Alam	3	8	3	3	9	9	156	36.036,22
Taman Wisata Alam Laut	1	2	2	1	2	2	39	1.500,00
Grand Total	22	72	47	30	94	94	2210	70.750,36

Berdasarkan data pelayanan terhadap permohonan persetujuan pemberian akses pemanfaatan di zona/blok tradisional di tahun 2022, tercatat terdapat 148 permohonan kerja sama di zona/blok tradisional, seluas 91.187,90 Ha dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 13. Persetujuan pemberian akses pemanfaatan

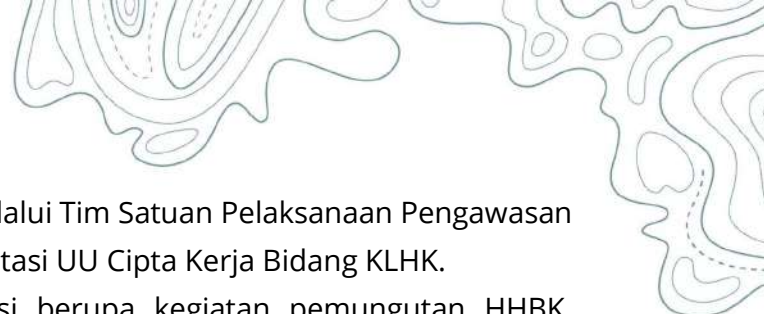
PROSES	UPT	Kaw. Konservasi	Desa	Kec	Kab	Prov	Mitra	Anggota	Luas (Ha)
Belum TTD PKS	3	3	4	3	3	3	4	75	700,90
OA Tradisional	5	5	11	8	7	6	21	1458	1.333,88
Telaahan	7	8	20	11	8	7	28	715	18.297,01
Sudah TTD PKS	22	23	72	47	30	17	94	2210	70.750,36
Tidak Disetujui	1	1	1	1	1	1	1	57	105,75
Grand Total	30	32	107	68	43	22	148	4515	91.187,90

Berdasarkan tabel di atas, terdapat data OA tradisional yang berarti usulan kerja sama pemberian akses yang setelah dilakukan verifikasi secara spasial, lokasi usulan tersebut merupakan *opened area* di zona/blok tradisional yang menjadi target penanganan area terbangun di dalam Kawasan Konservasi seluas 1.333,88 Ha. Pemanfaatan di lokasi usulan saat ini berbentuk kebun/lahan garapan berada di TN Gunung Halimun Salak, TN Kerinci Seblat, dan TN Bromo Tengger Semeru, di TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi pemanfaatan berupa tambak, dan di Tahura Bukit Soeharto berupa kebun sawit.

Permohonan kerja sama yang tidak mendapat persetujuan Direktur Jenderal KSDAE adalah seluas 105,75 Ha yang diusulkan oleh Yayasan Masyarakat Bahari Teluk Bone Lestari. Lokasi usulan berada di TWAL Kepulauan Padamarang, BKSDA Sulawesi Tenggara dengan akses yang dimohon berupa pemanfaatan ikan, lobster dan biota laut lainnya serta budidaya lobster. Pertimbangan untuk menolak permohonan kerja sama tersebut adalah bahwa mitra bukanlah merupakan kelompok masyarakat sekitar kawasan konservasi, yaitu berbentuk yayasan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia berupa penangkaran ikan dan koral, perdagangan besar hasil perikanan, aktivitas profesional ilmiah dan teknis lainnya.

Tantangan dalam pencapaian

1. Apabila melihat dari tren pencapaian target sampai dengan tahun 2022 sebesar 45,49% maka pada akhir periode Renstra 2020-2024 target tidak akan tercapai. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya alternatif.
2. Kemitraan Konservasi pasca UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan sesuai mandat pada PP 24 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan PNPB yang Berasal dari Denda Administratif Bidang Kehutanan, bahwa penyelesaian keterlanjuran areal terbangun berupa lahan garapan oleh masyarakat di dalam Kawasan Konservasi diselesaikan menggunakan skema kemitraan konservasi. Skema kemitraan Konservasi tersebut terlebih dahulu perlu mendapatkan



persetujuan/*clearance* dari Menteri LHK melalui Tim Satuan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal) Implementasi UU Cipta Kerja Bidang KLHK.

3. Pemanfaatan potensi Kawasan Konservasi berupa kegiatan pemungutan HHBK, pemanfaatan sumber daya perairan, budidaya tradisional dan perburuan tradisional tetap dilakukan dengan skema kerja sama pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses, dengan tata cara dan persyaratan yang masih menyesuaikan dengan Perdirjen P.6 Tahun 2018.
4. Berkenaan dengan dinamika kemitraan konservasi pasca UUCK tersebut, beberapa usulan permohonan kerja sama pemanfaatan di zona/blok tradisional, berdasarkan hasil pencermatan terhadap karakteristik lokasi yang diusulkan perlu mendapatkan persetujuan/*clearance* sebagaimana poin 1.

Upaya perbaikan

1. Proses verifikasi lebih ketat dengan penekanan pada aspek kelestarian potensi kawasan, berupa tambahan informasi data potensi, tata cara pemanfaatan dan penetapan jumlah potensi kawasan yang boleh diambil, yang dituangkan dalam dokumen RPP/RKT sebagai kelengkapan dokumen PKS.
2. Melakukan koordinasi antara lain dengan :
 - a. Direktorat teknis lainnya lingkup Ditjen KSDAE, untuk memastikan jenis-jenis yang dimohonkan oleh kelompok masyarakat merupakan jenis yang tidak dilindungi.
 - b. Direktorat Jenderal lingkup KLHK (Ditjen PHPL, Ditjen PSKL) untuk memastikan pemanfaatan potensi dan pengenaan PNPB telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kementerian dan Lembaga lainnya (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.
3. Melakukan pendataan/inventarisasi potensi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, melakukan kajian dan penetapan jumlah yang dapat diambil untuk dimanfaatkan (baik jenis dan jumlah), kajian untuk penetapan lokasi dan luasan (*cross analysis* dengan kuota pemanfaatan, wilayah jelajah satwa, dsb), melakukan kajian potensi usaha ekonomi alternatif (wisata, dsb) serta melakukan pendataan terhadap peredaran HHBK dari dalam ke luar Kawasan Konservasi.
4. Sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan monitoring terhadap proses-proses pengusulan kerja sama pemberian akses pemanfaatan di zona/blok tradisional serta dinamika kemitraan konservasi sebagai salah satu upaya penanganan keterlanjuran di dalam Kawasan Konservasi.
5. Penyempurnaan NSPK:
 - a. Berupaya untuk melakukan tinjauan ulang terhadap PermenLHK No. P.43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat.

- b. Melakukan tinjauan ulang terhadap Rancangan PermenLHK tentang Kemitraan Konservasi (sebagai upaya penanganan keterlanjuran di dalam Kawasan Konservasi).
- c. Menyusun arahan terhadap proses kerja sama pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses pemanfaatan di zona/blok tradisional.



Gambar 12. Budidaya keramba jala apung di TN Bali Barat



Gambar 13. Pengambilan Getah Aren di TN Kep. Togean

IKK 3

LUAS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN KONSERVASI YANG DITANGANI

KEGIATAN



Fasilitasi Penyelesaian Kegiatan Usaha Terbangun



Bimbingan Teknis



Supervisi/Fasilitasi

Target dan Capaian Kinerja Tahunan

	Target (Ha)	Capaian (Ha)		Capaian Kinerja
2020	80.000	3.670,17 (4,59%)	Pendanaan	157,76%
2021	180.000	50.140,81 (27,68%)	Rp 720.025.000	
2022	180.000	283.963,79 (157,76%)	Realisasi	Realisasi Anggaran
2023	180.000	-	Rp 715.079.885	99,31%
2024	180.000	-		

Capaian Kumulatif



dari 800.000 desa

(42,22%)

Rencana Percepatan Penyelesaian Kegiatan Terbangun 2023



Penguatan NSPK



Dukungan Verifikasi Teknis



Penguatan Monitoring

Faktor Pendukung

Kendala & Tantangan

Efisiensi Anggaran

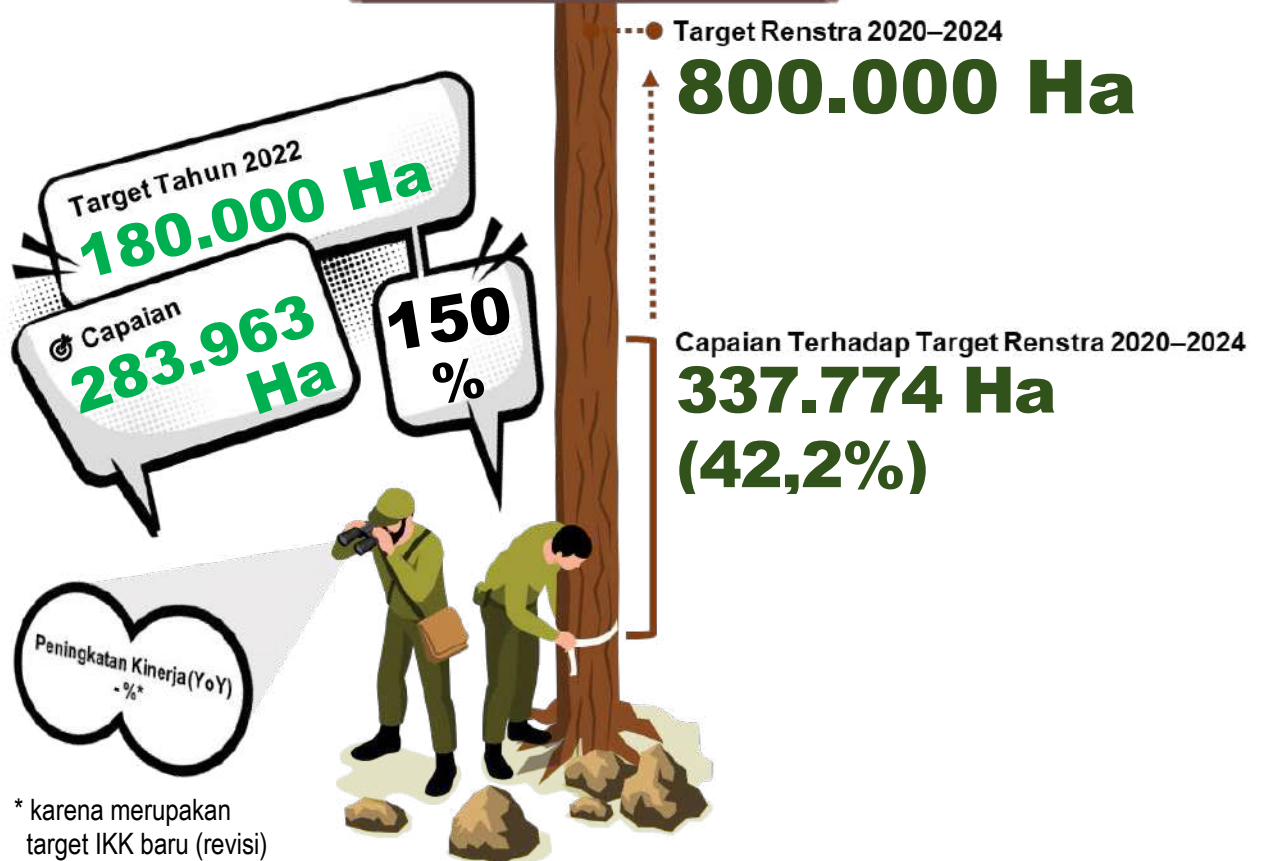
Keberadaan UPT Ditjen KSDAE sebagai pengelola tapak, yang bersentuhan langsung dengan para pihak terkait.

Sinergitas dengan kegiatan pendataan potensi dan permasalahan pada Direktorat Perencanaan KK.

Belum didukung NSPK yang memadai.

Proses penyamaan persepsi dan pemberian pemahaman kepada para pihak, terkait perubahan paradigma yang membutuhkan waktu.

Apabila angka capaian kinerja disandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 99,31% maka diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 1,02, yang dikategorikan sebagai kinerja yang efisien.



“Tahun 2022 merupakan masa transisi proses penanganan konflik tenurial dan kemitraan konservasi sesuai implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga untuk di tingkat Pusat difokuskan pada penyiapan NSPK, dan pada tingkat UPT didorong kegiatan inventarisasi lapangan. Prosedur dan tahapan penanganan konflik tenurial pun diintegrasikan dengan penyelesaian kegiatan terbangun melalui skema UUCK.”

IKK 3. LUAS PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN KONSERVASI YANG DITANGANI

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Luas Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang ditangani” dicapai dengan kegiatan Direktorat Pengelolaan KK dan UPT KSDAE. Direktorat Pengelolaan KK melakukan kegiatan: Fasilitasi Penyelesaian Kegiatan Usaha Terbangun, Bimbingan Teknis Penanganan Konflik, dan Supervisi/Fasilitasi Penanganan Konflik dengan dukungan pendanaan sebesar Rp 720.025.000,- dan realisasi Rp 715.079.885,- atau sebesar 99,31%. UPT melakukan kegiatan: pendataan / pemutakhiran areal Konflik Tenurial, pelaporan, pembentukan tim asesmen, pelaksanaan asesmen, penyusunan rencana aksi, pembentukan tim penanganan Konflik Tenurial, penyelesaian Konflik Tenurial, penandatanganan kesepakatan/rekomendasi dan realisasi kesepakatan/rekomendasi dengan dukungan pendanaan sebesar Rp 9.642.519.000,- realisasi Rp 926.403.005,- atau sebesar 96,07%.

Tabel 15. Capaian Kinerja Tahunan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Tahunan				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 3	Luas penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang ditangani	Target	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		Capaian	3.670,17 (4,59%)	50.140,81 (27,68%)	283.963,79 (157,76%)		

Apabila dibandingkan antara capaian 2022 dengan capaian tahun 2021 terdapat peningkatan yang cukup signifikan sebesar 233.822,98 hektar atau 466,33% dari capaian sebelumnya.

Tabel 16. Capaian target IKK 3 berdasarkan Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 3	Luas penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang ditangani	Target	80.000	260.000	440.000	620.000	800.000
		Capaian	3.670,17 (0,46%)	53.810,98 (6,73%)	337.774,77 (42,22%)		

Capaian kumulatif IKK 3 sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target renstra 2020-2024 sebesar 42,22% (337.774,77 hektar dari 800.000 hektar).

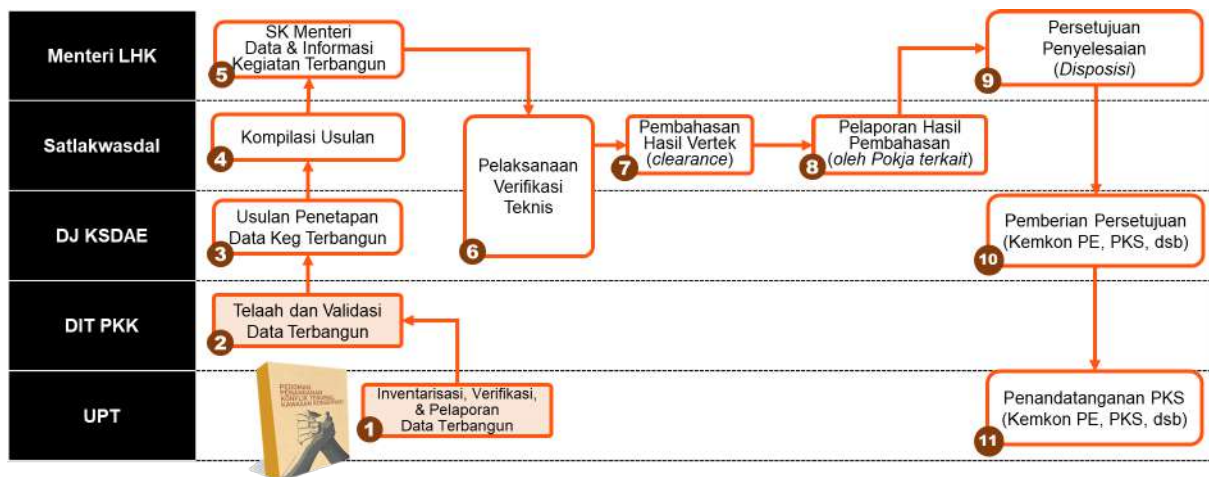
ANALISIS CAPAIAN

IKK Penanganan Konflik Tenurial seluas 800.000 Ha, merupakan target IKK baru dari sebelumnya pada periode berupa Penanganan *Opened Area* seluas 1,8 juta Ha. Penyesuaian target dan nomenklatur IKK ini dilakukan dengan pertimbangan:

1. Penyesuaian organisasi dan tata kerja pasca terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021, dengan kegiatan pemulihan ekosistem di Kawasan Konservasi (termasuk pada areal terbuka) yang semula merupakan bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Kawasan Konservasi, menjadi tugas dan tanggung jawab dari Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem.
2. Transformasi proses penanganan Konflik Tenurial dan kemitraan konservasi sesuai implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejalan dengan temuan BPK RI berdasarkan LHP Nomor 2/LHP/XVII/01/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang pada intinya merekomendasikan agar areal seluas ±866.767 Ha yang ditetapkan secara indikatif sebagai kegiatan terbangun tanpa izin bidang kehutanan di Hutan Konservasi, dapat segera ditangani sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan turunannya.
3. Perubahan paradigma penanganan Konflik Tenurial dan kegiatan terbangun dari sebelumnya bersifat “*primum remedium*” menjadi “*ultimum remedium*”.

Dengan adanya perubahan paradigma, penyesuaian target serta prosedur pelaksanaan kegiatan, maka capaian target penanganan Konflik Tenurial pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun 2021 yang pada saat itu hanya berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor SE.2 /KSDAE/KK/KSA.1/03/2021. Beberapa lokasi yang telah berproses pada tahun 2021 tersebut, di antaranya perlu diproses kembali melalui skema UUCK, khususnya untuk mendapatkan *clearance*.

Tahun 2022 merupakan masa transisi proses penanganan Konflik Tenurial dan kemitraan konservasi sesuai implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga untuk di tingkat Pusat difokuskan pada penyiapan NSPK, dan pada tingkat UPT didorong kegiatan inventarisasi lapangan. Secara garis besar tahapan penanganan Konflik Tenurial yang terintegrasi dengan penyelesaian kegiatan terbangun melalui skema UUCK terdiri dari 11 langkah sebagai berikut, yang merupakan alur sekuensial dari PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Denda Administratif dan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

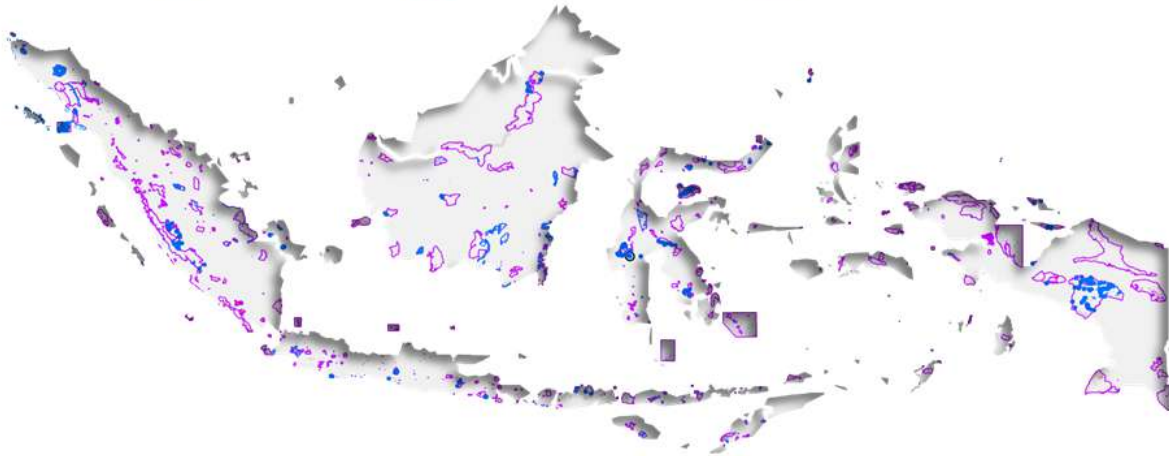


Gambar 14. Tahapan Penanganan Kegiatan Terbangun

Capaian tahun 2022 seluas **283.963 Ha** merupakan jumlah capaian sekuensial berdasarkan tahapan-tahapan tersebut di atas, yang pada tahun 2022 ini masih didominasi pada tahapan inventarisasi data dan informasi di tingkat UPT. Secara rinci, capaian sekuensial dari penanganan Konflik Tenurial pada tahun 2022 diuraikan sebagai berikut, disertai informasi kendala, tantangan, upaya solutif dan efisiensi penggunaan anggarannya.

PETA KEGIATAN TERBANGUN DI HUTAN KONSERVASI

Hutan Konservasi
 Areal Terbuka (866.767 Ha).
 Pendataan oleh UPT.

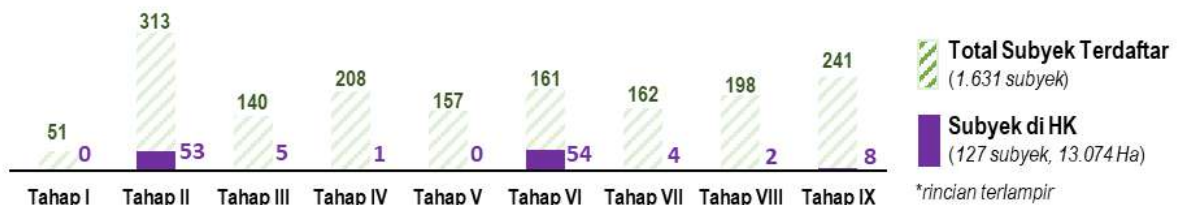


◀ Progres Penyelesaian ▶



*rincian per UPT terlampir

◀ Subyek Obyek Kegiatan Terbangun dalam SK Menteri LHK ▶



*rincian terlampir

◀ Analisa Kinerja ▶

FAKTOR PENDUKUNG	KENDALA & TANTANGAN	EFISIENSI ANGGARAN
- Keberadaan UPT Ditjen KSDAE sebagai pengelola tapak, yang bersentuhan langsung dengan para pihak terkait. - Sinergitas dengan kegiatan pendataan potensi dan permasalahan pada Direktorat Perencanaan KK.	- Belum didukung NSPK yang memadai. - Proses penyamaan persepsi dan pemberian pemahaman kepada para pihak, terkait perubahan paradigma yang membutuhkan waktu.	EFISIEN Apabila angka capaian kinerja disandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 99,31% maka diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 0,66, yang dikategorikan sebagai kinerja yang efisien.

MOMEN KUNCI

KEGIATAN PENANGANAN KONFLIK TENURIAL TAHUN 2022





Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial

OUTPUT-OUTCOME

Pada tatanan output, kinerja pada tahun ini menghasilkan **data dan informasi hasil inverte kegiatan terbangun** yang sangat bermanfaat bagi pencapaian penanganan kegiatan terbangun di tahun 2023. Meskipun belum menghasilkan *outcome* yang signifikan pada tahun ini, ke depan, kegiatan penanganan konflik tenurial diharapkan dapat menghasilkan *outcome* berupa “kepastian” baik bagi masyarakat maupun pengelola.

MANFAAT

BAGI PENGELOLA



BAGI MASYARAKAT

Menyelesaikan permasalahan konflik tenurial dan kegiatan yang terjadi yang telah berlangsung lama.

Membangun semangat penyelesaian masalah dengan *rule base* yang kuat, & menghindari kesan “pembiaran”.

Merubah image/ paradigma masyarakat kepada pengelola, yang semula dianggap represif menjadi konsolidatif.

Mengurangi peluang perluasan areal konflik maupun konflik tenurial baru.

Meningkatkan hubungan dengan masyarakat sekitar.

Menyediakan data dan informasi tren penyelesaian masalah untuk kebutuhan perencanaan pengelolaan efisiensi anggaran, dsb.

Mendapatkan rasa aman dan kepastian dalam berinteraksi dengan kawasan maupun petugas.

Memberikan nilai tambah secara ekonomis dari hasil kegiatan masyarakat, dari semula “illegal” menjadi “legal”.

Mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi aktif terhadap pengelolaan kawasan konservasi (penjagaan, dsb).

Mendapatkan peluang/ kesempatan untuk mendapatkan program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dsb.

Meningkatkan hubungan komunikasi dengan pengelola.



CORRECTIVE ACTION

Rencana Percepatan Penyelesaian Kegiatan Terbangun di Tahun 2023

1

PENGUATAN NSPK

Penyelesaian NSPK Penyelesaian Penguasaan Tanah di Hutan Konservasi yang tidak hanya mengatur penyelesaian terhadap lahan garapan, melainkan juga secara komprehensif juga mengatur kegiatan terbangun lainnya, seperti fasos fasum, sarpras, permukiman, dsb.



2

DUKUNGAN VERIFIKASI TEKNIS

Terhadap 112 subyek yang telah terdaftar dalam 10 SK Data dan Informasi Kegiatan Terbangun, seluas ± 12.000 Ha (terlampir). Beberapa subyek kegiatan terbangun yang tercantum dalam SK Menteri LHK tanpa melalui Ditjen KSDAE perlu dicek secara khusus.



3

PENGUATAN SISTEM MONITORING

Penguatan monitoring bulanan, baik secara tabular maupun spasial, dengan mengoptimalkan penggunaan Dashboard Pengelolaan KK.



IKK 4

JUMLAH UNIT KAWASAN KONSERVASI YANG DINILAI EFEKTIVITAS PENGELOLAANNYA

KEGIATAN



MonEv
Kesesuaian Fungsi



Penilaian Efektivitas
Pengelolaan



Perlindungan dan
Pengamanan KK



Pengendalian
Kebakaran Hutan

Target dan Capaian Kinerja Tahunan

	Target	Capaian		Capaian Kinerja
2020	132	129 (97,72%)	Pendanaan	101,08%
2021	277	285 (102,89%)	Rp 5.664.003.000	Realisasi Anggaran
2022	277	280 (101,08%)	Realisasi	99,98%
2023	277	-	Rp 5.662.628.093	
2024	277	-		

Capaian Kumulatif

694 unit

dari 1.240 unit KK

(55,96%)

Tools Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan



Management Effectiveness
Tracking Tool (METT)



Context
Planning
Process
Output
Outcome



Score Card

Rata-Rata Nilai Efektivitas
Pengelolaan Kawasan dari
Seluruh Kawasan

63,09%

Rata-Rata Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Per Kawasan

CA	SM	TN	TWA	TB	TAHURA	KSA/KPA
64,22%	63,97%	76,21%	64,69%	56,13%	58,71%	35,82%

Kendala

Keterbatasan data dukung

Refocussing anggaran

Kapasitas SDM terbatas

Kegiatan teknis tidak
terlaksana akibat
pandemi

Upaya Perbaikan

Pemantauan implementasi
penilaian, perbaikan
proses, penguatan metode

Bimtek fasilitator penilaian

Penetapan fasilitator
penilaian

Pengenalan METT 4

IKK 4. JUMLAH UNIT KAWASAN KONSERVASI YANG DINILAI EFEKTIVITAS PENGELOLAANNYA

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) **“Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang Dinilai Efektivitas Pengelolaannya”** dicapai dengan kegiatan Direktorat Pengelolaan KK dan UPT KSDAE. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi melakukan kegiatan: Pemantauan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi, Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi, Pengendalian Kebakaran Hutan dengan dukungan pendanaan sebesar Rp 5.664.003.000,- realisasi Rp 5.662.628.093,- atau sebesar 99,98%. UPT melakukan kegiatan: Pemantauan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi, Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi, Pengendalian Kebakaran Hutan dengan dukungan pendanaan sebesar Rp 91.871.821.000,- realisasi Rp 88.600.225.039,- atau sebesar 96,44%.

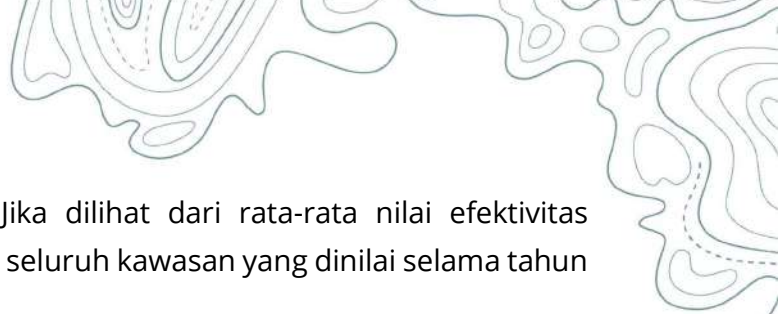
Tabel 17. Capaian Kinerja Tahunan IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja Tahunan				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 4	Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya	Target	132	277	277	277	277
		Capaian	129 (97,72%)	285 (102,89)	280 (101,08%)	-	-

Apabila dibandingkan antara capaian 2022 dengan capaian tahun 2021 terdapat penurunan dari capaian sebelumnya sebesar 5 unit Kawasan Konservasi atau 1,79% namun masih mencapai target tahunan.

Dalam penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi, untuk kawasan *terrestrial* pengelola Kawasan Konservasi menggunakan perangkat *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen KSDAE No. P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Sedangkan untuk penilaian efektivitas pada kawasan perairan menggunakan *scorecard*. Pada kedua tool tersebut elemen penilaian yang digunakan masih sama yaitu *context, planning, input, proses, output, dan outcome*.

Berdasarkan hasil verifikasi hasil penilaian yang dilakukan, sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebanyak 280 unit kawasan yang melakukan penilaian efektivitas pengelolaan dari 76 UPT/UPTD yaitu 26 UPT TN, 26 UPT KSDA, dan 24 UPTD TAHURA. Jumlah ini lebih besar dibandingkan target awal sejumlah 277 unit kawasan, karena ada beberapa pengelola kawasan yang melakukan penilaian di luar lokasi target, sehingga



capaian tahun 2022 ini sebesar **101,08%** Jika dilihat dari rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan yang dapat dicapai dari seluruh kawasan yang dinilai selama tahun 2022 ini adalah **63,09%**.

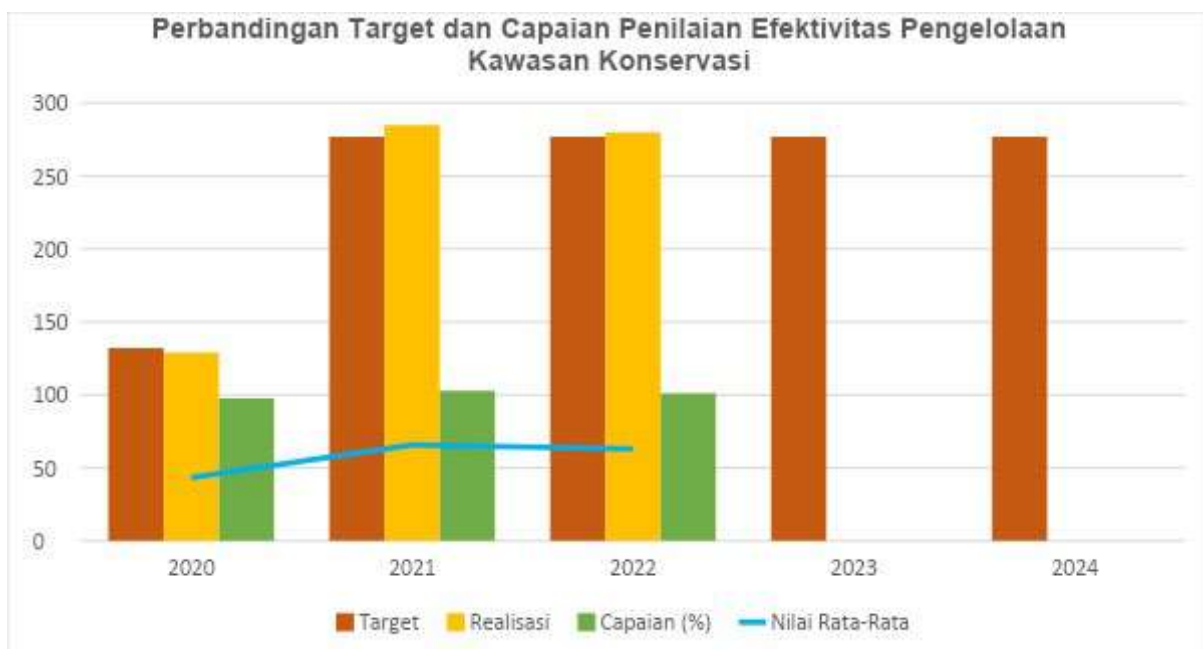
Berdasarkan arahan fungsinya, kawasan terbanyak yang dilakukan penilaian adalah CA yaitu sebanyak 100 unit (rata-rata nilai 64,22%) dan TWA sebanyak 72 unit (rata-rata nilai 64,69%). Namun jika dilihat rata-rata nilai tertinggi masih dicapai oleh kawasan TN yaitu 76,21%. Hal ini sangat wajar, mengingat kawasan dengan arahan fungsi taman nasional dikelola langsung oleh satu manajemen pengelolaan (UPT TN) sehingga seluruh dukungan manajemen yang dimiliki telah digunakan untuk mengelola satu kawasan tersebut. Sebaliknya kawasan dengan status fungsi KSA/KPA memiliki nilai rata-rata terendah, yaitu 35,82%, karena arahan fungsinya masih belum jelas, sehingga pengelolaannya belum dapat dilakukan dengan optimal. Dokumen blok dan dokumen perencanaan lainnya yang menjadi arah kebijakan pengelolaan belum dapat disusun, sehingga menyebabkan tidak efektifnya dalam pengelolaan kawasan dengan fungsi KSA/KPA tersebut. Nilai efektivitas terendah lainnya adalah Taman Buru (TB), yaitu 56,13%, karena sampai saat ini belum adanya regulasi yang jelas untuk pengelolaan TB, sehingga kawasan tidak benar-benar dikelola sesuai arahan fungsinya.

Isu penting dalam pengelolaan Kawasan Konservasi lainnya adalah pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) yang merupakan satu-satunya Kawasan Konservasi di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2022, rata-rata efektivitas pengelolaan Tahura adalah 58,71%, hal ini dipengaruhi oleh pengelola Tahura yang tidak jelas baik dalam kewenangan pengelolaan, keterbatasan sumber daya anggaran, SDM, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah setempat. Menurut Leverington, pengelolaan kawasan dikatakan efektif jika nilai efektivitas pengelolaan minimal 67%, secara nilai rata-rata, yang masuk kategori efektif hanya taman nasional. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:



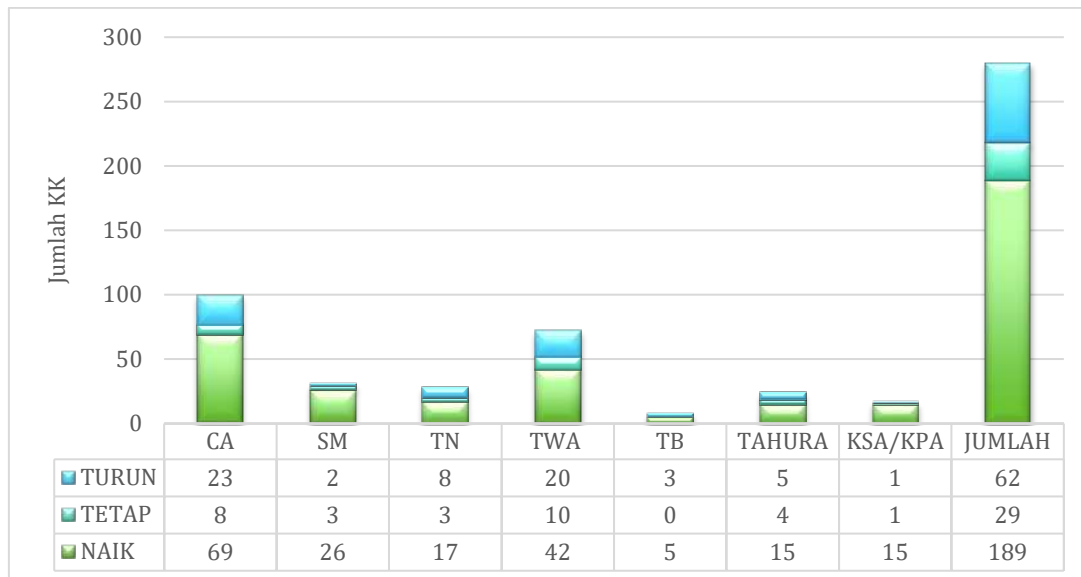
Gambar 15. Grafik Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2021) secara umum memang mengalami penurunan namun target kawasan yang dinilai 277 unit per tahun telah terlampaui. Mengingat beberapa Kawasan Konservasi baru juga mulai dilakukan penilaian. Kawasan yang dimaksud ada yang benar-benar baru ditunjuk/ditetapkan dan ada pula kawasan yang berubah fungsi sebagian menjadi kawasan dengan arahan fungsi konservasi lainnya.



Gambar 16. Grafik Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, pengelolaan pada 280 unit KK tahun 2022 ini secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian nilai efektivitas pengelolaan yang dilakukan, sebanyak 189 unit KK (67,50%) mengalami kenaikan, 29 unit KK (10,36%) tetap dan 62 unit KK (22,14%) mengalami penurunan.

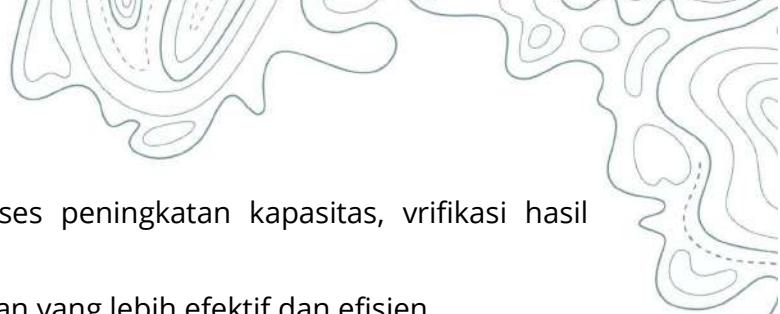


Gambar 17. Grafik Capaian Nilai Efektivitas Pengelolaan Yang Dilakukan pada 189 Unit KK

Adanya penurunan nilai efektivitas pengelolaan kawasan ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya memang terkait tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan yang dilakukan atau karena keterbatasan data dukung yang dapat disediakan pengelola pada saat melakukan penilaian sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan verifikasi penilaian. Di samping itu di tengah masa pandemi yang terjadi saat ini, dimana kegiatan teknis di lapangan banyak yang tidak dapat dilaksanakan, baik karena anggaran pengelolaan yang terbatas (*refocusing*), jumlah dan kapasitas SDM di lapangan yang terbatas, serta faktor teknis/administrasi lainnya.

UPAYA PERBAIKAN

1. Dalam rangka mendukung pencapaian IKK dan meningkatkan peran para pihak dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi telah diterbitkan SK Direktur Pengelolaan KK No. SK.11/PKK/PPKK/KSA.1/7/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Serta Penguatan Implementasi Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Tugas Tim kerja ini adalah:
 - a. Melakukan pemantauan implementasi penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi.
 - b. Memberikan masukan dalam rangka perbaikan proses dan hasil penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi.

- 
- c. Memberikan dukungan terhadap proses peningkatan kapasitas, verifikasi hasil penilaian dan penyusunan laporan.
 - d. Menyiapkan penguatan metode penilaian yang lebih efektif dan efisien.
 2. Bimbingan teknis fasilitator penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi yang diikuti seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE dan perwakilan UPTD Tahura. Kegiatan ini merupakan bagian strategi mengisi kesenjangan jumlah fasilitator yang tersedia, dibanding dengan jumlah kawasan yang dinilai setiap tahunnya. Bimtek fasilitator dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan teknik fasilitasi dan pemahaman yang lebih baik terkait penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi dengan metode METT serta merancang upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Kawasan Konservasi.
 3. Proses penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi membutuhkan seorang fasilitator untuk membantu dalam proses penilaian, dan memastikan proses dalam penilaian dapat objektif dan hasilnya dapat menggambarkan kondisi pengelolaan. Untuk itu diterbitkan SK Direktur Pengelolaan KK No. SK.15/PKK/PPKK/KSA.1/9/2022 tentang Penetapan Fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, Tugas Fasilitator adalah:
 - a. Memandu persiapan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi
 - b. Memandu proses pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi
 - c. Memandu pendokumentasian proses penilaian dan penyusunan laporan hasil efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi
 4. Melakukan bimbingan teknis, koordinasi, supervisi dan verifikasi penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi;
 6. Melakukan evaluasi kemajuan kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi dan merangkum butir-butir pembelajaran (*best practices*) proses penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi yang diukur dengan menggunakan perangkat METT sampai dengan tahun 2021, termasuk *gap analysis* penilaian: alat ukur, indikator atau kriteria untuk meningkatkan kualitas penilaian;
 7. Pengenalan METT 4 sebagai alat penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KESESUAIAN FUNGSI

Penetapan Kawasan Konservasi sebagai strategi konservasi keanekaragaman hayati merupakan satu hal penting yang dapat diandalkan, dengan asumsi bahwa kawasan ini diharapkan dapat melindungi nilai-nilai penting yang ada di dalamnya untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Mengelola kawasan konservasi sebanyak 560 unit dengan luasan mencapai lebih dari 27 juta hektar menjadi tantangan tersendiri. Apalagi setiap kawasan konservasi memiliki mandat pengelolaan yang spesifik dengan potensi dan ancaman yang beragam.



DASAR PELAKSANAAN



PP NO. 28 TAHUN 2018

Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (pasal 41)

PERMENHUT NO. 49 TAHUN 2014

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN EKF

Permenhut 49/2014 Pasal 3



Usulan
evaluasi



Pembentukan
Tim Teknis



Evaluasi
ekosistem



Penyusunan
rekomendasi

Jumlah Unit Kawasan Konservasi Yang Diusulkan
Per Fungsi Sampai dengan Tahun 2022

PROSES



58 Unit

CA SM TN TB TWA TAHURA KSA/KPA

15 5 0 0 6 2 30



SELESAI

CA SM TN TB TWA TAHURA KSA/KPA

12 4 2 2 5 0 0



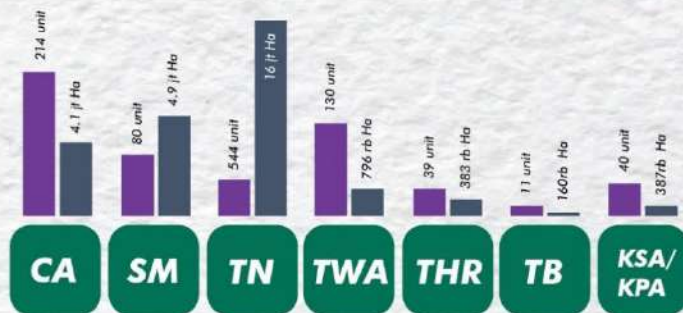
25 Unit

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN

Upaya perlindungan hutan khususnya perlindungan hutan konservasi diupayakan dapat berjalan efektif sesuai mandat PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan jo PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Adapun upaya perlindungan hutan difokuskan pada usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

KAWASAN KONSERVASI

568 Unit
± 26,8 Juta Ha



TUJUAN PERLINDUNGAN

Menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

SMART PATROL

Tools untuk mencatat, mengobservasi, dan mendokumentasikan setiap temuan di lapangan, serta menyimpan dan mengolah datanya sebagai bahan perencanaan pengelolaan kawasan konservasinya.



Kebijakan
Rekomendasi
Pengelolaan
Kawasan

DASHBOARD PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Sistem Informasi yang memudahkan para pengguna dalam menginput, mengolah/analisis, dan menyajikan informasi lapangan (spasial, grafik, tabular dan narasi) terkait perlindungan kawasan konservasi

560

Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran

Alat bantu analisis
Verifier Pencapaian IKK
Alat bantu perencanaan

Monitoring data dan kegiatan patroli

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan konservasi pada tahun 2022 turut mendukung pencapaian kinerja dari IKK jumlah KK yang ditingkatkan efektifitasnya. Efektifitas pengendalian kebakaran di hutan konservasi dapat ditunjukkan dengan adanya trend kejadian Fire spot yang cenderung menurun. Pada tahun 2022 terdapat kejadian kebakaran (Fire spot) pada 21 KK di 15 UPT Ditjen KSDAE. Kondisi ini menunjukkan adanya trend penurunan kejadian karhut di hutan konservasi dari tahun 2019-2022. Secara global upaya pengendalian kebakaran hutan di hutan konservasi turut berkontribusi dengan terbebasnya Indonesia dari bencana asap (Transboundary haze) sebagaimana telah terjadi pada tahun 2019. Upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan konservasi dilaksanakan dengan mengacu pada P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan mencakup aspek pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.

Penghitungan Luas Kebakaran Hutan pada Tahun 2022

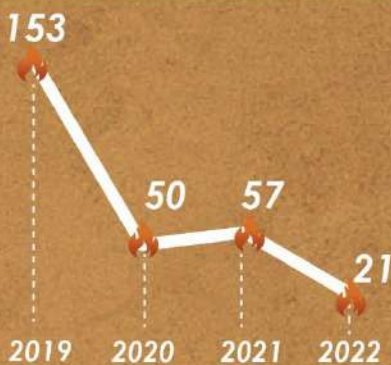


Validasi Luas Karhut Dilakukan Bulanan

Upaya sesuai P.32/2016 tentang Pengendalian Karhutla



Jumlah KK dengan Fire Spot

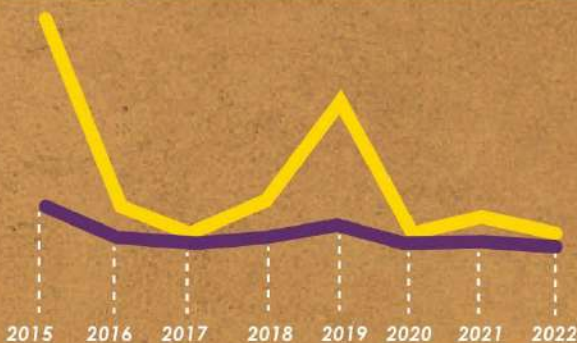


Sumber: Dit. PPI, Dit. IPSDH dan Laporan Groundcheck UPT Ditjen KSDAE



Didominasi Ekosistem Kering seperti semak belukar

Trend Kebakaran di Hutan Konservasi



Karhutla
Karhut di Hutan Konservasi

Luas Kebakaran di Hutan Konservasi **10,9%**
atau seluas 22.340 Ha



Revitalisasi Sarpras Dalkarhut pada 13 UPT Ditjen KSDAE Super Prioritas



KAWASAN KONSERVASI BERSTATUS INTERNASIONAL

Dari sejumlah kawasan konservasi yang ditetapkan, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi juga mengawal isu-isu terkait kawasan konservasi yang berstatus internasional antara lain Warisan Dunia Alam (Nature World Heritage), Cagar Biosfer (Biosphere Reserve) dan UNESCO Global Geopark. Hal ini membawa konsekuensi terhadap intensitas dan keberhasilan pengelolaannya.



 World Heritage Site Warisan Dunia Alam	 Biosphere Reserve Cagar Biosfer	 Ramsar Site Situs Ramsar	 Asean Heritage Park Taman Warisan ASEAN	 Global Geopark Taman Geologi Global
4 SITUS 8 Unit KK	19 SITUS 74 Unit KK	7 SITUS 7 Unit KK	7 SITUS 7 Unit KK	4 SITUS 4 Unit KK



Warisan Dunia

Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972)



Cagar Biosfer

Persetujuan ICC (International Coordinating Council) MAB (Man and the Biosphere) UNESCO yang terdiri dari area inti, zona penyangga, dan area transisi.



Geopark

UNESCO Global Geoparks adalah wilayah geografis tunggal dan terpadu di mana situs dan lanskap penting geologis internasional dikelola dengan konsep holistik perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.



BINA CINTA ALAM

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor : 15 Tahun 2021, Bina Cinta Alam menjadi salah satu tupoksi baru pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Dalam kegiatannya Bina Cinta Alam termuat dalam IKK Direktorat PKK yaitu Kader Bina Cinta Alam yang dilibatkan dalam Pengelolaan KK pada periode tahun 2023 dan 2024. Dalam tahap persiapan untuk tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.062.950.000 untuk UPT Ditjen KSDAE dengan realisasi Rp 2.018.726.767 atau sebesar 97,86%. Kegiatan yang dilakukan UPT adalah melakukan pendataan terhadap kader Konservasi dan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kawasan konservasi. Pada tahun 2022 ini terdapat sebanyak 96 orang sebagai kader Konservasi.



Pendataan Kader Konservasi

Kondisi Tahun 2022

96 Orang

Target Renstra
Tahun 2020-2024

200 Orang



On Progress

- ☐ Draft Peraturan Pembentukan Kader Konservasi Alam
- ☐ Identifikasi dan Pengumpulan Data Kader Konservasi
- ☐ Bimbingan Teknis kepada UPT terhadap kegiatan Bina Cinta Alam
- ☐ Pembinaan kepada Kader Konservasi Alam baik yang lama maupun baru



PROYEK BIODIVERSITY CONSERVATION AND CLIMATE PROTECTION IN THE GUNUNG LEUSER ECOSYSTEM (BCCP-GLE)

Proyek BCCP-GLE merupakan proyek yang didanai melalui hibah luar negeri dari The German Ministry of Environment, Nature Conservation, Building, and Nuclear Safety (BMUB), KfW dengan jenis hibah terencana uang. Pelaksanaan proyek ini berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Alokasi dana untuk proyek BCCP-GLE seluruhnya adalah sejumlah £ 8.460.000.

Tujuan Project



Terbangunnya 4.000 Ha Hutan Rakyat dan Sistem Agroforestry di 40 desa



Kepastian batas kawasan hutan $\pm$ 50 km



Conservation community agreement di 40 desa



Menurunnya jumlah konflik satwa liar sebanyak 36 kasus

Perpanjangan

+ 2.000 Ha Kemitraan Konservasi,
+ 10 desa distabilkan

+ 18 km diperjelas

+ 10 desa melakukan kontrak konservasi desa

+ 14 kasus konflik manusia dengan satwa liar

Capaian Project

(2016-2020)

100%

4.100 Ha telah ditanami

(2021-2022)

70%

1.400 Ha dari 2.000 Ha

(2019)

100%

33 Km

(2022)

100%

35 Km

100%

Kab Aceh Selatan,
Aceh Singkil, Kota
Subulussalam

100%

Kab Aceh Tenggara,
Kab Gayo Lues

>100%

Total penanganan
72 kasus sepanjang 2022

Terbentuk 3 Desa
Responsif Konflik

Permasalahan dan Tindak Lanjut Proyek BCC-GLE

1. RE-COMPOSITION BUDGET ALOKASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI KEGIATAN TA 2023.
2. MEMASTIKAN ANGGARAN TERCANTUM PADA DIPA MASING - MASING PIU PADA BULAN JANUARI/ FEBRUARI 2023.
3. PENGISIAN KEMBALI REKENING KHUSUS BANK INDONESIA UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023.
4. PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH HANYA AKAN DILAKSANAKAN HINGGA BULAN NOVEMBER 2023, NAMUN UNTUK PELAKSANAAN TEKNIS LAPANGAN HANYA HINGGA AGUSTUS 2023.
5. OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADA INDIKATOR PEMULIHAN EKOSISTEM SELUAS 2000 HA.
6. PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA EXIT STRATEGY DALAM RANGKA PENUTUPAN HIBAH.
7. PENUTUPAN HIBAH YANG MEMERLUKAN BAST DARI DINAS KEHUTANAN





PROYEK BIODIVERSITY CONSERVATION AND CLIMATE PROTECTION IN THE GUNUNG LEUSER ECOSYSTEM (BCCP-GLE)

Proyek BCCP-GLE merupakan proyek yang didanai melalui hibah luar negeri dari *The German Ministry of Environment, Nature Conservation, Building, and Nuclear Safety* (BMUB), KfW dengan jenis hibah terencana uang. Pelaksanaan proyek ini berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Alokasi dana untuk proyek BCCP-GLE seluruhnya adalah sejumlah £ 8.460.000 dengan rincian yang dikelola Kementerian LHK sejumlah £ 3.936.271 dan penerusan hibah di Dinas Kehutanan Provinsi Aceh sejumlah 4.523.729 Euro. Jangka waktu pelaksanaan proyek ini dimulai pada tanggal 24 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Tujuan dari proyek BCCP-GLE adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya 4.000 Ha Hutan Rakyat dan sistem agroforestry di 40 desa
2. Kepastian batas kawasan hutan $\pm$ 50 km
3. *Conservation community agreement* di 40 desa
4. Menurunnya jumlah konflik satwa liar.

Sesuai dengan Dokumen Amandement *Separate Agreement* (SA) dan *Financing Agreement* (SA) Kegiatan HLN Proyek *Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem* (BCCPGLE) pada tanggal 9 Juni 2021. Alokasi anggaran untuk hibah BCCPGLE adalah sebesar £ 2.831.211,3 atau setara Rp 46.714.986.450 (pada kurs Rp 16.500). Pada periode perpanjangan tersebut terdapat penambahan untuk kabupaten baru yaitu Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Untuk penambahan *output* dengan rincian sebagai berikut:

1. 4.000 ha + 2.000 ha kemitraan konservasi di dalam zona/blok Tradisional Kawasan Konservasi dan pengembangan masyarakat desa sekitar untuk membantu menstabilkan penggunaan lahan di setidaknya 40 desa + 10 desa yang berbatasan dengan hutan dan lahan basah dalam kawasan ekosistem Gunung Leuser.
2. 50 km + 18 km dari garis perbatasan taman nasional, Kawasan Konservasi dan hutan lindung diperjelas melalui koordinasi yang berhasil dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab termasuk desa-desa terkait.
3. Kontrak Konservasi Desa (KKD/Qanun Desa) dibuat di setidaknya 40 desa + 10 desa.

Setidaknya 36 + 14 kasus konflik manusia dengan satwa liar (HWCS) yang secara signifikan dikurangi di daerah Proyek penting sampai proyek berakhir.

Selain hal tersebut, terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan *project* yaitu UPT BKSDA Aceh, UPT BBTN Gunung Leuser dan Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi menjadi *Project Implementing Unit* (PIU). Selain itu Direktorat Pengelolaan Kawasan

Konservasi juga berperan sebagai *Project Executing Agency* (PEA). Alokasi pada masing-masing PIU mendapatkan alokasi dana hibah sebagai berikut :

Tabel 18. Alokasi kegiatan BCCPGLE berdasarkan PIU

No	<i>Project Implementing Unit</i>			Euro (€)	Rupiah (Rp) (kurs Rp. 16.500)
1.	Direktorat Konservasi	Pengelolaan	Kawasan	411.959,00	6.797.323.500
2.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh			357.500,00	5.898.750.000
3.	Balai Besar Leuser	Taman Nasional	Gunung	433.021,30	7.144.852.450
Total				1.202.480,30	19.840.924.950

Capaian Kinerja Project BCCPGLE tahun 2022

Tugas Pokok Fungsi Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi selaku *Project Executing Agency* dan *Project Implementing Unit* adalah memastikan pengelolaan proyek hibah BCCPGLE dapat berjalan dengan baik dari sisi administrasi, keuangan dan teknis proyek. Pada tahun 2022, beberapa isu pengelolaan proyek yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di tingkat PIU tersedia cukup di dalam Rekening Khusus Bank Indonesia.
2. Memastikan proses pembayaran *invoice* kegiatan untuk konsultan pelaksana berjalan dengan baik.
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan pencapaian *output* yang dilaksanakan oleh konsultan pelaksana dan PIU BKSDA Aceh dan PIU BBTN Gunung Leuser berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Melaksanakan usulan proses perpanjangan proyek BCCPGLE ke tahun 2023

Terkait dengan tugas pokok fungsi tersebut, beberapa capaian yang didapatkan dalam pengelolaan proyek tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Realisasi Keuangan Project BCCPGLE keseluruhan

Alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan proyek BCCPGLE pada tahun 2022 pada masing – masing PIU baik yang bersumber dari sumber dana Hibah Luar Negeri (HLN) maupun Rupiah Murni Pendamping (RMP) adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan proyek BCCPGLE pada tahun 2022 pada masing – masing PIU

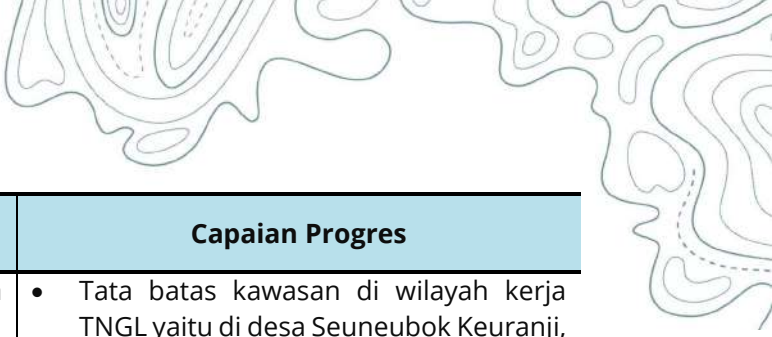
No	Project Implementing Unit	Pagu Alokasi	Realisasi Pagu Alokasi	% Serapan
1.	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	12.255.661.000	12.097.742.037	99,74%
2.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	2.184.875.000	2.077.181.172	95,07%
3.	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser	3.066.714.000	2.733.700.348	89,14
Total		17.507.250.000	16.908.623.557	

2. Capaian Indikator Teknis Project BCCPGLE

Hingga tahun 2022, capaian untuk indikator teknis pada project BCCPGLE adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Capaian untuk indikator teknis pada project BCCPGLE

Output	Capaian Progres
4.000 ha + 2.000 ha kemitraan konservasi di dalam zona/blok tradisional kawasan konservasi dan pengembangan masyarakat desa sekitar untuk membantu menstabilkan penggunaan lahan di setidaknya 40 desa + 10 desa yang berbatasan dengan hutan dan lahan basah dalam kawasan ekosistem Gunung Leuser	Untuk 4.000 ha (2016 – 2020) : Total 4.100 ha telah ditanami (capaian 100%) Untuk 2000 ha (2021 – 2022) Capaian 70% : • Sosialisasi untuk 18 Desa dan 28 KTHK; • Terbangunnya 8 unit KBPE dengan kapasitas masing-masing 50.000 bibit; • Disepakatinya SPKS KBPE dengan Kelompok Masyarakat (28 KTHK) yang menghasilkan bibit layak tanam minimal 400.000 bibit; • Dilaksanakannya Sekolah Lapang di 10 Desa tentang Pemulihan Ekosistem, sampai 2-3 kali pertemuan dengan total pertemuan 10 kali per Desa; • Dilaksanakannya PRA/PLUP untuk 10 Desa, sampai 1-2 kali FGD dengan total pertemuan 4 kali per Desa; • Luas penanaman di Aceh Tenggara : 1.379,10 Ha • Luas penanaman di Gayo Lues : 1.216,32 Ha • SPKS untuk 2 kabupaten telah selesai
50 km + 18 km dari garis perbatasan taman nasional, Kawasan Konservasi dan hutan lindung diperjelas melalui koordinasi yang berhasil dengan lembaga-lembaga yang	33 Km di tahun 2019 (Capaian 100%) 35 Km di tahun 2022 (Capaian 100%) • 35 km telah selesai dilaksanakan pada bulan Agustus – November 2022



Output	Capaian Progres
bertanggung jawab termasuk desa-desa terkait.	- Tata batas kawasan di wilayah kerja TNGI yaitu di desa Seuneubok Keuranji, Alurduamas, Jambo Kepok dengan total panjang 17,09 km (Rawa Kluet). - Tata batas Kawasan di wilayah kerja BKSDA Aceh yaitu di desa Suka Jaya, Kuala Baru Sungai, Kuala Baru Laut dengan total panjang 18,167 Km (SM Rawa Singkil).
Kontrak konservasi desa (KKD/Qanun Desa) dibuat di setidaknya 40 desa + 10 desa.	Untuk 40 desa pada Kab Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam (capaian 100%): - Distribusi insentif PES kepada 41 desa sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali, pada tahun 2018, 2019 dan 2021 - Capaian tersusunnya Qanun Desa di 3 Kabupaten lama sebanyak 34 Desa dan KKD sebanyak 8 desa - Sertifikasi ProKlim di Desa Binaan dengan ProKlim Utama (1 Desa), ProKlim Madya (23 Desa), ProKlim Pratama (12 Desa) - SK Hutan Desa (6 Desa) - SK Hutan Adat (5 Desa) Untuk 10 desa di Kab Aceh Tenggara dan Gayo Lues (capaian 100%): KKD untuk 10 desa telah ditetapkan, saat ini dalam proses penyusunan proposal untuk PES dan peningkatan KKD menjadi Qanun
Setidaknya 36 + 14 kasus konflik manusia dengan satwa liar (HWCS) yang secara signifikan dikurangi di daerah Proyek penting sampai proyek berakhir.	Penanganan kasus konflik satwa liar manusia (total 72 Kasus telah tertangani di 2022) (capaian > 100%) , dengan rincian sebagai berikut : - Gajah : 32 kasus - Harimau : 29 kasus - Buaya : 3 kasus - Orang Utan : 2 kasus - Terbentuknya 3 Desa Responsive Konflik di wilayah proyek - Penyiapan kebun pakan dan pemeliharaan CRU

Permasalahan Dan Tindak Lanjut Proyek BCCP-GLE

Berkaitan dengan pelaksanaan proyek BCCP-GLE tahun 2022, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan perpanjangan hingga 2023 :

1. *Re-composition budget* alokasi dalam rangka optimalisasi kegiatan TA 2023.
2. Memastikan anggaran tercantum pada DIPA masing – masing PIU pada bulan Januari/ Februari 2023.
3. Pengisian kembali Rekening Khusus Bank Indonesia untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2023.
4. Pelaksanaan kegiatan Hibah hanya akan dilaksanakan hingga bulan November 2023, namun untuk pelaksanaan teknis lapangan hanya hingga Agustus 2023.
5. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada indikator pemulihan ekosistem seluas 2000 Ha.
6. Penyusunan dokumen rencana *exit strategy* dalam rangka penutupan hibah.
7. Penutupan hibah yang memerlukan BAST dari Dinas Kehutanan

Dokumentasi kegiatan



Gambar 18. Sosialisasi Program dan Rencana KBPE bersama 28 KTHK di 18 Desa dengan 8 Unit KBPE



Gambar 19. Kegiatan Sekolah Lapang KBPE dan Ecosistem serta Keterlibatan Ibu-Ibu



Gambar 20. Kegiatan PRA / PLUP



Gambar 21. 41 QANUN DESA dan 1 KKD di Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Subulussalam, 5 KKD Aceh Tenggara dan 4 KKD di Gayo Lues.

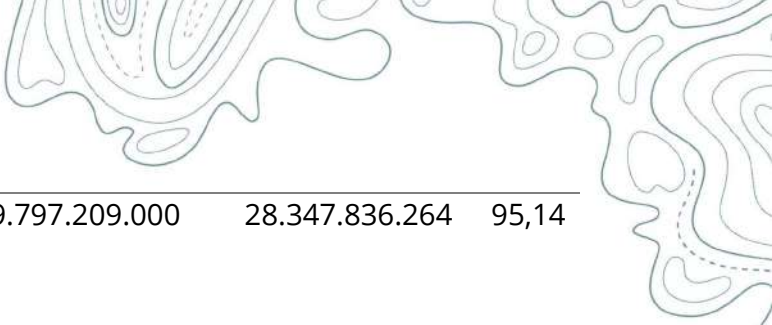
B. CAPAIAN ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi pada tahun 2022 didukung dengan anggaran DIPA sebesar Rp 20.065.991.000,- dengan realisasi sebesar Rp 19.887.910.797,- atau 99,11%. Dengan membandingkan capaian kinerja yang menunjukkan angka di atas capaian kinerja anggaran, diperoleh efisiensi senilai **0,91** sehingga dapat dikategorikan **efisien**. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi juga didukung oleh kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT Ditjen KSDAE dengan dukungan anggaran sebesar Rp 210.477.626.000,- dengan realisasi Rp 199.493.164.927,- atau 94,78%. Dengan demikian total anggaran Kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi di pusat dan UPT Ditjen KSDAE sebesar Rp 230.543.617.000,- termasuk anggaran yang tercatat sebagai Program Hibah Luar Negeri dengan realisasi sebesar Rp 219.381.075.724,- atau 95,16%

Tabel 21. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Pusat dan UPT.

No	Kode/ Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
A	Direktorat Pengelolaan KK	20.065.991.000	19.887.910.797	99,11
1	Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	720.025.000	715.079.885	99,31
2	Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	5.664.003.000	5.662.628.093	99,98
3	Kebijakan Kemandirian Masyarakat di Desa Penyangga Kawasan Konservasi	743.232.000	736.197.332	99,05
4	Kebijakan Pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	683.070.000	676.263.450	99,00
5	Hibah Luar Negeri (BCCPGLE)	12.255.661.000	12.097.742.037	98,71
B	Unit Pelaksana Teknis	210.477.626.000	199.493.164.927	94,78
1	6740.BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (001-Kader Bina Cinta Alam yang diibatkan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi)	2.062.950.000	2.020.410.767	97,94
2	6740.QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di KK)	49.104.226.000	48.225.467.731	98,21



3	6740.REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi) (002-Luas Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang ditangani)	29.797.209.000	28.347.836.264	95,14
4	6740.PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan (006-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas Pengelolaannya)	91.871.821.000	88.600.225.039	96,44
5	6740.BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Hibah Luar Negeri)	37.641.420.000	32.299.225.126	85,81
JUMLAH A+B		230.543.617.000	219.381.075.724	95,16

Sumber: OmSpam

EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Nilai kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi berada pada angka 109,47% yang diperoleh dari 4 capaian indikator kinerja yaitu: Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yaitu 108,20%; Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di Kawasan Konservasi melalui kemitraan konservasi yaitu 78,61 %; Luas Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi yang ditangani yaitu 150%; dan Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya yaitu 101,08%.

Apabila angka capaian kinerja kegiatan (109,47%) disandingkan dengan realisasi anggaran sebesar (95,11%) maka diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 0,91. Nilai ini dapat mengindikasikan bahwa kegiatan pengelolaan kawasan konservasi selama tahun 2022 yang menjadi tanggungjawab Direktorat Kawasan Konservasi dapat dikategorikan efisien

BAB IV PENUTUP

Capaian kinerja tahun 2022 menggambarkan bahwa Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi telah mendukung terwujudnya Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pengelolaan Kawasan Konservasi tahun 2022 sebesar 109,47 %.

Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi pada tahun 2022 didukung dengan anggaran DIPA sebesar Rp 20.065.991.000,- dengan realisasi sebesar Rp 19.887.910.797,- atau 99,11%. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi juga didukung oleh kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di UPT Ditjen KSDAE dengan dukungan anggaran sebesar Rp 210.477.626.000,- dengan realisasi Rp 199.493.164.927,- atau 94,78%. Dengan demikian total anggaran Kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi di pusat dan UPT Ditjen KSDAE sebesar Rp 230.543.617.000,- dengan realisasi sebesar Rp 219.381.075.724,- atau 95,16%

Indeks efisiensi pelaksanaan kegiatan sebesar 0,91 atau dalam rentang efisien. Pencapaian target kinerja tahun 2022 tersebut menunjukkan sejauh mana upaya Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dan UPT Ditjen KSDAE dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, mulai dari perumusan target capaian dalam renstra 2020-2024, penyusunan rencana kerja, penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan, bimbingan teknis dan monitoring.

Pendekatan nilai capaian target kinerja dan indeks efisiensi bukanlah satu-satunya ukuran yang menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan kawasan konservasi, namun *outcome* dari pelaksanaan kegiatan tersebut yang harus menjadi target dari kegiatan pengelolaan Kawasan konservasi yaitu Kawasan konservasi yang terjaga keutuhannya, perbaikan terhadap kerusakan, dan adanya *outcome* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Harapan ke depan, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dan UPT Ditjen KSDAE mampu meningkatkan capaian kinerjanya sekaligus menunjukkan *outcome* keberhasilan di tingkat tapak berupa terjaganya kawasan konservasi, perbaikan terhadap ekosistem yang rusak dan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.



LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.**
Jabatan : **Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**
Jabatan : **Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022



Pihak Kedua,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.**
Jabatan : **Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi**

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Jakarta, Desember 2022

Direktur,

Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eseelon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi
Tahun Anggaran : 2022

Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	500 Desa	0	Desa	50	Desa	150	Desa	500	Desa
				Penjelasan Capaian: Proses koordinasi dengan pemerintah desa dan pendampingan masyarakat di sekitar KK		Penjelasan Capaian: Proses koordinasi dengan pemerintah desa dan pendampingan masyarakat di sekitar KK, serta pelaksanaan penandatanganan kesepakatan konservasi pada 50 desa		Penjelasan Capaian: Proses koordinasi dengan pemerintah desa dan pendampingan masyarakat di sekitar KK, serta pelaksanaan penandatanganan kesepakatan konservasi pada 100 desa		Penjelasan Capaian: Proses koordinasi dengan pemerintah desa dan pendampingan masyarakat di sekitar KK, serta pelaksanaan penandatanganan kesepakatan konservasi pada 350 desa	
		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	90.000 Hektar	10.000	Hektar	20.000	Hektar	50.000	Hektar	90.000	Hektar
				Penjelasan Capaian: Rekomendasi Persetujuan Kemitraan Konservasi seluas 10.000 hektar		Penjelasan Capaian: Rekomendasi Persetujuan Kemitraan Konservasi seluas 10.000 hektar		Penjelasan Capaian: Rekomendasi Persetujuan Kemitraan Konservasi seluas 30.000 hektar		Penjelasan Capaian: Rekomendasi Persetujuan Kemitraan Konservasi seluas 40.000 hektar	
	Terjaminnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	180.000 Hektar	45.000	Hektar	90.000	Hektar	135.000	Hektar	180.000	Hektar
				Penjelasan Capaian: Verifikasi <i>opened area</i> dan Inventarisasi atau pemutahiran data seluruh kegiatan terbangun di KK dan koordinasi dengan pihak terkait seluas 45.000 hektar		Penjelasan Capaian: Verifikasi <i>opened area</i> dan Inventarisasi atau pemutahiran data seluruh kegiatan terbangun di KK dan koordinasi dengan pihak terkait seluas 45.000 hektar		Penjelasan Capaian: Verifikasi <i>opened area</i> dan Inventarisasi atau pemutahiran data seluruh kegiatan terbangun di KK dan koordinasi dengan pihak terkait seluas 45.000 hektar		Penjelasan Capaian: Verifikasi <i>opened area</i> dan Inventarisasi atau pemutahiran data seluruh kegiatan terbangun di KK dan koordinasi dengan pihak terkait seluas 45.000 hektar	
		Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	277 Unit KK	0	Unit KK	50	Unit KK	150	Unit KK	277	Unit KK
				Penjelasan Capaian: Evaluasi hasil penilaian tahun sebelumnya dan persiapan penilaian tahun 2022		Penjelasan Capaian: Penilaian efektivitas pengelolaan pada 50 Unit KK dan verifikasi hasil		Penjelasan Capaian: Penilaian efektivitas pengelolaan pada 100 Unit KK dan verifikasi hasil		Penjelasan Capaian: Penilaian efektivitas pengelolaan pada 127 Unit KK dan verifikasi hasil	

Jakarta, Desember 2022
Direktur,


Ir. Jety Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eseelon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Klasifikasi Rincian Output (RO)	Rincian Output (RO)
1.	Terjaminnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	500 Desa	ABV.Kebijakan Bidang Kehutanan	003.Kebijakan Kemandirian Masyarakat di Desa Penyangga Kawasan Konservasi
		Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	90.000 Hektar	ABV.Kebijakan Bidang Kehutanan	004.Kebijakan Pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi
2.	Terjaminnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	180.000 Hektar	ABV.Kebijakan Bidang Kehutanan	001.Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi
		Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	277 Unit KK	ABV.Kebijakan Bidang Kehutanan	002.Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
			1 Lembaga	BDB.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003.HLN Biodiversity Leuser
			1 Lembaga	BDB.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002.HLN Forest Programme IV Sulawesi
			1 Lembaga	BDB.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	004.HLN Forest Programme II Sumatera
			1 Lembaga	BDB.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	005.HLN BioCF-ISFL

Kegiatan :

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi
2. *Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (HLN)*

Total Anggaran

Anggaran :

Rp. 7.810.330.000,-

Rp. 12.255.661.000,-

Rp.20.065.991.000

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,
PIL. Direktur Jenderal KSDAE,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

Pihak Pertama,
Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi,

Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 004

Lampiran 3. Capaian Kesepakatan Konservasi Tahun 2022

No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
Lanjutan dari lampiran LKj tahun 2021					
981	BKSDA Aceh	Gewat	Linge	Aceh Tengah	2022
982	BKSDA Aceh	Jamat	Linge	Aceh Tengah	2022
983	BKSDA Aceh	Reje Payung	Linge	Aceh Tengah	2022
984	BKSDA Aceh	Seuneubok Pusaka	Trumon Timur	Aceh Selatan	2022
985	BKSDA Aceh	Suka Jaya	Kuala Baru	Aceh Singkil	2022
986	BKSDA Aceh	Suka Makmur	Pulau Banyak Barat	Aceh Singkil	2022
987	BBTN Gunung Leuser	Harapan Maju	Sei Lapan	Langkat	2022
988	BBTN Gunung Leuser	PIR ADB Besitang	Besitang	Langkat	2022
989	BBTN Gunung Leuser	Indra Damai	Kluet Selatan	Aceh Selatan	2022
990	BBTN Gunung Leuser	Pucuk Lembang	Kluet Timur	Aceh Selatan	2022
991	BBTN Gunung Leuser	Ujung Mangki	Bakongan	Aceh Selatan	2022
992	BBTN Gunung Leuser	Kuta Gajah	Bohorok	Langkat	2022
993	BBTN Gunung Leuser	Marpunge	Putri Betung	Gayo Lues	2022
994	BBTN Gunung Leuser	Ketambe	Ketambe	Aceh Tenggara	2022
995	BBTN Gunung Leuser	Bun Bun Indah	Leuser	Aceh Tenggara	2022
996	BBTN Gunung Leuser	Gumpang Lempuh	Putri Betung	Gayo Lues	2022
997	BBKSDA Sumatera Utara	Lumban Rau Utara	Nassau	Toba Samosir	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
998	BBKSDA Sumatera Utara	Lumban Balik	Habinsaran	Toba Samosir	2022
999	BBKSDA Sumatera Utara	Lumban Lintong	Habinsaran	Toba Samosir	2022
1000	BBKSDA Sumatera Utara	Selotong	Secanggang	Langkat	2022
1001	BBKSDA Sumatera Utara	Secanggang	Secanggang	Langkat	2022
1002	BBKSDA Sumatera Utara	Karya Maju	Tanjung Pura	Langkat	2022
1003	BBKSDA Sumatera Utara	Paluh Kurau	Hamparan Perak	Deli Serdang	2022
1004	BBKSDA Sumatera Utara	Parlombuan	Pangaribuan	Tapanuli Utara	2022
1005	BBKSDA Sumatera Utara	Negeri Dolok	Dolok Panribuan	Simalungun	2022
1006	BBKSDA Sumatera Utara	Marubun Lökkung	Dolok Silou	Simalungun	2022
1007	BBKSDA Sumatera Utara	Batang Onang Baru	Batang Onang	Padang Lawas Utara	2022
1008	BBKSDA Sumatera Utara	Bargot Topong	Padang Sidimpuan Batunadua	Kota Padang Sidimpuan	2022
1009	BBKSDA Sumatera Utara	Aek Raso	Torgamba	Labuhan Batu Selatan	2022
1010	BBKSDA Sumatera Utara	Hutabaru Siundol	Sosopan	Padang Lawas Utara	2022
1011	BBKSDA Sumatera Utara	Sampean	Sipirok	Tapanuli Selatan	2022
1012	BBKSDA Sumatera Utara	Bulu Mario	Sipirok	Tapanuli Selatan	2022
1013	BBKSDA Sumatera Utara	Aek Sabaon	Marancar	Tapanuli Selatan	2022
1014	BBKSDA Sumatera Utara	Bandar Baru	Siteu Tali Urang Jehe	Pakpak Bharat	2022
1015	BBKSDA Sumatera Utara	Kecupak II	Pergetteng-getteng Sengkut	Pakpak Bharat	2022
1016	BBKSDA Sumatera Utara	Lae Hole I	Parbuluan	Dairi	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1017	BBKSDA Sumatera Utara	Lae Hole II	Tanjung Pura	Langkat	2022
1018	BBKSDA Sumatera Utara	Rahutbosi	Pangaribuan	Tapanuli Utara	2022
1019	BBKSDA Sumatera Utara	Nagori Dolok	Silou Kahean	Simalungun	2022
1020	BBKSDA Sumatera Utara	Simerpara	Pergetteng-getteng Sengkut	Pakpak Bharat	2022
1021	BTN Batang Gadis	Habincaran	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	2022
1022	BTN Batang Gadis	Hutapadang	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	2022
1023	BTN Batang Gadis	Laru Bolak	Tambangan	Mandailing Natal	2022
1024	BTN Batang Gadis	Pastap	Tambangan	Mandailing Natal	2022
1025	BTN Batang Gadis	Muaramais	Tambangan	Mandailing Natal	2022
1026	BTN Batang Gadis	Aek Ngali	Panyabungan Selatan	Mandailing Natal	2022
1027	BTN Batang Gadis	Simpang Duhu Dolok	Ulu Pungkut	Mandailing Natal	2022
1028	BTN Batang Gadis	Bangkelang	Batang Natal	Mandailing Natal	2022
1029	BTN Batang Gadis	Huta Tinggi	Puncak Sorik Marapi	Mandailing Natal	2022
1030	BTN Batang Gadis	Hutabaringin Julu	Puncak Sorik Marapi	Mandailing Natal	2022
1031	BTN Batang Gadis	Soposorik	Kotanopan	Mandailing Natal	2022
1032	BTN Batang Gadis	Huta Namale	Puncak Sorik Marapi	Mandailing Natal	2022
1033	BBKSDA Riau	Tanjung Palas	Dumai Timur	Kota Dumai	2022
1034	BBKSDA Riau	Bukit Batrem	Dumai Timur	Kota Dumai	2022
1035	BBTN Kerinci Seblat	Pakan Rabaa Tengah	Koto Parik Gadang Diateh	Solok Selatan	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1036	BBTN Kerinci Seblat	Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah	Koto Parik Gadang Diateh	Solok Selatan	2022
1037	BBTN Kerinci Seblat	Pakan Rabaa Utara Duo	Koto Parik Gadang Diateh	Solok Selatan	2022
1038	BBTN Kerinci Seblat	Kambang	Lengayang	Pesisir Selatan	2022
1039	BBTN Kerinci Seblat	Lakitan Tengah	Lengayang	Pesisir Selatan	2022
1040	BBTN Kerinci Seblat	Luak Kapau Alam Pauh Duo	Pauh Duo	Solok Selatan	2022
1041	BBTN Kerinci Seblat	Lunang	Lunang	Pesisir Selatan	2022
1042	BBTN Kerinci Seblat	Napal Licin	Ulu Rawas	Musi Rawas Utara	2022
1043	BBTN Kerinci Seblat	Pal VII	Bermani Ulu Raya	Rejang Lebong	2022
1044	BBTN Kerinci Seblat	Pelangai Gadang	Ranah Pesisir	Pesisir Selatan	2022
1045	BBTN Kerinci Seblat	Persiapan Pakan Rabaa Utara Duo	KPGD	Solok Selatan	2022
1046	BBTN Kerinci Seblat	Petanang Ulu	Lubuklinggau Utara I	Lubuklinggau	2022
1047	BBTN Kerinci Seblat	Sindang Lunang	Lunang	Pesisir Selatan	2022
1048	BBTN Kerinci Seblat	Sosokan	Ulu Rawas	Musi Rawas Utara	2022
1049	BBTN Kerinci Seblat	Sumber Bening	Selupu Rejang	Rejang Lebong	2022
1050	BBTN Kerinci Seblat	Sungai Lalang	Lembah Masurai	Merangin	2022
1051	BBTN Kerinci Seblat	Sungai Telang	Bathin Ulu	Bungo	2022
1052	BBTN Kerinci Seblat	Teratak Tempatih IV Koto Mudiek	Batang Kapas	Pesisir Selatan	2022
1053	BBTN Kerinci Seblat	Belui Tinggi	Depati Tujuh	Kerinci	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1054	BBTN Kerinci Seblat	Betung Kuning	Sitinjau Laut	Kerinci	2022
1055	BBTN Kerinci Seblat	Pangkalan Jambu	Pangkalan Jambu	Merangin	2022
1056	BBTN Kerinci Seblat	Lubuk Betung Inderapura	Airpura	Pesisir Selatan	2022
1057	BBTN Kerinci Seblat	Pelangai Kaciak	Ranah Pesisir	Pesisir Selatan	2022
1058	BBTN Kerinci Seblat	Talang Balarik Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pesisir Selatan	2022
1059	BKSDA Sumatera Barat	Sikucur Utara	V Koto Kampung Dalam	Padang Pariaman	2022
1060	BKSDA Sumatera Barat	Kubang Koto Barapak	Bayang	Pesisir Selatan	2022
1061	BKSDA Sumatera Barat	Andaleh Baruh Bukik	Sungayang	Tanah Datar	2022
1062	BKSDA Sumatera Barat	Langki	Tanjung Gadang	Sijunjung	2022
1063	BKSDA Sumatera Barat	Sungai Lansek	Kamang Baru	Sijunjung	2022
1064	BKSDA Sumatera Barat	Sitanang	Ampek Nagari	Agam	2022
1065	BKSDA Sumatera Barat	Lasi	Canduang	Agam	2022
1066	BKSDA Sumatera Barat	Tanjung Sani		Agam	2022
1067	BKSDA Sumatera Barat	Panti	Panti	Pasaman	2022
1068	BKSDA Sumatera Barat	Panti Selatan	Panti	PASaman	2022
1069	BKSDA Sumatera Barat	Lubuk Karak	Sembilan Koto	Dharmasraya	2022
1070	BKSDA Sumatera Barat	Kasang	Batang Anai	Padang pariaman	2022
1071	BKSDA Sumatera Barat	Limau Manis Selatan	Pauh	Padang	2022
1072	BKSDA Sumatera Barat	Pariangan	Pariangan	Tanah Datar	2022
1073	BKSDA Sumatera Barat	Lubuk Alung	Lubuk Alung	Padang pariaman	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1074	BKSDA Sumatera Barat	Silago	Sembilan Koto	Dharmasraya	2022
1075	BKSDA Sumatera Barat	Koto Gaek Guguk	Gunung Talang	Solok	2022
1076	BKSDA Sumatera Barat	Sungai Batuang	Kamang Baru	Sijunjung	2022
1077	BKSDA Jambi	Pintas Tuo	Muara Tabir	Tebo	2022
1078	BTN Bukit Duabelas	Desa Baru	Air Hitam	Sarolangun	2022
1079	BTN Bukit Duabelas	Jernih	Air Hitam	Sarolangun	2022
1080	BKSDA Sumatera Selatan	Durian Dangkal	Mulak Sebingkai	Lahat	2022
1081	BKSDA Sumatera Selatan	Lubuk Nipis	Panang Enim	Muara Enim	2022
1082	BKSDA Sumatera Selatan	Keluang	Tungkal Ilir	Banyuasin	2022
1083	BKSDA Sumatera Selatan	Suka Merindu	Merapi Selatan	Lahat	2022
1084	BKSDA Sumatera Selatan	Talang Akar	Merapi Selatan	Lahat	2022
1085	BKSDA Sumatera Selatan	Lubuk Pedaro	Merapi Selatan	Lahat	2022
1086	BKSDA Sumatera Selatan	Pagar Dewa	Tanjung Agung	Muara Enim	2022
1087	BKSDA Sumatera Selatan	Muara Emil	Tanjung Agung	Muara Enim	2022
1088	BKSDA Sumatera Selatan	Embawang	Tanjung Agung	Muara Enim	2022
1089	BKSDA Sumatera Selatan	Lesung Batu	Pagar Gunung	Lahat	2022
1090	BKSDA Sumatera Selatan	Bandu Agung	Muara Payang	Lahat	2022
1091	BKSDA Sumatera Selatan	Pamah Salak	Jarai	Lahat	2022
1092	BKSDA Sumatera Selatan	Sadan	Jarai	Lahat	2022
1093	BKSDA Sumatera Selatan	Suka Bumi	Pajar Bulan	Lahat	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1094	BKSDA Sumatera Selatan	Bantunan	Pajar Bulan	Lahat	2022
1095	BKSDA Sumatera Selatan	Sinjar Bulan	Gumay Ulu	Lahat	2022
1096	BKSDA Sumatera Selatan	Suka Jadi	Pseksu	Lahat	2022
1097	BKSDA Sumatera Selatan	Batu Niding	Pseksu	Lahat	2022
1098	BKSDA Sumatera Selatan	Tanjung Raya	Pseksu	Lahat	2022
1099	BKSDA Sumatera Selatan	Beringin Janggut	Kikim Selatan	Lahat	2022
1100	BKSDA Sumatera Selatan	Keban Agung	Kikim Selatan	Lahat	2022
1101	BKSDA Sumatera Selatan	Muara Cawang	Pseksu	Lahat	2022
1102	BKSDA Sumatera Selatan	Suka Raja	Suka Merindu	Lahat	2022
1103	BKSDA Sumatera Selatan	Ulak Pandan	Merapi Barat	Lahat	2022
1104	BKSDA Sumatera Selatan	Pangkalniur	Riau Silip	Bangka	2022
1105	BKSDA Sumatera Selatan	Riau	Riau Silip	Bangka	2022
1106	BKSDA Sumatera Selatan	Berbura	Riau Silip	Bangka	2022
1107	BKSDA Sumatera Selatan	Riding Panjang	Belinyu	Bangka	2022
1108	BKSDA Sumatera Selatan	Tuik	Kelapa	Bangka Barat	2022
1109	BKSDA Sumatera Selatan	Tanjung Niur	Tempilang	Bangka Barat	2022
1110	BKSDA Sumatera Selatan	Air Menduyung	Simpang Teritip	Bangka Barat	2022
1111	BKSDA Sumatera Selatan	Permis	Simpang Rimba	Bangka Selatan	2022
1112	BKSDA Sumatera Selatan	Gudang	Simpang Rimba	Bangka Selatan	2022
1113	BKSDA Sumatera Selatan	Merindu	Pagar Gunung	Lahat	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1114	BTN Berbak dan Sembilang	Sungai Sayang	Sadu	Tanjung Jabung Timur	2022
1115	BKSDA Bengkulu	Suka Negeri	Bangkunat	Pesisir Barat	2022
1116	BKSDA Bengkulu	Bandung Jaya	Kaba Wetan	Kepahiang	2022
1117	BKSDA Bengkulu	Suka Merindu	Marga Sakti Sebelat	Bengkulu Utara	2022
1118	BKSDA Bengkulu	Air Dingin	Sindang Kelingi	Rejang Lebong	2022
1119	BKSDA Bengkulu	Koto Jaya	Kota Mukomuko	Muko muko	2022
1120	BKSDA Bengkulu	Kaana	Enggano	Bengkulu Utara	2022
1121	BKSDA Bengkulu	Rawa Indah	Iilir Talo	Seluma	2022
1122	BKSDA Bengkulu	Ketapang Baru	Semidang Alas Maras	Seluma	2022
1123	BKSDA Bengkulu	Riak Siabun	Sukaraja	Seluma	2022
1124	BKSDA Bengkulu	Pagar Gunung	Semidang Lagan	Bengkulu Tengah	2022
1125	BKSDA Bengkulu	Surabaya	Muara Bangkahulu	Bengkulu	2022
1126	BKSDA Bengkulu	Arang Sapat	Lubuk Sandi	Seluma	2022
1127	BKSDA Bengkulu	Dusun Tengah	Lubuk Sandi	Seluma	2022
1128	BBTN Bukit Barisan Selatan	Karang Brak	Pematang Sawa	Tanggamus	2022
1129	BBTN Bukit Barisan Selatan	Margomulyo	Semaka	Tanggamus	2022
1130	BBTN Bukit Barisan Selatan	Tulung Asahan	Semaka	Tanggamus	2022
1131	BBTN Bukit Barisan Selatan	Pesanguan	Way Nipah	Tanggamus	2022
1132	BBTN Bukit Barisan Selatan	Siring Gading	Bangkunat	Pesisir Barat	2022
1133	BBTN Bukit Barisan Selatan	Sumur Jaya	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1134	BBTN Bukit Barisan Selatan	Tanjung Setia	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	2022
1135	BBTN Bukit Barisan Selatan	Gunung Kemala	Way Krui	Pesisir Barat	2022
1136	BBTN Bukit Barisan Selatan	Gunung Kemala Timur	Way Krui	Pesisir Barat	2022
1137	BBTN Bukit Barisan Selatan	Ulu Krui	Way Krui	Pesisir Barat	2022
1138	BBTN Bukit Barisan Selatan	Tembelang	Bandar Negeri Suoh	Lampung Barat	2022
1139	BBTN Bukit Barisan Selatan	Bukit Makmur	Muara Sahung	Kaur	2022
1140	BBTN Bukit Barisan Selatan	Sukadamai	Air Hitan	Lampung Barat	2022
1141	BBTN Bukit Barisan Selatan	Sedampah Indah	Balik Bukit	Lampung Barat	2022
1142	BBTN Bukit Barisan Selatan	Negeri Ratu Tenumbang	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	2022
1143	BBTN Bukit Barisan Selatan	Penengahan	Lemong	Pesisir Barat	2022
1144	BBTN Bukit Barisan Selatan	Pasar Jum'at	Nasal	Kaur	2022
1145	BBTN Bukit Barisan Selatan	Cinta Makmur	Muara Sahung	Kaur	2022
1146	BBTN Bukit Barisan Selatan	Serimenanti	Makakau Ilir	OKU Selatan	2022
1147	BTN Gunung Halimun Salak	Margalaksana	Cikakak	Sukabumi	2022
1148	BTN Gunung Halimun Salak	Wanajaya	Cisolok	Sukabumi	2022
1149	BTN Gunung Halimun Salak	Bantarkaret	Nanggung	Bogor	2022
1150	BTN Gunung Halimun Salak	Majasari	Sobang	Lebak	2022
1151	BTN Gunung Halimun Salak	Pasir Haur	Cipanas	Lebak	2022
1152	BTN Gunung Halimun Salak	Hegarmanah	Cibeber	Lebak	2022
1153	BTN Gunung Halimun Salak	Sukamulya	Cibeber	Lebak	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1154	BTN Gunung Halimun Salak	Cihambali	Cibeber	Lebak	2022
1155	BTN Gunung Halimun Salak	Sukamaju	Sobang	Lebak	2022
1156	BTN Gunung Halimun Salak	Cisarua	Sukajaya	Bogor	2022
1157	BTN Gunung Halimun Salak	Cipanas	Cipanas	Lebak	2022
1158	BTN Gunung Halimun Salak	Kujangsari	Cibeber	Lebak	2022
1159	BTN Gunung Halimun Salak	Kujangjaya	Cibeber	Lebak	2022
1160	BTN Gunung Halimun Salak	Sobang	Sobang	Lebak	2022
1161	BTN Gunung Halimun Salak	Gununggede	Panggarangan	Lebak	2022
1162	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cinagara	Caringin	Bogor	2022
1163	BBTN Gunung Gede Pangrango	Pancawati	Caringin	Bogor	2022
1164	BBTN Gunung Gede Pangrango	Sukaresmi	Megamendung	Bogor	2022
1165	BBTN Gunung Gede Pangrango	Cibedug	Ciawi	Bogor	2022
1166	BBTN Gunung Gede Pangrango	Wangunjaya	Ciambar	Sukabumi	2022
1167	BBTN Gunung Gede Pangrango	Ginanjur	Ciambar	Sukabumi	2022
1168	BBTN Gunung Gede Pangrango	Babakan Panjang	Nagrak	Sukabumi	2022
1169	BBTN Gunung Gede Pangrango	Pawenang	Nagrak	Sukabumi	2022
1170	BBTN Gunung Gede Pangrango	Undrusbinangun	Kadudampit	Sukabumi	2022
1171	BBTN Gunung Gede Pangrango	Sukamulya	Cugenang	Cianjur	2022
1172	BBKSDA Jawa Barat	Sarimukti	Pasirwangi	Garut	2022
1173	BBKSDA Jawa Barat	Panjiwangi	Tarogong Kaler	Garut	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1174	BBKSDA Jawa Barat	Batukuwung	Padarincang	Serang	2022
1175	BBKSDA Jawa Barat	Bojong Koneng	Babakan Madang	Bogor	2022
1176	BBKSDA Jawa Barat	Campakawarna	Campakamulya	Cianjur	2022
1177	BBKSDA Jawa Barat	Cikawao	Pacet	Bandung	2022
1178	BBKSDA Jawa Barat	Cikupa	Lumbung	Ciamis	2022
1179	BBKSDA Jawa Barat	Cilangkap	Buahdua	Sumedang	2022
1180	BBKSDA Jawa Barat	Karang Tengah	Babakan Madang	Bogor	2022
1181	BBKSDA Jawa Barat	Karyamekar	Pasirwangi	Garut	2022
1182	BBKSDA Jawa Barat	Laksana	Ibun	Bandung	2022
1183	BBKSDA Jawa Barat	Nagrog	Cicalengka	Bandung	2022
1184	BBKSDA Jawa Barat	Pamokolan	Cihaurbeuti	Ciamis	2022
1185	BBKSDA Jawa Barat	Rancasanggal	Cinangka	Serang	2022
1186	BBKSDA Jawa Barat	Sukahurip	Cihaurbeuti	Ciamis	2022
1187	BBKSDA Jawa Barat	Sukamenak	Wanaraja	Garut	2022
1188	BTN Gunung Ciremai	Sayana	Jalaksana	Kuningan	2022
1189	BTN Gunung Ciremai	Pasawahan	Pasawahan	Kuningan	2022
1190	BTN Gunung Ciremai	Padaherang	Sindangwangi	Majalengka	2022
1191	BTN Gunung Ciremai	Gunungmanik	Talaga	Majalengka	2022
1192	BTN Gunung Ciremai	Bantaragung	Sindangwangi	Majalengka	2022
1193	BTN Gunung Ciremai	Argalingga	Argapura	Majalengka	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1194	BTN Gunung Ciremai	Indrakila	Sindang	Majalengka	2022
1195	BTN Gunung Ciremai	Puncak	Cigugur	Kuningan	2022
1196	BTN Gunung Ciremai	Setianegara	Cilimus	Kuningan	2022
1197	BTN Gunung Ciremai	Seda	Mandirancan	Kuningan	2022
1198	BTN Gunung Ciremai	Linggasana	Cilimus	Kuningan	2022
1199	BTN Gunung Ciremai	Padabeunghar	Pasawahan	Kuningan	2022
1200	BTN Gunung Ciremai	Cisantana	Cigugur	Kuningan	2022
1201	BKSDA Jawa Tengah	Banyumudal	Sawal	Moga	2022
1202	BKSDA Jawa Tengah	Nglebak	Tawamangu	Karanganyar	2022
1203	BKSDA Jawa Tengah	Sawal	Sale	Banjarnegara	2022
1204	BKSDA Jawa Tengah	Jambeyan	Sambirejo	Sragen	2022
1205	BKSDA Jawa Tengah	Banyumanis	Donorojo	Jepara	2022
1206	BTN Gunung Merbabu	Tarubatang	Selo	Boyolali	2022
1207	BTN Gunung Merbabu	Ngagrang	Gladagsari	Boyolali	2022
1208	BTN Gunung Merbabu	Tajuk	Getasan	Semarang	2022
1209	BTN Gunung Merbabu	Jogonayan	Ngablak	Magelang	2022
1210	BTN Gunung Merbabu	Pogalan	Pakis	Magelang	2022
1211	BTN Gunung Merbabu	Bawang	Pakis	Magelang	2022
1212	BKSDA Yogyakarta	Kepek	Saptosari	Gunungkidul	2022
1213	BTN Gunung Merapi	Purwobinangun	Pakem	Sleman	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1214	BTN Gunung Merapi	Cluntang	Musuk	Boyolali	2022
1215	BTN Gunung Merapi	Mriyan	Tamansari	Boyolali	2022
1216	BTN Gunung Merapi	Girikerto	Turi	Sleman	2022
1217	BTN Gunung Merapi	Wonokerto	Turi	Sleman	2022
1218	BTN Gunung Merapi	Hargobinangun	Pakem	Sleman	2022
1219	BTN Gunung Merapi	Sidorejo	Kemalang	Klaten	2022
1220	BTN Gunung Merapi	Ngargosoko	Srumbung	Magelang	2022
1221	BBKSDA Jawa Timur	Asmorobangun	Puncu	Kediri	2022
1222	BBKSDA Jawa Timur	Satak	Puncu	Kediri	2022
1223	BBTN Bromo Tengger Semeru	Senduro	Senduro	Lumajang	2022
1224	BBTN Bromo Tengger Semeru	Ranupani	Senduro	Lumajang	2022
1225	BBTN Bromo Tengger Semeru	Ngadisari	Sukopuro	Probolinggo	2022
1226	BTN Meru Betiri	Kebonrejo	Kalibaru	Banyuwangi	2022
1227	BTN Meru Betiri	Karangharjo	Glenmore	Banyuwangi	2022
1228	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Sangiang	Wera	Bima	2022
1229	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Desaloka	Seteluk	Sumbawa Barat	2022
1230	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Seloto	Taliwang	Sumba Barat	2022
1231	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Pelangan	Sekotong	Lombok Barat	2022
1232	BKSDA Nusa Tenggara Barat	Labuhan Aji	Labuhan Badas	Sumbawa	2022
1233	BTN Tambora	Boro	Sanggar	Bima	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1234	BTN Tambora	Oi Katupa	Tambora	Bima	2022
1235	BTN Tambora	Sori tatanga	Pekat	Dompu	2022
1236	BTN Tambora	Calabai	Pekat	Dompu	2022
1237	BTN Tambora	Doropeti	Pekat	Dompu	2022
1238	BTN Tambora	Sorinomo	Pekat	Dompu	2022
1239	BTN Tambora	Oi Saro	Sanggar	Bima	2022
1240	BTN Tambora	Tolokalo	Kempo	Dompu	2022
1241	BTN Tambora	Kawinda Nae	Tambora	Bima	2022
1242	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Oesapa	Kelapa Lima	Kota Kupang	2022
1243	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Barada	Malaka Tengah	Malaka	2022
1244	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Kateri	Malaka Tengah	Malaka	2022
1245	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Kamanasa	Malaka Tengah	Malaka	2022
1246	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Wehali	Malaka Tengah	Malaka	2022
1247	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Enoraen	Amarasi Timur	Kupang	2022
1248	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Camplong I	Fatuleu	Kupang	2022
1249	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Camplong II	Fatuleu	Kupang	2022
1250	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Sulamu	Sulamu	Kupang	2022
1251	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Tanah Merah	Kupang Tengah	Kupang	2022
1252	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Pantai Beringin	Sulamu	Kupang	2022
1253	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Mata Air	Kupang Tengah	Kupang	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1254	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Alor Besar	Alor Barat Laut	Alor	2022
1255	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Darat Pantai	Talibura	Sikka	2022
1256	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Kamot	Alor Timur Laut	Alor	2022
1257	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	Kloangpopot	Doreng	Sikka	2022
1258	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Lainyanyar	Pinu Pahar	Sumba Timur	2022
1259	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Tandula Jangga	Karera	Sumba Timur	2022
1260	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Manurara	Katikutana Selatan	Sumba Tengah	2022
1261	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Waimanu	Katikutana Selatan	Sumba Tengah	2022
1262	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Kambatawundut	Lewa	Sumba Timur	2022
1263	BKSDA Kalimantan Barat	Bengkilu	Tujuh Belas	Bengkayang	2022
1264	BKSDA Kalimantan Barat	Keramat Jaya	Kendawangan	Ketapang	2022
1265	BKSDA Kalimantan Barat	Santaban	Sajingan Besar	Sambas	2022
1266	BKSDA Kalimantan Barat	Simpang Kasturi	Mandor	Landak	2022
1267	BKSDA Kalimantan Barat	Tapen	Suti Semarang	Bengkayang	2022
1268	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Nusa Poring	Menukung	Melawi	2022
1269	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Belaban Ella	Menukung	Melawi	2022
1270	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Nanga Jelundung	Serawai	Sintang	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1271	BTN Gunung Palung	Sejahtera	Sukadana	Kayong Utara	2022
1272	BTN Gunung Palung	Pangkalan Buton	Sukadana	Kayong Utara	2022
1273	BTN Gunung Palung	Sedahan Jaya	Sukadana	Kayong Utara	2022
1274	BKSDA Kalimantan Tengah	Bukit Liti	Kahayan Tengah	Pulang Pisau	2022
1275	BKSDA Kalimantan Tengah	Humbang Raya	Mantangai	Kapuas	2022
1276	BKSDA Kalimantan Tengah	Lahei Mangkutup	Mantangai	Kapuas	2022
1277	BKSDA Kalimantan Tengah	Garung	Jabiren Raya	Pulang Pisau	2022
1278	BKSDA Kalimantan Tengah	Tuwung	Kahayan Tengah	Pulang Pisau	2022
1279	BKSDA Kalimantan Tengah	Muara Ripung	Dusun Selatan	Barito Selatan	2022
1280	BKSDA Kalimantan Tengah	Danau Masura	Dusun Selatan	Barito Selatan	2022
1281	BKSDA Kalimantan Tengah	Madara	Dusun Selatan	Barito Selatan	2022
1282	BKSDA Kalimantan Tengah	Kalahien (Dusun Parigi)	Dusun Selatan	Barito Selatan	2022
1283	BKSDA Kalimantan Tengah	Baru (Dusun Bambaler)	Dusun Selatan	Barito Selatan	2022
1284	BTN Tanjung Puting	Banua Usang	Danau Sembuluh	Seruyan	2022
1285	BTN Tanjung Puting	Kubu	Kumai	Kotawaringin Barat	2022
1286	BTN Tanjung Puting	Muara Dua	Seruyan Hilir	Seruyan	2022
1287	BTN Tanjung Puting	Paren	Danau Sembuluh	Seruyan	2022
1288	BTN Tanjung Puting	Sekonyer	Kumai	Kotawaringin Barat	2022
1289	BTN Tanjung Puting	Sungai Cabang	Kumai	Kotawaringin Barat	2022
1290	BTN Tanjung Puting	Tanjung Hanau	Hanau	Seruyan	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1291	BTN Sebangau	Karuing	Kamipang	Katingan	2022
1292	BTN Sebangau	Sebangau Mulya	Sebangau Kuala	Pulang Pisau	2022
1293	BTN Sebangau	Sebangau Jaya	Sebangau Jaya	Pulang Pisau	2022
1294	BKSDA Kalimantan Timur	Bukit Jering	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	2022
1295	BKSDA Kalimantan Timur	Empakuq	Melak	Kutai Barat	2022
1296	BKSDA Kalimantan Timur	Liang Buaya	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	2022
1297	BKSDA Kalimantan Timur	Random	Tanjung Harapan	Paser	2022
1298	BKSDA Kalimantan Timur	Sedulang	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	2022
1299	BKSDA Kalimantan Timur	Segendang	Batu Engau	Paser	2022
1300	BKSDA Kalimantan Timur	Sumber Rejo	Sekolaq Darat	Kutai Barat	2022
1301	BKSDA Kalimantan Timur	Pulau Derawan	Pulau Derawan	Berau	2022
1302	BTN Kayan Mentarang	Tau Lumbis	Lumbis Hulu	Nunukan	2022
1303	BTN Kayan Mentarang	Pa' Kidang	Krayan Barat	Nunukan	2022
1304	BTN Kayan Mentarang	Pa' Butal	Krayan Barat	Nunukan	2022
1305	BTN Kayan Mentarang	Wa' Yagung	Krayan Timur	Nunukan	2022
1306	BTN Kayan Mentarang	Pa' Betung	Krayan Timur	Nunukan	2022
1307	BTN Kayan Mentarang	Long Belaka Pitau	Pujungan	Malinau	2022
1308	BTN Kayan Mentarang	Long Ketaman	Pujungan	Malinau	2022
1309	BTN Bantimurung Bulusaraung	Sambueja	Simbang	Maros	2022
1310	BTN Bantimurung Bulusaraung	Kalabbirang	Bantimurung	Maros	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1311	BTN Bantimurung Bulusaraung	Balleangin	Balocci	Pangkajene Kepulauan	2022
1312	BTN Bantimurung Bulusaraung	Jenetaesa	Simbang	Maros	2022
1313	BTN Bantimurung Bulusaraung	Leang-leang	Bantimurung	Maros	2022
1314	BTN Bantimurung Bulusaraung	Mariopulana	Camba	Maros	2022
1315	BTN Bantimurung Bulusaraung	Timpuseng	Camba	Maros	2022
1316	BTN Bantimurung Bulusaraung	Baji Pamai	Cenrana	Maros	2022
1317	BTN Bantimurung Bulusaraung	Pattiro Deceng	Camba	Maros	2022
1318	BTN Bantimurung Bulusaraung	Limapoccoe	Cenrana	Maros	2022
1319	BTN Bantimurung Bulusaraung	Cempaniga	Camba	Maros	2022
1320	BTN Bantimurung Bulusaraung	Mattampa Pole	Mallawa	Maros	2022
1321	BTN Bantimurung Bulusaraung	Sabila	Mallawa	Maros	2022
1322	BTN Bantimurung Bulusaraung	Samaenre	Tellulimpoe	Bone	2022
1323	BTN Bantimurung Bulusaraung	Polewali	Tellulimpoe	Bone	2022
1324	BTN Bantimurung Bulusaraung	Kassi	Balocci	Pangkajene Kepulauan	2022
1325	BTN Bantimurung Bulusaraung	Balocci Baru	Balocci	Pangkajene Kepulauan	2022
1326	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bontoa	Minasate'ne	Pangkajene Kepulauan	2022
1327	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bontokio	Minasate'ne	Pangkajene Kepulauan	2022
1328	BTN Bantimurung Bulusaraung	Kalabirang	Minasate'ne	Pangkajene Kepulauan	2022
1329	BTN Bantimurung Bulusaraung	Minasatene	Minasate'ne	Pangkajene Kepulauan	2022
1330	BTN Bantimurung Bulusaraung	Pabundukang / Tonasa	Pangka Jene	Pangkajene Kepulauan	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1331	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bontomasunggu	Tellu Limpoe	Bone	2022
1332	BTN Bantimurung Bulusaraung	Lanne	Tondong Tallasa	Pangkajene Kepulauan	2022
1333	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bonto Birao	Tondong Tallasa	Pangkajene Kepulauan	2022
1334	BTN Bantimurung Bulusaraung	Malaka	Tondong Tallasa	Pangkajene Kepulauan	2022
1335	BTN Bantimurung Bulusaraung	Kalabirang (Camba)	Bantimurung	Maros	2022
1336	BTN Bantimurung Bulusaraung	Toddolimae	Tompo Bulu	Maros	2022
1337	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bonto manai	Tompo Bulu	Maros	2022
1338	BTN Bantimurung Bulusaraung	Bonto Somba	Tompo Bulu	Maros	2022
1339	BTN Bantimurung Bulusaraung	Lebbotengngae	Cenrana	Maros	2022
1340	BTN Bantimurung Bulusaraung	Laiya	Cenrana	Maros	2022
1341	BTN Bantimurung Bulusaraung	Campaniga	Camba	Maros	2022
1342	BKSDA Sulawesi Tengah	Balukang II	Sojol	Donggala	2022
1343	BKSDA Sulawesi Tengah	Santigi	Ongka Malino	Parigi Moutong	2022
1344	BKSDA Sulawesi Tengah	Labonu	Basidondo	Toli Toli	2022
1345	BKSDA Sulawesi Tengah	Pandayora	Pamona Selatan	Poso	2022
1346	BKSDA Sulawesi Tengah	Karya Mandiri	Bolano Lambunu	Rarigi Moutong	2022
1347	BKSDA Sulawesi Tengah	Matube	Bungku Utara	Morowali	2022
1348	BKSDA Sulawesi Tengah	Tabarano	Mori Utara	Morowali Utara	2022
1349	BKSDA Sulawesi Tengah	Tiwaa	Mori Utara	Morowali Utara	2022
1350	BKSDA Sulawesi Tengah	Taronggo	Bungku Utara	Morowali	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1351	BKSDA Sulawesi Tengah	Tirongan Atas	Bungku Utara	Morowali Utara	2022
1352	BKSDA Sulawesi Tengah	Meko	Pamona Barat	Poso	2022
1353	BKSDA Sulawesi Tengah	Taipa	Pamona Barat	Poso	2022
1354	BKSDA Sulawesi Tengah	Mayasari	Pamona Selatan	Poso	2022
1355	BKSDA Sulawesi Tengah	Manimbaya	Balaesang Tanjung	Donggala	2022
1356	BKSDA Sulawesi Tengah	Lakuan Buol	Lakea	Buol	2022
1357	BKSDA Sulawesi Tengah	Ganda-Ganda	Petasia	Morowali Utara	2022
1358	BKSDA Sulawesi Tengah	Mayajaya	Pamona Selatan	Poso	2022
1359	BKSDA Sulawesi Tengah	Lembontonara	Mori Utara	Morowali Utara	2022
1360	BKSDA Sulawesi Tengah	Tamainusi	Soyo Jaya	Morowali Utara	2022
1361	BKSDA Sulawesi Tengah	Buyumpondoli	Pamona Puselemba	Poso	2022
1362	BBTN Lorelindu	Omu	Gumbasa	Sigi	2022
1363	BBTN Lorelindu	Pakuli	Gumbasa	Sigi	2022
1364	BBTN Lorelindu	Pakuli Utara	Gumbasa	Sigi	2022
1365	BBTN Lorelindu	Simoro	Gumbasa	Sigi	2022
1366	BBTN Lorelindu	Tuva	Gumbasa	Sigi	2022
1367	BBTN Lorelindu	Wanga	Lore Peore	Poso	2022
1368	BBTN Lorelindu	Siliwanga	Lore Peore	Poso	2022
1369	BBTN Lorelindu	Watutau	Lore Peore	Poso	2022
1370	BBTN Lorelindu	Bunga	Palolo	Sigi	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1371	BBTN Lorelindu	Kapirooe	Palolo	Sigi	2022
1372	BBTN Lorelindu	Sigimpu	Palolo	Sigi	2022
1373	BBTN Lorelindu	Baku-bakulu	Palolo	Sigi	2022
1374	BBTN Lorelindu	Bobo	Palolo	Sigi	2022
1375	BBTN Lorelindu	Bolapapu	Kulawi	Sigi	2022
1376	BBTN Lorelindu	Salua	Kulawi	Sigi	2022
1377	BBTN Lorelindu	Namo	Kulawi	Sigi	2022
1378	BBTN Lorelindu	Mataue	Kulawi	Sigi	2022
1379	BBTN Lorelindu	Sungku	Kulawi	Sigi	2022
1380	BBTN Lorelindu	Marena	Kulawi	Sigi	2022
1381	BBTN Lorelindu	O'o	Kulawi Selatan	Sigi	2022
1382	BBTN Lorelindu	Watukilo	Kulawi Selatan	Sigi	2022
1383	BBTN Lorelindu	Tompi Bugis	Kulawi Selatan	Sigi	2022
1384	BBTN Lorelindu	Gimpu	Kulawi Selatan	Sigi	2022
1385	BBTN Lorelindu	Pilimakujawa	Kulawi Selatan	Sigi	2022
1386	BBTN Lorelindu	Moa	Kulawi Selatan	Sigi	2022
1387	BTN Kep. Togean	Taningkola	Una una	Tojo Una Una	2022
1388	BTN Kep. Togean	Tumbulawa	Batudaka	Tojo Una Una	2022
1389	BTN Kep. Togean	Tanjung Pude	Una una	Tojo Una Una	2022
1390	BTN Kep. Togean	Tanimpo	Una una	Tojo Una Una	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1391	BTN Kep. Togean	Siatu	Batudaka	Tojo Una Una	2022
1392	BTN Kep. Togean	Salinggoha	Walea Besar	Tojo Una Una	2022
1393	BTN Kep. Togean	Dolong A	Walea Kepulauan	Tojo Una Una	2022
1394	BTN Kep. Togean	Biga	Walea Besar	Tojo Una Una	2022
1395	BTN Kep. Togean	Urulepe	Togean	Tojo Una Una	2022
1396	BTN Kep. Togean	Tobil	Togean	Tojo Una Una	2022
1397	BTN Kep. Togean	Katupat	Togean	Tojo Una Una	2022
1398	BTN Kep. Togean	Bangkagi	Togean	Tojo Una Una	2022
1399	BTN Kep. Togean	Awo	Togean	Tojo Una Una	2022
1400	BTN Kep. Togean	Kalia	Talatako	Tojo Una Una	2022
1401	BTN Kep. Togean	Pautu	Talatako	Tojo Una Una	2022
1402	BTN Kep. Togean	Kololio	Togean	Tojo Una Una	2022
1403	BTN Kep. Togean	Dolong B	Walea Kepulauan	Tojo Una Una	2022
1404	BTN Kep. Togean	Pasokan	Walea Besar	Tojo Una Una	2022
1405	BTN Kep. Togean	Kondongan	Walea Besar	Tojo Una Una	2022
1406	BKSDA Sulawesi Utara	Maleo	Paguat	Pahuwato	2022
1407	BTN Boganinani Wartabone	Ayong	Sang Tombolang	Bolaang Mongondow	2022
1408	BTN Boganinani Wartabone	Imandi	Dumoga Timur	Bolaang Mongondow	2022
1409	BTN Boganinani Wartabone	Pusian Barat	Dumoga	Bolaang Mongondow	2022
1410	BTN Boganinani Wartabone	Werdhi Agung Timur	Dumoga Tengah	Bolaang Mongondow	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1411	BTN Boganinani Wartabone	Lolanan	Sang Tombolang	Bolaang Mongondow	2022
1412	BTN Boganinani Wartabone	Toraut	Dumoga Barat	Bolaang Mongondow	2022
1413	BTN Boganinani Wartabone	Konarom Utara	Dumoga Tenggara	Bolaang Mongondow	2022
1414	BTN Boganinani Wartabone	Pusian Selatan	Dumoga	Bolaang Mongondow	2022
1415	BTN Boganinani Wartabone	Botuliodu	Tomini	Bolaang Mongondow Selatan	2022
1416	BTN Boganinani Wartabone	Maelang	Sang Tombolang	Bolaang Mongondow	2022
1417	BTN Boganinani Wartabone	Suka Makmur	Bulango Ulu	Bone Bolango	2022
1418	BTN Boganinani Wartabone	Pilolaheya	Bulango Ulu	Bone Bolango	2022
1419	BTN Boganinani Wartabone	Tinemba	Suwawa Timur	Bone Bolango	2022
1420	BTN Boganinani Wartabone	Tulabolo Timur	Suwawa Timur	Bone Bolango	2022
1421	BTN Boganinani Wartabone	Konarom Barat	Dumoga Tenggara	Bolaang Mongondow	2022
1422	BTN Boganinani Wartabone	Ikhwan	Dumoga Barat	Bolaang Mongondow	2022
1423	BTN Boganinani Wartabone	Permata	Bone	Bone Bolango	2022
1424	BTN Boganinani Wartabone	Pinogu	Pinogu	Bone Bolango	2022
1425	BTN Bunaken	Arakan	Tatapaan	Minahasa Selatan	2022
1426	BTN Bunaken	Pungkol	Tatapaan	Minahasa Selatan	2022
1427	BTN Bunaken	Popareng	Tatapaan	Minahasa Selatan	2022
1428	BTN Bunaken	Poopoh	Tombariri	Minahasa	2022
1429	BTN Bunaken	Pinasungkulan	Tombariri	Minahasa	2022
1430	BTN Bunaken	Raprap	Tatapaan	Minahasa Selatan	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1431	BTN Bunaken	Alung Banua	Bunaken Kepulauan	Kota Manado	2022
1432	BTN Bunaken	Wawontulap	Tatapaan	Minahasa Selatan	2022
1433	BKSDA Sulawesi Tenggara	Lambang	Kolono Timur	Konawe Selatan	2022
1434	BKSDA Sulawesi Tenggara	Langkoroni	Maligano	Muna	2022
1435	BKSDA Sulawesi Tenggara	Maligano	Maligano	Muna	2022
1436	BKSDA Sulawesi Tenggara	Rante Gola	Bonegunu	Buton Utara	2022
1437	BKSDA Sulawesi Tenggara	Sarandua	Kolono Timur	Konawe Selatan	2022
1438	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tambeanga	Laonti	Konawe Selatan	2022
1439	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tambolosu	Laonti	Konawe Selatan	2022
1440	BKSDA Sulawesi Tenggara	Tapunopaka	Lasolo Kepulauan	Konawe Utara	2022
1441	BKSDA Sulawesi Tenggara	Waoleona	Lasalimu	Buton	2022
1442	BKSDA Sulawesi Tenggara	Konaweha	Samaturu	Kolaka	2022
1443	BTN Rawa Aopa Watumohai	Onemanu	Lambandia	Kolaka Timur	2022
1444	BTN Rawa Aopa Watumohai	Bou	Lambandia	Kolaka Timur	2022
1445	BTN Rawa Aopa Watumohai	Iwoikondo	Loea	Kolaka Timur	2022
1446	BTN Rawa Aopa Watumohai	Wungguloko	Ladongi	Kolaka Timur	2022
1447	BTN Rawa Aopa Watumohai	Mataiwoi	Onembute	Konawe	2022
1448	BTN Rawa Aopa Watumohai	Ahuawali	Puriala	Konawe	2022
1449	BTN Rawa Aopa Watumohai	Padaleu	Lalembu	Konawe Selatan	2022
1450	BTN Rawa Aopa Watumohai	Tinabite	Lantari Jaya	Bombana	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1451	BTN Rawa Aopa Watumohai	Unggulino	Puriala	Konawe	2022
1452	BTN Rawa Aopa Watumohai	Puulipu	Angata	Konawe Selatan	2022
1453	BTN Rawa Aopa Watumohai	Roraya	Tinanggea	Konawe Selatan	2022
1454	BTN Wakatobi	Mandati III	Wangi-wangi Selatan	Wakatobi	2022
1455	BTN Wakatobi	Mandati I	Wangi-wangi Selatan	Wakatobi	2022
1456	BTN Wakatobi	Popalia	Togo Binongko	Wakatobi	2022
1457	BTN Wakatobi	Sowa	Togo Binongko	Wakatobi	2022
1458	BTN Wakatobi	Wali	Binongko	Wakatobi	2022
1459	BKSDA Maluku	Adaut	Selaru	Kepulauan Tanimbar	2022
1460	BKSDA Maluku	Kailolo	Pulau Haruku	Maluku Tengah	2022
1461	BKSDA Maluku	Algadang	Aru Tengah	Kepulauan Aru	2022
1462	BKSDA Maluku	Panamboang	Bacan Selatan	Halmahera Selatan	2022
1463	BKSDA Maluku	Tabangame	Bacan Timur	Halmahera Selatan	2022
1464	BKSDA Maluku	Warbal	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	2022
1465	BKSDA Maluku	Ur Pulau	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	2022
1466	BKSDA Maluku	Ohoisomlain	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	2022
1467	BKSDA Maluku	Ohoidertutu	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	2022
1468	BKSDA Maluku	Ohoiren	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	2022
1469	BKSDA Maluku	Ohoi Madwaer	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	2022
1470	BKSDA Maluku	Ohoidertom	Kei Kecil Barat	Maluku Tenggara	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1471	BTN Aketajawe Lolobata	Tabanalow	Wasile Selatan	Halmahera Timur	2022
1472	BTN Aketajawe Lolobata	Rioribati	Jailolo Selatan	Halmahera Barat	2022
1473	BTN Manusela	Air Besar	Seram Utara	Maluku Tengah	2022
1474	BTN Manusela	Elemata	Seram Utara	Maluku Tengah	2022
1475	BTN Manusela	Pasahari	Seram Utara	Maluku Tengah	2022
1476	BTN Manusela	Saunulu	Tehoru	Maluku Tengah	2022
1477	BTN Manusela	Yaputih	Tehoru	Maluku Tengah	2022
1478	BTN Manusela	Hatumete	Tehoru	Maluku Tengah	2022
1479	BBKSDA Papua Barat	Giwu	Klaurung	Kota Sorong	2022
1480	BBKSDA Papua Barat	Srahwata	Klaurung	Kota Sorong	2022
1481	BBKSDA Papua Barat	Lusiperi	Fak-fak	Fak fak	2022
1482	BBKSDA Papua Barat	Gewerpe	Fak-fak	Fak fak	2022
1483	BBKSDA Papua Barat	Mananmur	Kayauni	Fak fak	2022
1484	BBKSDA Papua Barat	Kaironi	Sidey	Manokwari	2022
1485	BBKSDA Papua Barat	Sidey	Sidey	Manokwari	2022
1486	BBKSDA Papua Barat	Ibe	Fef	Tambrauw	2022
1487	BBKSDA Papua Barat	Ayapokiar	Miyah	Tambrauw	2022
1488	BBKSDA Papua Barat	Tabamsere	Miyah	Tambrauw	2022
1489	BBKSDA Papua Barat	Siakwa	Miyah	Tambrauw	2022
1490	BBKSDA Papua	Hamadi	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	2022



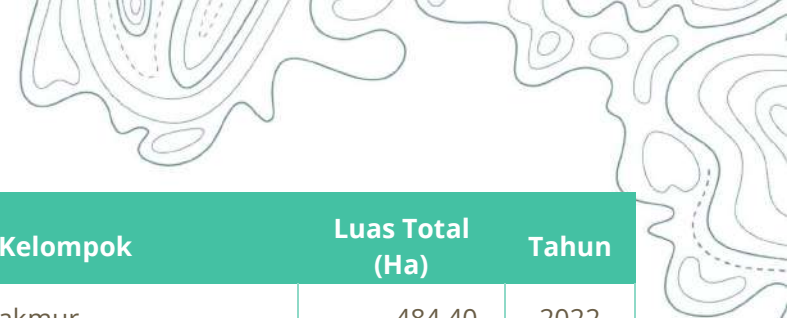
No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1491	BBKSDA Papua	Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura	2022
1492	BBKSDA Papua	Nafri	Abepura	Kota Jayapura	2022
1493	BBKSDA Papua	Nifasi	Makimi	Nabire	2022
1494	BBKSDA Papua	Waibron	Sentani Barat	Jayapura	2022
1495	BBKSDA Papua	Waan	Muting	Merauke	2022
1496	BBKSDA Papua	Kolam	Muting	Merauke	2022
1497	BBKSDA Papua	Selil	Ulilin	Merauke	2022
1498	BBKSDA Papua	Boha	Muting	Merauke	2022
1499	BBKSDA Papua	Barawai	Raimbawi	Kepulauan Yapen	2022
1500	BBKSDA Papua	Makimi	Makimi	Nabire	2022
1501	BBKSDA Papua	Sewenui	Raimbawi	Kepulauan Yapen	2022
1502	BBKSDA Papua	Maribu	Sentani Barat	Jayapura	2022
1503	BBKSDA Papua	Entrop	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	2022
1504	BBKSDA Papua	Enggros	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	2022
1505	BBKSDA Papua	Kaisa	Animha	Merauke	2022
1506	BBKSDA Papua	Pachas	Muting	Merauke	2022
1507	BBKSDA Papua	Kindiki	Ulilin	Merauke	2022
1508	BBKSDA Papua	Manwai Bob	Muting	Merauke	2022
1509	BBKSDA Papua	Wasani	Warsa	Biak Numfor	2022
1510	BBKSDA Papua	Marsram	Supiori Timur	Supiori	2022



No	UPT	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Tahun Pelaporan
1511	BBKSDA Papua	Hanyaan	Jayapura Selatan	Kota Jayapura	2022
1512	BBTN Kerinci Seblat	Sungai Lisai	Pinang Belapis	Lebong	2022
1513	BBTN Kerinci Seblat	Lubuk Pinang	Lubuk Pinang	Muko muko	2022
1514	BBKSDA Riau	Batu Sanggan	Kampar Kiri Hulu	Kampar	2022
1515	BBKSDA Riau	Muaro Bio	Kampar Kiri Hulu	Kampar	2022
1516	BBKSDA Riau	Terusan	Kampar Kiri Hulu	Kampar	2022
1517	BBKSDA Riau	Sungai Guntung Tengah	Rengat	Indragiri Hulu	2022
1518	BBKSDA Riau	Pangkalan Indarung	Singingi	Kuantan Singingi	2022
1519	BBKSDA Riau	Pulaupadang	Singingi	Kuantan Singingi	2022
1520	BBKSDA Riau	Kampung Pulau	Rengat	Indragiri Hulu	2022
1521	BTN Komodo	Golo Mori	Komodo	Manggarai Barat	2022
1523	BTN Gunung Ciremai / BBKSDA Jawa Barat	Linggarjati	Cilimus	Kuningan	2020 / 2022
1524	BKSDA Sulawesi Utara / BTN Bunaken	Teling	Tombariri	Minahasa	2020 / 2022
1525	BBTN Gunung Gede Pangrango / BBKSDA Jawa Barat	Ciloto	Cipanas	Cianjur	2021 / 2022

Lampiran 4. Daftar Kelompok Kemitraan Konservasi Akses HHBK s/d 2022

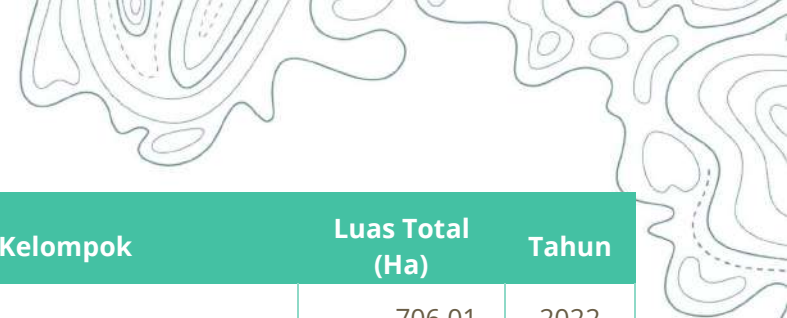
No	Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi	Pengelola	Nama Kelompok	Luas Total (Ha)	Tahun
1	Simalegi, Siberut Barat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat	BTN Siberut	KTH Simalegi Tengah	200,00	2022
2	Simatalu, Siberut Barat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat	BTN Siberut	KTH Manau Simalibbeg	200,00	2022
3	Simalegi, Siberut Barat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat	BTN Siberut	KTH Betaet Simaeruk	300,00	2022
4	Simatalu, Siberut Barat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat	BTN Siberut	KTH Ailiakenen	300,00	2022
5	Sebangau Jaya, Katingan Kuala, Katingan, Kalimantan Tengah	BTN Sebangau	Kelompok Nelayan Kerja Bersama	1.157,89	2022
6	Paduran Sebangau, Sebangau Kuala, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	BTN Sebangau	Kelompok Nelayan Putra Muara Pangkoh Sebangau	232,48	2022
7	Kereng Bangkirai, Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	BTN Sebangau	Kelompok Nelayan Tangkap Tradisional Kereng Permai	690,79	2022
8	Kereng Bangkirai, Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	BTN Sebangau	Kelompok Nelayan Bakung Permai	1.567,02	2022
9	Paduran Sebangau, Sebangau Kuala, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	BTN Sebangau	Kelompok Nelayan Paduran Sebangau Makmur	408,86	2022
10	Sebangau Permai, Sebangau Kuala, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	BTN Sebangau	Kelompok Nelayan Perikanan Alam Paduran Permai	139,35	2022
11	Habaring Hurung, Bukit Batu, Palangka Raya, Kalimantan Tengah	BTN Sebangau	Kelompok Habaring Hurung Lestari	42,88	2022



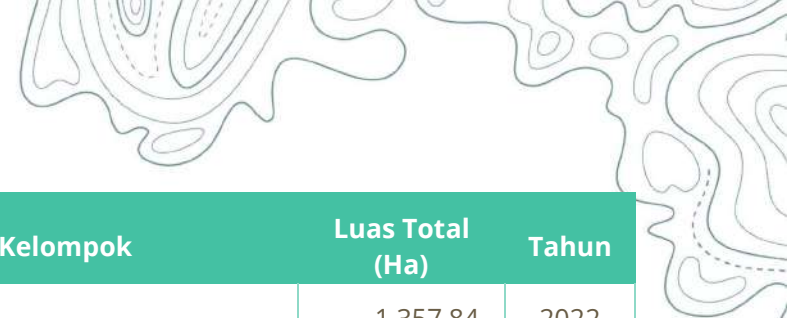
No	Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi	Pengelola	Nama Kelompok	Luas Total (Ha)	Tahun
12	Kawa, Seram Barat, Seram Barat, Maluku	BKSDA Maluku	Pokmas Nelayan Makmur	484,40	2022
13	Piru, Seram Barat, Seram Bagian Barat, Maluku	BKSDA Maluku	Pokmas Mitra Tanela Sejahtera	50,00	2022
14	Kawa, Seram Barat, Seram Barat, Maluku	BKSDA Maluku	Pokmas Nusa Patan	150,00	2022
15	Rioribati, Jailolo Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara	BTN Aketajawe Lolobata	KTH Ake Kapita	67,00	2022
16	Tabanalow, Wasile Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara	BTN Aketajawe Lolobata	KTH Makatanoan Mandiri	29,00	2022
17	Tarupa, Taka Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan	BTN Taka Bonerate	Pokmas Nelayan Ngajagaan Garas Timbo	305,00	2022
18	Sowa, Togo Binongko, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Kelompok Kemitraan Konservasi Barangko To Oha	1.340,00	2022
19	Popalia, Togo Binongko, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Kelompok Kemitraan Konservasi Fungka Dalima	1.454,00	2022
20	Kambata Wundut, Lewa, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	KTH Mamohung	7,59	2022
21	Cibedug, Ciawi, Bogor, Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Ciaul Maju Bersama	16,66	2022
22	Cihanyawar, Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Kuta Lestari	41,81	2022
23	Tangkil, Caringin, Bogor, Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Putra Batong Pangrango	19,19	2022



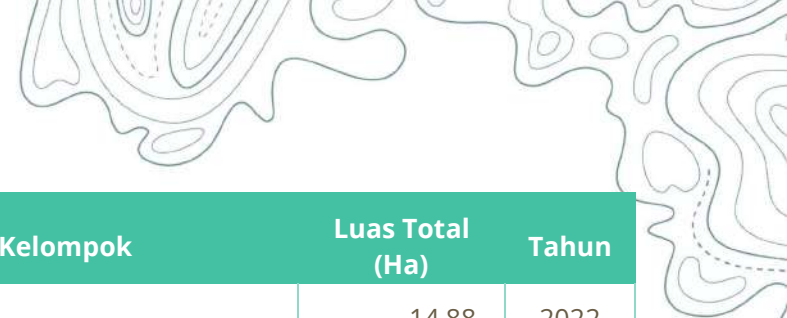
No	Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi	Pengelola	Nama Kelompok	Luas Total (Ha)	Tahun
24	GINANJAR, CIAMBAR, SUKABUMI, JAWA BARAT	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Harapan Maju	43,22	2022
25	CIHANYAWAR, NAGRAK, SUKABUMI, JAWA BARAT	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Tunas Harapan	12,15	2022
26	AMBARJAYA, CIAMBAR, SUKABUMI, JAWA BARAT	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Karya Tani	38,53	2022
27	BABAKAN PANJANG, NAGRAK, SUKABUMI, JAWA BARAT	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Mandiri Cikawung	11,81	2022
28	PEKON SUMUR JAYA, PESISIR BARAT, PESISIR BARAT, LAMPUNG	BBTN Bukit Barisan Selatan	KTH Kubu Gedung Jaya Lestari	46,30	2022
29	PEKON KUBU PERAHU, BALIK BUKIT, LAMPUNG, LAMPUNG	BBTN Bukit Barisan Selatan	KTH Cinta Damai	82,00	2022
30	PULAU PANGGANG, KEPULAUAN SERIBU UTARA, ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA	BTN Kepulauan Seribu	Pokmas Smiling Coral Indonesia	10,03	2022
31	LONGAT, PENYABUNGAN BARAT, MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA	BTN Batang Gadis	KTH Sipipisan Na Lampas	33,20	2022
32	PAGAR GUNUNG, KOTANOPAN, MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA	BTN Batang Gadis	KTH Aek Pagur	26,26	2022
33	SIMPANG BANYAK JAE, ULU PUNGKUT, MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA	BTN Batang Gadis	KTH Bersama Majuh	20,08	2022
34	PASTAP JULU, TAMBANGAN, MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA	BTN Batang Gadis	KTH Aek Tombang	33,58	2022
35	PAL VIII, BERMANI ULU RAYA, REJANG LEBONG, BENGKULU	BBTN Kerinci Seblat	KT Karya Utama	63,00	2022



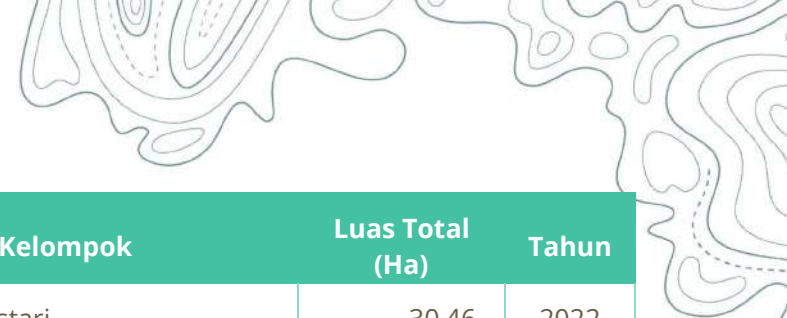
No	Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi	Pengelola	Nama Kelompok	Luas Total (Ha)	Tahun
36	Lewuto, Kaledupa, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Pokmas Lewuto	706,01	2022
37	Tanomeha, Kaledupa, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Pokmas Sikadangpaan Sama	951,00	2022
38	Unggulino, Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara	BTN Rawa Aopa Watumohai	KN Hulo'a	100,00	2022
39	Roraya, Tinanggea, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	BTN Rawa Aopa Watumohai	KN Tanjung Roraya	100,00	2022
40	Puulipu, Angata, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	BTN Rawa Aopa Watumohai	KN Masagena	100,00	2022
41	Sukau Datang, Pelabai, Lebong, Bengkulu	BBTN Kerinci Seblat	KT Mergo Belimau	26,74	2022
42	Sebelat Ulu, Pinang Berlapis, Lebong, Bengkulu	BBTN Kerinci Seblat	KT Keliling Tebo	21,76	2022
43	Biga, Walea Besar, Tojo Una Una, Sulawesi Tengah	BTN Kepulauan Togean	KN Jaya Mandiri	2.881,80	2022
44	Kondongan, Walea Besar, Tojo Una Una, Sulawesi Tengah	BTN Kepulauan Togean	Kelompok Usaha Baru	2.136,11	2022
45	Salinggoha, Walea Besar, Tojo Una Una, Sulawesi Tengah	BTN Kepulauan Togean	Kelompok Fajar Baru	2.356,84	2022
46	Negeri Kaloa, Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku	BTN Manusela	KT Getah Damar Tunupela	659,04	2022
47	Sani-Sani, Samaturu, Kolaka, Sulawesi Tenggara	BKSDA Sulawesi Tenggara	KN Pada Idi Pada Elo	500,00	2022



No	Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi	Pengelola	Nama Kelompok	Luas Total (Ha)	Tahun
48	Tanjung Pude, Una Una, Tojo Una Una, Sulawesi Tengah	BTN Kepulauan Togean	KN Malalubis	1.357,84	2022
49	Tanjung Pude, Una Una, Tojo Una Una, Sulawesi Tengah	BTN Kepulauan Togean	KN Sunu	391,85	2022
50	Cinagara, Caringin, Bogor, Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Jagakarsa Gede Pangrango	33,61	2022
51	Watesjaya, Cigombong, Bogor, Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Konservasi Lengkong	8,70	2022
52	Wangunjaya, Ciambar, Sukabumi, Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Putra Gunung Gede Pangrango	41,28	2022
53	Basir Buncir, Caringin, Bogor, Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Wangun Jaya	20,80	2022
54	Sukagalih, Megamendung, Bogor, Jawa Barat	BBTN Gunung Gede Pangrango	KTH Lembah Jari	23,36	2022
55	Gunung Sembilan, Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat	BTN Gunung Palung	Kelompok Kemitraan Tiang Jorong	202,98	2022
56	Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat	BTN Gunung Palung	Kelompok Kemitraan Usaha Maju Bersama	175,93	2022
57	Bogorejo, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Wana Karya E	33,30	2022
58	Bogorejo, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Wana Karya F	21,05	2022
59	Bogorejo, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Wana Karya G	10,82	2022



No	Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi	Pengelola	Nama Kelompok	Luas Total (Ha)	Tahun
60	Bogorejo, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Wana Karya K	14,88	2022
61	Bogorejo, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Wana Karya L	21,49	2022
62	Bogorejo, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Wana Karya N	43,40	2022
63	Bogorejo, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Wana Karya O	53,66	2022
64	Bogorejo, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Wana Karya Maju Jaya	34,32	2022
65	Padang Cermin, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Sinar Gunung Lestari I	39,05	2022
66	Padang Cermin, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Sinar Gunung Lestari II	50,57	2022
67	Padang Cermin, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Sinar Gunung Lestari III	42,41	2022
68	Dantar, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Sinar Harapan Lestari	47,86	2022
69	Dantar, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Marga Rindu Lestari	27,88	2022
70	Dantar, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Mekar Sari Lestari	65,07	2022
71	Dantar, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Sinar Baru Lestari	70,03	2022



No	Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi	Pengelola	Nama Kelompok	Luas Total (Ha)	Tahun
72	Dantar, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Sri Menanti Lestari	30,46	2022
73	Dantar, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung	UPTD Tahura Wan Abdul Rachman	KTH Cikumbun Lestari	52,59	2022
74	Tetebatu, Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	BTN Gunung Rinjani	Pokmas Tetebatu	160,00	2022
75	Tambea, Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara	BKSDA Sulawesi Tenggara	KN Sejahtera Bersama	1.000,00	2022
76	Long Ketaman, Pujungan, Malinau, Kalimantan Utara	BTN Kayan Mentarang	Pokmas Femong Tavai	4.318,25	2022
77	Liya Mawi, Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Pokmas Lakantara	17,33	2022
78	Liya Mawi, Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Pokmas Lagundi	28,20	2022
79	Liya One Melangka, Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Pokmas Satu Hati	18,15	2022
80	Liya Togo, Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Pokmas Sumber Agar	5,11	2022
81	Liya One Melangka, Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Pokmas Tunas Mekar	18,97	2022
82	Liya Bahari Indah, Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Pokmas Mekar Jaya	6,19	2022
83	Waitii Barat, Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Pokmas Wa Parahuu	840,32	2022



No	Desa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi	Pengelola	Nama Kelompok	Luas Total (Ha)	Tahun
84	Waitii, Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	BTN Wakatobi	Pokmas Mangro Jaya	65,52	2022
85	Tapunopaka, Lasolo Kepulauan, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara	BKSDA Sulawesi Tenggara	KTH Padarua	500,00	2022
86	Timampu, Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulawesi Selatan	KN Timampu Jaya	5.780,98	2022
87	Pekaloea, Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulawesi Selatan	KN Matompa	10.243,20	2022
88	Tokalimbo, Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulawesi Selatan	KN Danau Lestari Towuti	6,827,62	2022
89	Loeha, Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulawesi Selatan	KN Buttini Loeha	5.579,68	2022
90	Bantilang, Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan	BBKSDA Sulawesi Selatan	Kelompok Kemkon Bantilang Permai	6.420,34	2022
91	Negeri Elemata, Seram Utara, Maluku Tengah, Maluku	BTN Manusela	KT Getah Damar Mata Kaki Hari Negeri Elemata	393,90	2022
92	Pautu, Talatako, Tojo Una Una, Sulawesi Tengah	BTN Kepulauan Togean	KN Simpati Laut	330,49	2022
93	Tobil, Togean, Tojo Una Una, Sulawesi Tengah	BTN Kepulauan Togean	KT Sugar Super	75,54	2022
94	Kampung Yaur, Distrik Yaur, Nabire, Papua	BBTN Teluk Cenderawasih	Kelompok Wisata Sinar Nuhraggi	5.042,00	2022
TOTAL				70.750,36	

Lampiran 5, Luas Penanganan Konflik Tenurial dan Kegiatan Terbangun Tahun 2022 berdasarkan tahapan

UPT	Luas Capaian Tahun 2022 (Ha), berdasarkan proses:						Hitung Capaian
	Inventarisasi oleh UPT	Telaah dan Validasi oleh Pusat	SK Menteri	Verifikasi Teknis	Clearance	Persetujuan Penyelesaian oleh Menteri	
	263.357,80	149.154,95	13.074,56	1.021,83	1.021,83	-	283.963,79
BBKSDA JAWA BARAT	2.092,40	1.135,26					2.092,40
BBKSDA JAWA TIMUR		0,59					0,59
BBKSDA NTT	116,60						116,60
BBKSDA PAPUA	363,70	79,58					363,70
BBKSDA PAPUA BARAT	133,40						133,40
BBKSDA RIAU		846,23	535,37				846,23
BBKSDA SULAWESI SELATAN	5.005,00	301,50					5.005,00
BBKSDA SUMATERA UTARA	5.031,94	3.829,10	2.855,03				5.031,94
BBTN BROMO TENGGER SEMERU	0,46	0,46					0,46
BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	13.540,65	9.403,65					13.540,65
BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	21,27	0,77					21,27
BBTN GUNUNG LEUSER	1.610,08	376,04					1.610,08
BBTN KERINCI SEBLAT	9.452,40	2.565,21	825,99				9.452,40
BBTN LORE LINDU		599,79					599,79
BKSDA BALI	119,88						119,88
BKSDA BENGKULU-LAMPUNG	8.758,39	1.311,40					8.758,39
BKSDA D.I. YOGYAKARTA		9,82					9,82
BKSDA DKI JAKARTA		0,34					0,34
BKSDA JAMBI	1.835,05	348,96	600,00				1.835,05
BKSDA JAWA TENGAH	96,90	96,95					96,90
BKSDA KALIMANTAN BARAT	134,88						134,88
BKSDA KALIMANTAN SELATAN		5.656,66	222,00				5.656,66
BKSDA KALIMANTAN TENGAH	11.085,80	8.641,33	216,00				11.085,80
BKSDA KALIMANTAN TIMUR	46.960,70	772,54					46.960,70
BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	3.750,08	3.749,08					3.750,08
BKSDA SULAWESI TENGAH	1.520,20	66,00	66,00				1.520,20
BKSDA SULAWESI TENGGARA	444,00						444,00
BKSDA SULAWESI UTARA	2.724,38	2.437,89					2.724,38
BKSDA SUMATERA BARAT	8,68	8,65					8,68
BKSDA SUMATERA SELATAN	38.928,33	9.090,53	4.580,00				38.928,33
BTN AKETAJAWE LOLOBATA	28,78	28,78					28,78
BTN ALAS PURWO		2.061,10					2.061,10
BTN BALI BARAT	1,40	1,40					1,40
BTN BALURAN	113,70	113,72					113,70
BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG		94,63					94,63
BTN BATANG GADIS	5.599,69						5.599,69
BTN BERBAK DAN SEMBILANG	3.004,99						3.004,99
BTN BOGANI NANI WARTABONE	3,40	3,45					3,40
BTN BUKIT 12	20,70	20,69					20,70
BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	224,50	224,50					224,50
BTN BUKIT TIGA PULUH		150,00					150,00
BTN BUNAKEN	1,84	1,84	1,84				1,84
BTN GUNUNG CIREMAI	28,10	28,07					28,10
BTN GUNUNG HALIMUN SALAK	6.419,68	1.021,83	1.021,83	1.021,83	1.021,83		6.419,68
BTN GUNUNG MERAPI	1.430,07	0,14					1.430,07
BTN GUNUNG MERBABU	60,00						60,00
BTN GUNUNG PALUNG	24,00	24,01					24,00
BTN GUNUNG RINJANI	385,80	388,09					385,80
BTN KARIMUN JAWA	21,50	8,47					21,50
BTN KAYAN MENTARANG	199,30	199,31					199,30
BTN KELIMUTU	24,10	41,01					24,10
BTN KEPULAUAN SERIBU	0,10	0,10					0,10
BTN KEPULAUAN TOGEAN	14,00	14,02					14,00
BTN KOMODO	313,40	313,39					313,40
BTN KUTAI	8.540,00	2.350,71					8.540,00
BTN LORENTZ	1.436,90	1.436,95					1.436,90
BTN MANUSELA		71,17					71,17
BTN MATALAWA		735,65					735,65
BTN MERU BETIRI	3.639,81	1.860,59					3.639,81
BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	3.973,60	2.209,35					3.973,60
BTN SEBANGAU	48.630,74	48.556,25					48.630,74
BTN SIBERUT	6,70	6,70					6,70
BTN TAKA BONERATE	0,90	0,85					0,90
BTN TANJUNG PUTING	89,10	89,10					89,10
BTN TESSO NILO		10.380,00	2.150,50				10.380,00
BTN UJUNG KULON	1.370,40	1.368,80					1.370,40
BTN WAKATOBİ	19,20	25,74					19,20
BTN WASUR	23.961,24	23.961,24					23.961,24
BTN WAY KAMBAS	35,00	35,00					35,00

Lampiran 6. Daftar Subyek dan Obyek yang Telah Terdaftar dalam SK Menteri LHK tentang Penetapan Data dan Informasi

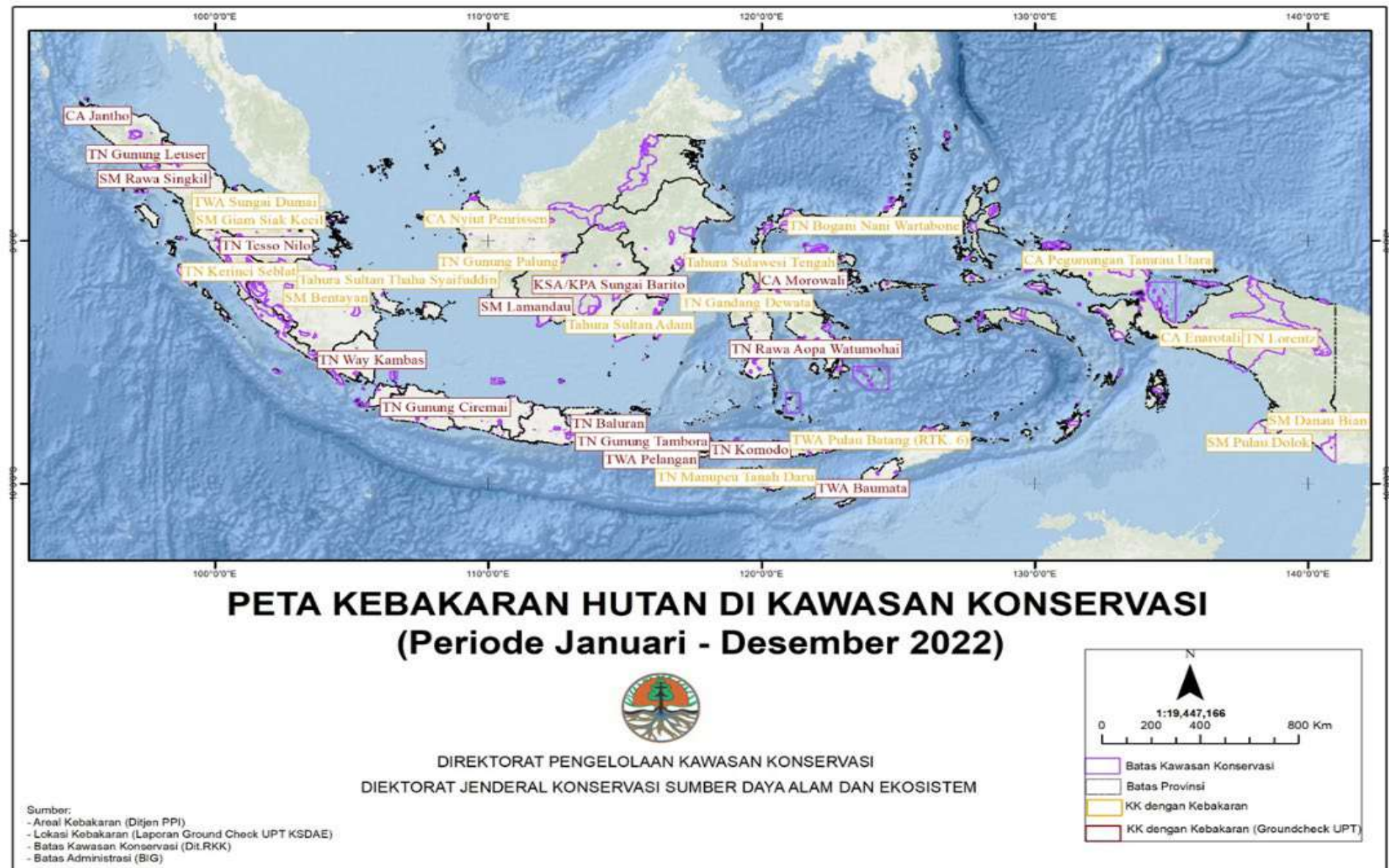
Tahap	Nomor SK	Subyek Terdaftar	Subyek di HK	Luas di HK	Jumlah UPT	Jumlah Unit KK	UPT	Unit Kawasan Konservasi	Subyek Hukum/	Kegiatan Terbangun	Luas (Ha)	Catatan Progres
I	SK.359/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2021 tanggal 29 Juni 2021	51	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
II	SK.531/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021	313	53	71,9	3	3	BTN Bunaken	TN Bunaken	5 Subyek Korporasi	Sarpras Wisata	7,8	Menunggu proses verifikasi teknis.
									2 Subyek Perorangan	Sarpras Wisata	7,5	Menunggu proses verifikasi teknis.
									15 Subyek Pemerintah	Fasos Fasum	2,6	Menunggu proses verifikasi teknis.
							?	Hutan Konservasi (Kalsel)	PT. Gemilang Abadi Sejahtera	Kebun Sawit	54,0	Perlu dicek dan klarifikasi. Diduga berada di THR Sultan Adam.
							BKSDA Jambi	CA Bukit Tambi	PT. Citra Koperasindo Tabi	Kebun Sawit	600,0	Proses Perhitungan Denda oleh Pokja V
III	SK.1217/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2021 tanggal 10 Desember 2021	140	5	4.356,0	3	5	BKSDA Sumatera Selatan	SM Dangku	PT. Berkas Sawit Sejati	Kebun Sawit	1.547,0	Proses Pokja V
								KSA/KPA	PT. Berkas Sawit Mas	Kebun Sawit	2.521,0	Perlu dicek dan klarifikasi.
							BKSDA Kalimantan Selatan	KSA/KPA	PT. Inti Gerak Maju	Kebun Sawit	209,0	Perlu dicek dan klarifikasi.
								KSA/KPA	PT. Saijan BL	Kebun Sawit	13,0	Perlu dicek dan klarifikasi.
							BKSDA Sulawesi Tengah	TB Landusa Tomata	PT. Sinergi Perkebunan Nusantara	Kebun Sawit	66,0	Proses Pokja V
IV	SK.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2022 tanggal 21 Januari 2022	208	1	???	1	1	UPTD THR	THR Bukit Soeharto	Kepala Ds. Karya Jaya	Kebun Sawit	???	Perlu dicek.
V	SK.298/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2022 tanggal 7 April 2022	157	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	SK.652/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2022 tanggal 1 Juli 2022	161	54	3.146,9	7	8	BKSDA Sulawesi Tenggara	Hutan Konservasi (Sultra)	PT. Bumi Buton Delta Megah	Pertambangan	3,0	Perlu dicek. Diduga di SM Lambusango
							BTN Gunung Halimun Salak	TN G. Halimun Salak	15 KTH	Lahan Garapan	1.021,8	Proses persetujuan Menteri.
							BBTN Kerinci Seblat	TN Kerinci Seblat	29 KTH	Lahan Garapan	826,0	Menunggu proses verifikasi teknis.
							BKSDA Sumatera Selatan	TN Gunung Maras	1 KTH	Lahan Garapan	104,8	Menunggu proses verifikasi teknis.
								SM Padang Sugihan	3 KTH	Lahan Garapan	282,6	Menunggu proses verifikasi teknis.
							UPTD THR	THR Bukit Soeharto	2 KTH	Kebun Sawit	558	Menunggu proses verifikasi teknis.
							BBKSDA Sumatera Utara	SM Karang Gading LTL	KTH Maju Bersama	Lahan Garapan	90,7	Menunggu proses verifikasi teknis.
								Koperasi Sinar Tani Makmur	Kebun Sawit	260,0	Menunggu proses verifikasi teknis.	
							BKSDA Kalimantan Selatan	Hutan Konservasi (Tanah Bumbu)	Kelompok Barealaan Saadanya	Lahan Garapan	???	Perlu dicek. Diduga di CA Kelautku
VII	SK.787/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022	162	4	2.609,8	4	4	BBKSDA Sumatera Utara	SM Karang Gading LTL	Kelompok Tani Hutan Mardesa	Kebun Sawit	2.256,0	Proses kelengkapan berkas.
							BKSDA Kalimantan Tengah	KSA/KPA Tanjung Malatayur	PT. Bahaur Eka Sawit Tama	Kebun Sawit	216,0	Proses kelengkapan berkas.
							UPTD THR	Hutan Konservasi (Ds. Kotogaro)	Elyias Meroun Hutahaen	Kebun Sawit	120,0	Perlu dicek. Diduga di THR Sultan Syarif Kasim
							?	Hutan Konservasi (Jambi)	PT. Taramitra	Kebun Sawit	17,8	Perlu dicek dan klarifikasi.
VIII	SK.1077/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022	198	2	1.592,5	2	2	BTN Tesso Nilo	TN Tesso Nilo	Kelompok Tani Berkah	Lahan Garapan	1.324,0	Proses kelengkapan berkas.
							UPTD THR	THR (Riau)	Gapoktan Kampung Halaman dan Harapan Putra Jaya	Kebun Sawit	268,5	Perlu dicek.
IX	SK.1205/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2022 tanggal 30 November 2022	241	8	6.296,7	5	8	BBKSDA Sumatera Utara	Hutan Konservasi (Langkat, Sumut)	PT. Pancasawit Karuniamas	Kebun Sawit	508,3	Perlu dicek. Luasan termasuk HPT. Diduga berada di SM Karang Gading LTL.
								Hutan Konservasi (Ds. Sipagabu, Kab. Toba, Sumut)	Perkumpulan Adat Keturunan Panggopis Raja Gorat	Lahan Garapan	4.000,0	Perlu dicek. Luasan termasuk HL dan HPT. Diduga berada di SM Dolok Surungan.
							BBKSDA Riau	Hutan Konservasi (Bengkalis, Riau)	KT Sawit Buluh Apo Jaya	Kebun Sawit	535,4	Perlu dicek. Luasan termasuk HPT dan HPK. Diduga berada di SM Balai Raja.
								Hutan Konservasi (Riau)	KT Dumai Motor	Kebun Sawit	184,0	Perlu dicek. Luasan termasuk HPK. Diduga berada di TWA Sungai Dumai.
							BTN Tesso Nilo	Hutan Konservasi (Ds. Lubuk Kembang, Riau)	KT Pabalakan	Lahan Garapan	425,0	Perlu dicek. Luasan termasuk HPT. Diduga berada di TN Tesso Nilo.
								TN Tesso Nilo	KT Subur Jaya Desa Segati	Kebun Sawit	401,5	Proses kelengkapan berkas.
							BKSDA Sumatera Selatan	SM Padang Sugihan	KT Pulau Terentang	Kebun Sawit	125,0	Proses kelengkapan berkas. Merupakan eks lahan Jery yang telah divonis PN Banyuasin.
							UPTD THR	Hutan Konservasi (Kaltim)	KSU Mitra Sawit Lestari	Kebun Sawit	117,4	Perlu dicek. Luasan termasuk APL. Diduga berada di THR Bukit Soeharto.

Lampiran 7. Data Evaluasi Kesesuaian Fungsi

No	NAMA UPT	FUNGSI	NAMA KAWASAN	EKF
1	BBKSDA Jawa Barat	CA	CA Gunung Papandayan	Proses
1	BBKSDA Jawa Barat	CA	CA Gunung Papandayan	Proses
2	BBKSDA Jawa Barat	CA	CA Kawah Kamojang	Proses
3	BBKSDA Papua	CA	CA Pegunungan Cycloops	Proses
4	BBKSDA Papua Barat	CA	CA Pulau Misool	Proses
5	BBKSDA Sumatera Utara	CA	CA Sibolangit	Proses
6	BKSDA Jawa Tengah	CA	CA Nusakambangan Timur	Proses
7	BKSDA Kalimantan Barat	CA	CA Karimata	Proses
8	BKSDA Kalimantan Selatan	CA	CA Sungai Lulan dan Sungai Bulan	Proses
9	BKSDA Kalimantan Timur	CA	CA Padang Luwai	Proses
10	BKSDA NTB	CA	CA Toffo Kota Lambu (RTK.67)	Proses
11	BKSDA Sulawesi Tengah	CA	CA Pati Pati	Proses
12	BKSDA Sulawesi Utara	CA	CA Duasudara	Proses
13	BKSDA Sulawesi Utara	CA	CA Gunung Lokon	Proses
14	BBKSDA Jawa Timur	CA	CA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	Selesai
15	BBKSDA Jawa Timur	CA	CA Pulau Sempu	Selesai
16	BBKSDA NTT	CA	CA Gunung Mutis	Selesai
17	BBKSDA Papua Barat	CA	CA Waigeo Barat	Selesai
18	BBKSDA Sumatera Utara	CA	CA Dolok Tinggi Raja	Selesai
19	BKSDA Bengkulu	CA	CA Danau Dusun Besar	Selesai
20	BKSDA Bengkulu	CA	CA Kioyo I dan II	Selesai
21	BKSDA Bengkulu	CA	CA Pulau Anak Krakatau	Selesai
22	BKSDA Jakarta	CA	CA Pulau Bokor	Selesai
23	BKSDA Jawa Tengah	CA	CA Curug Bengkawah	selesai
24	BKSDA Kalimantan Selatan	CA	CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	Selesai
25	BKSDA Maluku	CA	CA Pombo	Selesai
26	BKSDA NTB	CA	CA Pulau Panjang	Selesai
27	BKSDA Kalimantan Tengah	CA/TWA	TWA Bukit Tangkiling	Proses
28	BBKSDA NTT	KSA/KPA	KSA/KPA Sisimeni Sanam	Proses
29	BBKSDA Papua	KSA/KPA	KSA/KPA Mapia	Proses
30	BBKSDA Papua Barat	KSA/KPA	KSA/KPA Hutan Pendidikan Tuwanwouwi	Proses
31	BBKSDA Riau	KSA/KPA	KSA/KPA Gunung Kijang	Proses
32	BBKSDA Riau	KSA/KPA	KSA/KPA Gunung Lengkuas	Proses
33	BBKSDA Riau	KSA/KPA	KSA/KPA Sungai Pulaui	Proses
34	BBKSDA Sulawesi Selatan	KSA/KPA	KSA/KPA Soping	Proses
35	BBKSDA Sulawesi Selatan	KSA/KPA	KSA/KPA Toraja Utara	Proses
36	BBKSDA Sumatera Utara	KSA/KPA	KSA/KPA Sei Ledong	Proses
37	BBKSDA Sumatera Utara	KSA/KPA	KSA/KPA Lubuk Raya	Proses
38	BKSDA Bengkulu	KSA/KPA	KSA/KPA Rawa Kandis	Proses
39	BKSDA Jambi	KSA/KPA	KSA/KPA Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau Bangko	Proses
40	BKSDA Jambi	KSA/KPA	KSA/KPA Tabir Kejasung / Sungai Bengkal	Proses
41	BKSDA Kalimantan Selatan	KSA/KPA	KSA/KPA Asam Asam	Proses

42	BKSDA Kalimantan Selatan	KSA/KPA	KSA/KPA Pulau Tempurung	Proses
43	BKSDA Kalimantan Tengah	KSA/KPA	KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG II)	Proses
44	BKSDA Kalimantan Tengah	KSA/KPA	KSA/KPA Tanjung Malatayur	Proses
45	BKSDA Kalimantan Tengah	KSA/KPA	KSA/KPA Sei Sebangau	Proses
46	BKSDA Kalimantan Tengah	KSA/KPA	KSA/KPA Sungai Barito	Proses
47	BKSDA Kalimantan Tengah	KSA/KPA	KSA/KPA Sungai Kapuas	Proses
48	BKSDA Maluku	KSA/KPA	KSA/KPA Daab	Proses
49	BKSDA Maluku	KSA/KPA	KSA/KPA Gunung Sahuwai	Proses
50	BKSDA Maluku	KSA/KPA	KSA/KPA Pulau Larat	Proses
51	BKSDA Maluku	KSA/KPA	KSA/KPA Sungai Niff	Proses
52	BKSDA Maluku	KSA/KPA	KSA/KPA Tafermaar	Proses
53	BKSDA Maluku	KSA/KPA	KSA/KPA Masbait	Proses
54	BKSDA Maluku	KSA/KPA	KSA/KPA Tobalai	Proses
55	BKSDA NTB	KSA/KPA	KSA/KPA Jereweh (RTK.59)	Proses
56	BKSDA NTB	KSA/KPA	KSA/KPA Danuera	Proses
57	BBKSDA Riau	SM	SM Balai Raja	Proses
58	BBKSDA Riau	SM	SM PLG Sebang	Proses
59	BBKSDA Sumatera Utara	SM	SM Karang Gading Langkat Timur Laut	Proses
60	BKSDA Kalimantan Selatan	SM	SM Pulau Kaget	Proses
61	BBKSDA Papua	SM	SM Memberamo Foja	selesai
62	BBKSDA Papua	SM	SM Pulau Dolok	selesai
63	BKSDA Yogyakarta	SM	SM Sermo	selesai
64	BKSDA Jakarta	SM	SM Muara Angke	Selesai
65	BKSDA Jakarta	SM	SM Pulau Rambut	Selesai
66	BKSDA Bengkulu	TB	TB Gunung Nanua	Selesai
67	BKSDA NTB	TB	TB Pulau Moyo (RTK 58)	Selesai
68	BTN Kepulauan Seribu	TN	TN Kepulauan Seribu	Selesai
69	BTN Wakatobi	TN	TN Wakatobi	Selesai
70	BBKSDA Jawa Barat	TWA	TWA Gunung Guntur	Proses
71	BBKSDA Jawa Barat	TWA	TWA Kawah Kamojang	Proses
72	BBKSDA Jawa Barat	TWA	TWA Gunung Papandayan	Proses
73	BBKSDA Sumatera Utara	TWA	TWA Holiday Resort	Proses
74	BKSDA Bengkulu	TWA	TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai	Proses
75	BBKSDA Jawa Timur	TWA	TWA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	Selesai
76	BBKSDA Sulawesi Selatan	TWA	TWA Malino	Selesai
77	BKSDA Jakarta	TWA	TWA Angke Kapuk	Selesai
78	BKSDA NTB	TWA	TWA Pulau Moyo	Selesai
79	BKSDA NTB	TWA	TWA Pulau Satonda	Selesai
80	Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi	Tahura	Tahura Sultan Thaha Syaifuddin	Proses
81	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tahura	Tahura Nuraksa	Proses

Lampiran 8. Peta Kebakaran Hutan di Kawasan Konservasi





Patroli Ground Check Fire Spot
Tahun 2022

Lampiran 10. Hasil Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Tahun 2022

NO	UPT/UPTD	NAMA KAWASAN	FUNGSI	NILAI 2022
1	2	3	4	5
A BALAI / BALAI BESAR TN				
1	BBTN Gunung Leuser	1 Gunung Leuser	TN	74
2	BBTN Kerinci Seblat	2 Kerinci Seblat	TN	74
3	BBTN Tetung Kerihun & Danau Sentarum	3 Danau Sentarum	TN	81
4	BBTN Teluk Cenderawasih	4 Teluk Cenderawasih	TNL	80
5	BTN Tesso Nilo	5 Tesso Nilo	TN	71
6	BTN Bukit Tiga Puluh	6 Bukit Tiga Puluh	TN	76
7	BTN Berbak dan Sembilang	7 Sembilang	TN	74
8	BTN Ujung Kulon	8 Ujung Kulon	TN	66
9	BTN Kepulauan Seribu	9 Kepulauan Seribu	TNL	79
10	BTN Gunung Halimun Salak	10 Gunung Halimun Salak	TN	73
11	BTN Gunung Merbabu	11 Gunung Merbabu	TN	83
12	BTN Karimun Jawa	12 Karimun Jawa	TNL	76
13	BTN Alas Purwo	13 Alas Purwo	TN	80
14	BTN Gunung Rinjani	14 Gunung Rinjani	TN	80
15	BTN Gunung Tambora	15 Gunung Tambora	TN	74
16	BTN Kayan Mentarang	16 Kayan Mentarang	TN	73
17	BTN Bukit Baka Bukit Raya	17 Bukit Baka Bukit Raya	TN	81
18	BTN Sebangau	18 Sebangau	TN	78
19	BTN Kepulauan Togean	19 Kepulauan Togean	TNL	81
20	BTN Bogani Naniwartabone	20 Bogani Nani Wartabone	TN	81
21	BTN Bunaken	21 Bunaken	TNL	78
22	BTN Matalawa	22 Manupeu Tanah Daru	TN	83
23	BTN Taka Bonerate	23 Taka Bonerate	TNL	88

24	BTN Wakatobi	24	Wakatobi	TNL	86
25	BTN Manusela	25	Manusela	TN	82
26	BTN Lorentz	26	Lorentz	TN	69
B BALAI / BALAI BESAR KSDA					
1 BBKSDA Riau					
		1	Gunung Kijang	KSA/KPA	23
		2	Gunung Lengkuas	KSA/KPA	22
		3	Sungai Pulai	KSA/KPA	23
		4	Balai Raja	SM	54
		5	PLG Sebang	SM	50
		6	Pulau Rempang	TB	60
		7	Zamrud	TN	70
		8	Buluh Cina	TWA	77
		9	Muka Kuning	TWA	72
2 BBKSDA Sumatera Utara					
		1	Batu Gajah	CA	56
		2	Batu Ginurit	CA	43
		3	Lubuk Raya	KSA/KPA	58
		4	Dolok Saut	CA	63
		5	Liang Balik	CA	43
		6	Sei Ledong	KSA/KPA	39
		7	Pulau Pini	TB	39
		8	Dolok Tinggi Raja	TWA	63
		9	Holiday Resort	TWA	60
		10	Sibolangit	TWA	77
		11	Sicike-cike	TWA	71
		12	Sijaba Huta Ginjang	TWA	51
3 BBKSDA Jawa Barat					
		1	Bojong Larang Jayanti	CA	64
		2	Cadas Malang	CA	72
		3	Cibanteng	CA	71

4	Cigenteng Cipanyi	CA	33
5	Gunung Simpang	CA	67
6	Gunung Tangkuban Perahu	CA	68
7	Gunung Tukung Gede	CA	69
8	Junghuhn	CA	42
9	Nusa Gede Panjalu	CA	70
10	Pananjung Pangandaran	CA	71
11	Pulau Dua	CA	69
12	Rawa Danau	CA	69
13	Sukawayana	CA	69
14	Tangkuban Perahu - Pelabuhan Ratu	CA	44
15	Gunung Pancar	TWA	71
16	Gunung Papandayan (Kawah Darajat)	TWA	60
17	Gunung Tampomas	TWA	35
18	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	TWA	78
19	Kamojang	TWA	67
20	Linggarjati	TWA	71
21	Pananjung Pangandaran	TWA	74
22	Talaga Bodas	TWA	70
4 BBKSDA Jawa Timur			
1	Ceding	CA	67
2	Curah Manis Sempolan I-VII	CA	65
3	Gua Nglirip	CA	67
4	Janggangan Rogojampi I	CA	70
5	Janggangan Rogojampi II	CA	74
6	Pancur Ijen I	CA	65
7	Pancur Ijen II	CA	68
8	Pulau Noko	CA	63
9	Pulau Nusa	CA	68

	10	Pulau Sempu	CA	71
	11	Sungai Kolbu Iyang Plateau	CA	74
	12	Watangan Puger	CA	73
	13	Tretes	TWA	71
5 BBKSDA NTT				
	1	Hutan Bakau Maubesi	CA	76
	2	Wae Wuul	CA	58
	3	Wolo Tado	CA	51
	4	Ale Aisio	SM	66
	5	Egon Ilmedo	SM	72
	6	Harlu	SM	69
	7	Dataran Bena	TB	54
	8	Pulau Ndana	TB	43
	9	Bipolo	TWA	53
	10	Manipo	TWA	76
	11	Pulau Lapang	TWA	39
	12	Pulau Rusa	TWA	39
	13	Ruteng	TWA	76
	14	Teluk Kupang	TWA	60
6 BBKSDA Sulawesi Selatan				
	1	Faruhumpenai	CA	75
	2	Kalaena	CA	73
	3	Ponda-ponda	CA	77
	4	Cani Sirenreng	TWA	62
	5	Danau Mahalona	TWA	61
	6	Danau Matano	TWA	67
	7	Danau Towuti	TWA	66
7 BBKSDA Papua				
	1	Biak Utara	CA	57
	2	Enarotali	CA	43
	3	Pegunungan Cycloops	CA	70

	4	Yapen Tengah	CA	55
	5	Pegunungan Jayawijaya	SM	33
	6	Pulau Dolok	SM	49
	7	Pulau Komolon	SM	48
	8	Savan	SM	48
	9	Teluk Youtefa	TWA	57
8 BBKSDA Papua Barat				
	1	Waigeo Timur	CA	75
	2	Waigeo Barat	CA	74
	3	Pegunungan Arfak	CA	59
	4	Pegunungan Fakfak	CA	69
	5	Pegunungan Wondiboy	CA	53
	6	Pulau Batanta Barat	CA	56
	7	Pulau Kofiau	CA	24
	8	Wagura Kote	CA	30
	9	Mubrani - Kaironi	SM	49
	10	Klamono	TWA	68
	11	Sorong	TWA	71
9 BKSDA Aceh				
	1	Hutan Pinus Janthoi	CA	81
	2	Serbojadi	CA	69
	3	Kepulauan Banyak	TWA	72
	4	Kuta Malaka	TWA	49
10 BKSDA Sumatera Barat				
	1	Batang Pangean I	CA	61
	2	Rimbo Panti	CA	64
	3	Barisan	SM	70
	4	Malampah Alahan Panjang	SM	67
	5	Pagai Selatan	SM	45
	6	Air Putih Kelok 9	TWA	57
	7	Mega Mendung	TWA	57
	8	Rimbo Panti	TWA	60

	9	Saibi Sarabua	TWA	49
	10	Singgaling Tandikat	TWA	70
11 BKSDA Jambi				
	1	Sungai Batara	CA	38
	2	Buluh Hitam / Pasir Mayang Danau Bangko	KSA/KPA	40
	3	Tabir Kejasung / Sungai Bengkal	KSA/KPA	46
12 BKSDA Bengkulu dan Lampung				
	1	Air Alas	CA	72
	2	Air Seblat	CA	70
	3	Danau Menghijau	CA	68
	4	Kioyo I dan II	CA	74
	5	Muko-muko I dan II	CA	61
	6	Sungai Bahewo	CA	80
	7	Tanjung Laksaha	CA	81
	8	Teluk Klowe	CA	82
	9	Air Rami I & II	CA	66
	10	Gunung Nanu'ua	TB	65
	11	Semidang Bukit Kabu	TB	60
	12	Air Hitam	TWA	65
	13	Air Ketebat Danau Tes	TWA	60
	14	Lubuk Tapi Kayu Ajaran	TWA	48
	15	Pantai Panjang dan Pulau Baai	TWA	72
	16	Seblat	TWA	65
	17	Way Hawang	TWA	49
13 BKSDA Sumatera Selatan				
	1	Bentayan	SM	70
	2	Gumai Pasemah	SM	80
	3	Padang Sugihan	SM	69
	4	Gunung Maras	TN	43

	5	Gunung Permisan	TWA	56
	6	Jering Menduyung	TWA	64
14 BKSDA Jakarta				
	1	Pulau Rambut	SM	87
	2	Angke Kapuk	TWA	86
15 BKSDA Jawa Tengah				
	1	Bekutuk	CA	79
	2	Curug Bengkawah	CA	74
	3	Gunung Celing	CA	81
	4	Karang Bolong	CA	78
	5	Keling I ABC	CA	77
	6	Keling II/III	CA	78
	7	Moga	CA	78
	8	Nusakambangan Timur	CA	74
	9	Pager Wunung Darupono	CA	77
	10	Pringombo I	CA	70
	11	Telogo Dringo	CA	75
	12	Telogo Sumurup	CA	75
	13	Wijaya Kusuma	CA	72
	14	Grojogan Sewu	TWA	78
	15	Guci	TWA	75
	16	Sumber Semen	TWA	75
	17	Telogo Warno / Telogo Pengilon	TWA	78
16 BKSDA Yogyakarta				
	1	Batu Gamping	CA	79
	2	Batu Gamping	TWA	77
17 BKSDA Bali				
	1	Gunung Batur Bukit Payang	TWA	70
	2	Panelokan	TWA	63
	3	Sangeh (RTK.21)	TWA	68
18 BKSDA NTB				

	1	Toffo Kota Lambu	CA	55
	2	Danuera	KSA/KPA	11
	3	Jereweh	KSA/KPA	32
	4	Pulau Panjang	CA	53
	5	Pulau Moyo	TB	60
	6	Bangko Bangko	TWA	54
	7	Danau Rawa Taliwang	TWA	65
	8	Kerandangan	TWA	75
	9	Pulau Moyo	TWA	50
	10	Pulau Satonda	TWA	65
	11	Semongkat	TWA	68
	12	Tanjung Tampa	TWA	45
19 BKSDA Kalimantan Barat				
	1	Karimata	CA	61
	2	Lo Pat Foen Pi	CA	62
	3	Mandor	CA	61
	4	Nyiut Penrissen	CA	69
	5	Asuansang	TWA	63
	6	Gunung Kelam	TWA	70
	7	Sungai Liku	TWA	61
20 BKSDA Kalimantan Selatan				
	1	Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku	CA	71
	2	Asam-asam	KSA/KPA	37
	3	Kuala Lupak	SM	71
	4	Pulau Kaget	SM	72
	5	Pleihari Tanah Laut	TWA	66
21 BKSDA Kalimantan Tengah				
	1	Pararawen I dan II	CA	67
	2	Sei Sebangau	KSA/KPA	27
	3	Sungai Barito	KSA/KPA	34

	4	Sungai Kapuas	KSA/KPA	35
	5	Tanjung Malatayur	KSA/KPA	18
	6	Bukit Tangkiling	TWA	63
22 BKSDA Kalimantan Timur				
	1	Teluk Adang	CA	72
	2	Teluk Apar	CA	70
	3	Pulau Semama	SM	76
23 BKSDA Sulawesi Tenggara				
	1	Napabalano	CA	73
	2	Buton Utara	SM	73
	3	Tanjung Batikolo	SM	73
	4	Tanjung Peropa	SM	80
	5	Teluk Lasolo	TWAL	75
	6	Tirta Rimba / Air Jatuh	TWA	73
24 BKSDA Sulawesi Tengah				
	1	Gunung Tinombala	CA	72
	2	Morowali	CA	78
	3	Pamona	CA	74
	4	Lombuyan	SM	75
	5	Pati-Pati	CA	71
	6	Tanjung Santigi	SM	68
	7	Landusa Tomata	TB	68
	8	Pulau Tokobae	TWA	63
	9	Wera	TWA	76
25 BKSDA Sulawesi Utara				
	1	Panua	CA	64
	2	Tangale	CA	58
	3	Tanjung Panjang	CA	50
	4	Nantu	SM	68
	5	Karakelang	SM	65

	6	Gunung Ambang	TWA	62
26 BKSDA Maluku				
	1	Bekau Huhun	CA	28
	2	Gunung Api Kisar	CA	21
	3	Lifamatola	CA	32
	4	Pulau Seho	CA	40
	5	Taliabu	CA	33
	6	Tanjung Sial	CA	63
	7	Daab	KSA/KPA	41
	8	Danau Tihu	SM	36
	9	Gunung Sahuwai	KSA/KPA	62
	10	Sungai Niff	KSA/KPA	61
	11	Pulau Baun	SM	49
	12	Pulau Kasa	SM	82
	13	Pulau Kobror	SM	52
	14	Pulau Kasa	TWAL	54
	15	Pulau Marsegu	TWAL	74
C UPTD TAHURA				
1	UPTD Tahura Subulussalam	1	Lae Kombih	TAHURA 45
2	UPTD Tahura Tuanku Tambusai	2	Tuanku Tambusai	TAHURA 25
3	UPTD Tahura Bukit Barisan	3	Bukit Barisan	TAHURA 73
4	UPTD Tahura Dr. Muhammad Hatta	4	Dr. Muhammad Hatta	TAHURA 44
5	UPTD Tahura Bukit Sari	5	Bukit Sari	TAHURA 67
6	UPTD Tahura Bukit Rabang-Gluguran	6	Bukit Rabang - Gluguran	TAHURA 51
7	UPTD Tahura Wan Abdul Rahman	7	Wan Abdul Rahman	TAHURA 76
8	UPTD Tahura Gunung Mangkol	8	Gunung Mangkol	TAHURA 66
9	UPTD Tahura Gunung Menumbing	9	Gunung Menumbing	TAHURA 62

10	UPTD Tahura Banten	10	Banten	TAHURA	66
11	UPTD Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci	11	Gunung Palasari - Gunung Kunci	TAHURA	64
12	UPTD Tahura Ir. H. Juanda	12	Ir. H. Juanda	TAHURA	74
13	UPTD Tahura Pancoran Mas	13	Pancoran Mas	TAHURA	63
14	UPTD Tahura KGPAA Mangkunegoro I (Ngargoyoso)	14	KGPAA Mangkunegoro I	TAHURA	71
15	UPTD Tahura R. Soeryo	15	R. Soeryo	TAHURA	82
16	UPTD Tahura Nuraksa	16	Nuraksa	TAHURA	71
17	UPTD Tahura Prof. Ir. Herman Johannes	17	Prof. Ir. Herman Johannes	TAHURA	37
18	UPTD Tahura Lapak Jaru	18	Lapak Jaru	TAHURA	70
19	UPTD Tahura Lati Petangis	19	Lati Petangis	TAHURA	81
20	UPTD Tahura Abdul Latief/Sinjai	20	Abdul Latief/Sinjai	TAHURA	74
21	UPTD Tahura Sulawesi Tengah	21	Sulawesi Tengah	TAHURA	58
23	UPTD Tahura Sebatung	22	Sebatung	TAHURA	30
24	Dishutbun Kalbar	23	Pandan Puloh	TAHURA	31
25	Pemda Kab. Malino	24	Malino	TAHURA	28

Lampiran 11. Daftar Kawasan Konservasi Berstatus Warisan Dunia

No	Nama Situs Warisan Dunia	Tahun ditetapkan/Luas	UPT	Kawasan Konservasi	Isu-isu Pengelolaan
1	TN Komodo	1991/220.092 ha	- BTN Komodo - BBKSDA NTT	TN Komodo CA Wae Wuul	- Kerusakan terumbu karang - <i>Illegal & destructive fishing</i> - Sampah - Daya tampung dan daya dukung pengunjung - Pembangunan sarpras
2	TN Ujung Kulon	1991/75.092 ha	- BTNUK - BKSDA Bengkulu	TN Ujung Kulon CA Krakatau	- <i>Illegal & destructive fishing</i> - Permasalahan sampah - Pembangunan JRSCA
3	TN Lorentz	1999/2.348.683 ha	- BTN Lorentz	TN Lorentz	- Terancam masuk dalam <i>World Heritage List in Danger</i> - Pembangunan jalan - Pengembangan wilayah - Kematian hutan nothofagus - Usulan hutan adat
4	<i>Tropical Rainforest Heritage of Sumatra</i> (TRHS)	2004/2.526.401 ha	- BBTNGL - BBTNKS - BBTNBS	TNGL TNKS TNBS	- Masuk dalam <i>World Heritage List in Danger</i> - Perambahan dan illegal logging - Rencana pembangunan dan pengembangan jalan - Rencana Pemanfaatan Panas Bumi

Lampiran 12. Daftar Kawasan Konservasi Berstatus Cagar Biosfer

No	Nama Site	UPT	Kawasan Konservasi
1	CB Cibodas	BBTN Gunung Gede Pangrango	TN Gunung Gede Pangrango
		BBKSDA Jawa Barat	CA Telaga Warna
			TWA Telaga Warna
			TWA Jember
2	CB Komodo	BTN Komodo	TN Komodo
3	CB Lore Lindu	BBTN Lore Lindu	TN Lore Lindu
4	CB Tanjung Puting	BTN Tanjung Puting	TN Tanjung Puting
5	CB Pulau Siberut	BTN Siberut	TN Siberut
		BKSDA Sumatera Barat	TWA Saibi Sarabua
6	CB Gunung Leuser	BBTN Gunung Leuser	TN Gunung Leuser
7	CB Giam Siak Kecil Bukit Batu	BBKSDA Riau	SM Giam Siak
			SM Bukit Batu
8	CB Wakatobi	BTN Wakatobi	TN Wakatobi
9	CB Taka Bonerate	BTN Taka Bonerate	TN Taka Bonerate
10	CB Bromo Tengger Semeru Arjuno	BBTN Bromo Tengger Semeru	TN Bromo Tengger Semeru
		Prov. Jawa Timur	Tahura R Soeryo
11	CB Blambangan	BTN Baluran	TN Baluran
		BTN Alas Purwo	TN Alas Purwo
		BTN Meru Betiri	TN Meru Betiri
		BBKSDA Jawa Timur	TWA Kawah Ijen
12	CB Rinjani Lombok	BTN Gunung Rinjani	TN Gunung Rinjani
13	CB Berbak Sembilang	BTN Berbak Sembilang	TN Berbak
			TN Sembilang
		BKSDA Sumatera Selatan	SM Dangku
			SM Bentayan
14	CB Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu	BBTN Betung Kerihun Danau Sentarum	TN Betung Kerihun
			TN Danau Sentarum
15	CB Togean Tojo Una-una	BTN Kepulauan Togean	TN Kepulauan Togean

		BKSDA Sulawesi Tengah	CA Tanjung Api
16	CB Saleh Moyo Satonda	BTN Gunung Tambora	TN Tambora
			TWA Pulau Moyo
			TWA Satonda
			TB Pulau Moyo
17	Bunaken Tangkoko Minahasa	BTN Bunaken	TN Bunaken
		BKSDA Sulawesi Utara	CA Gunung Lokon
			KPHK Tangkoko
			CA Dua Sudara
			TWA Batu Angus
			TWA Batu Putih
		Pemprov Sulut	Tahura Gunung Tumpa
18	Karimun Jawa Jepara Muria	BTN Karimun Jawa	TN Karimun Jawa
19	Merapi Merbabu Menoreh	BTN Merapi	TN Gunung Merapi
		BTN Merbabu	TN Merbabu

LAPORAN KINERJA 2022



DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

GD. MANGGALA WANABAKTI NLOK 7 LANTAI 7

JL. JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270 | TELP. FAX: 5720229 | E-MAIL: DITKK@MENLHK.GO.ID